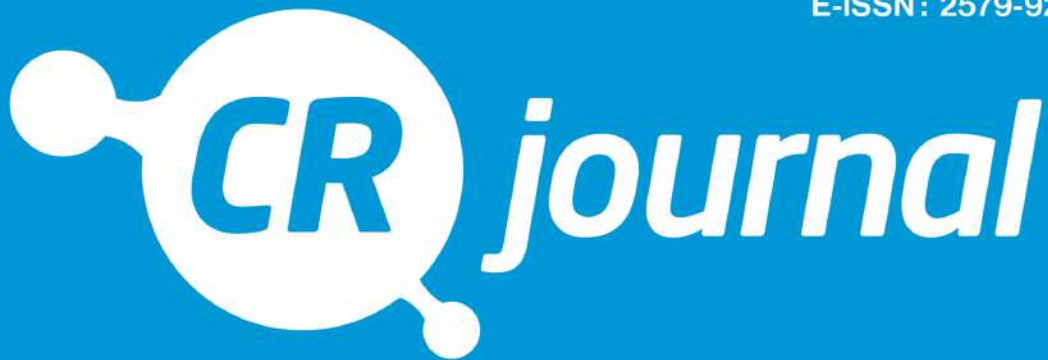


ISSN : 2460-4194
E-ISSN : 2579-9231



Creative Research for West Java Development

Volume 09 Nomor 01, Juni 2023, Hal. 1-72

Penilaian Kinerja IPAL Komunal Terbangun di Kota Cimahi

Mohamad Rangga Sururi, Mila Dirgawati, Wili Wiliana, dan Nining Widiawati

**Kontribusi Komponen Destinasi Wisata dalam Mendukung
Pembangunan Desa di Kabupaten Pangandaran**

Latifah Nurrahmah Juhara dan Agam Marsoyo

**Dampak Sosial Perencanaan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional
Jawa Barat dan Kertajati Aerocity terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat**

Harun Din Haq dan Heru Purboyo Hidayat Putro

**Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penurunan Kemiskinan
di Kabupaten Garut**

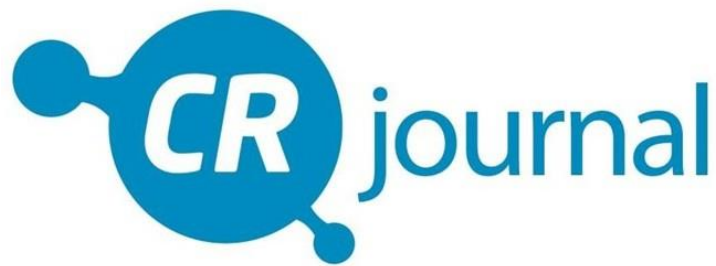
*Ayuka Pradina Ashara Primadipta Sewaminggi, Ahmad Muhajirin, Garan Paruta,
Keni Dwikania, Mira Janu Yustisi, Ribut Qori'ah, Urip Basuki, dan Bayu Kharisma*

**Dampak Akses Internet terhadap Pembangunan Ekonomi di Jawa Barat
Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19**

Siswantoro



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



Creative Research for West Java Development

Vol. 09 No. 01 Juni 2023

ISSN : 2460-4194

E-ISSN : 2579-9231

PENGANTAR TIM EDITORIAL

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat telah dapat menyelesaikan penerbitan Jurnal BP2D Provinsi Jawa Barat yang bernama CR Journal. CR Journal dapat juga diakses dalam jaringan melalui alamat web crjournal.jabarprov.go.id.

CR Journal Vol. 09 No. 01 Juni 2023 ini terdiri dari 5 (lima) artikel yang mencakup beberapa sektor dengan judul 1) Penilaian Kinerja IPAL Komunal Terbangun di Kota Cimahi, 2) Kontribusi Komponen Destinasi Wisata dalam Mendukung Pembangunan Desa di Kabupaten Pangandaran, 3) Dampak Sosial Perencanaan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, 4) Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Garut, dan 5) Dampak Akses Internet Terhadap Pembangunan Ekonomi di Jawa Barat Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19.

Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak terkait yang telah berpartisipasi pada penerbitan Jurnal BP2D Provinsi Jawa Barat, yaitu antara lain kepada Mitra Bestari dan para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu terbitnya CR Journal Vol. 09 No. 01 Juni 2023 ini.

Selamat membaca CR Journal Vol. 09 No. 01 Juni 2023, semoga bermanfaat.

Tim Editorial



Creative Research for West Java Development

Vol. 09 No. 01 Juni 2023

ISSN : 2460-4194
E-ISSN : 2579-9231

Pengantar Tim Editorial	i
Daftar Isi	ii
Penilaian Kinerja IPAL Komunal Terbangun di Kota Cimahi	1 - 14
Mohamad Rangga Sururi, Mila Dirgawati, Wili Wiliana, dan Nining Widiawati	
Kontribusi Komponen Destinasi Wisata dalam Mendukung Pembangunan Desa di Kabupaten Pangandaran	15 - 28
Latifah Nurrahmah Juhara dan Agam Marsoyo	
Dampak Sosial Perencanaan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat	29 - 42
Harun Din Haq dan Heru Purboyo Hidayat Putro	
Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Garut	43 - 58
Ayuka Pradina Ashara Primadipta Sewaminggi, Ahmad Muhajirin, Garan Paruta, Keni Dwikania, Mira Janu Yustisi, Ribut Qori'ah, Urip Basuki, dan Bayu Kharisma	
Dampak Akses Internet Terhadap Pembangunan Ekonomi di Jawa Barat Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19	59 - 72
Siswanto	

SUSUNAN KEANGGOTAAN EDITORIAL CR JOURNAL

PENGARAH	:	Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat
PENANGGUNG JAWAB	:	Sekretaris BP2D Provinsi Jawa Barat Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
EDITOR KEPALA	:	Yudha Hadian Nur, SE., MT.
WAKIL EDITOR KEPALA	:	Dr. Ramon Kaban, M.Si
EDITOR	:	1. Ir. Agus Ruswandi, M.Si 2. Aji Winara, S.Hut, M.Si 3. Dewi Gartika, S.Si, M.Si. 4. Muthya Diana, Sp., M.Adm.Pemb. 5. Wara Asfiya, M.Sc. 6. Juariah, S.Si., MA. 7. Hendra Hendrawan, ST, MT 8. Hana Riana Permatasari, M.Pd.
PENYUNTING PELAKSANA	:	1. Nurjaman Gunadi Putra, SP, MSP 2. Asep Deni Sopian, ST 3. Rostiyanah, A.Md 4. Gilang Mustika Pratama, A.Md 5. Nurul Ariyanti Utami Dewi, SP 6. Lupi Yuliantari, A.Md 7. Agustian Rahman, S.Kom. 8. Angga Irawan, A.Md. 9. Muchamad Rafi Subhi Fauzi, S.Kom
MANAJER JURNAL	:	Dra. Erni Vivi Orienta Sirait, M.Si
MITRA BESTARI	:	1. Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc. 2. Dr. Bintarsih Sekarningrum, M.Si 3. Eva Fauziyah, S.Hut., M.Sc. 4. Mia Rosmiati, S.Si., M.T.

Alamat Redaksi

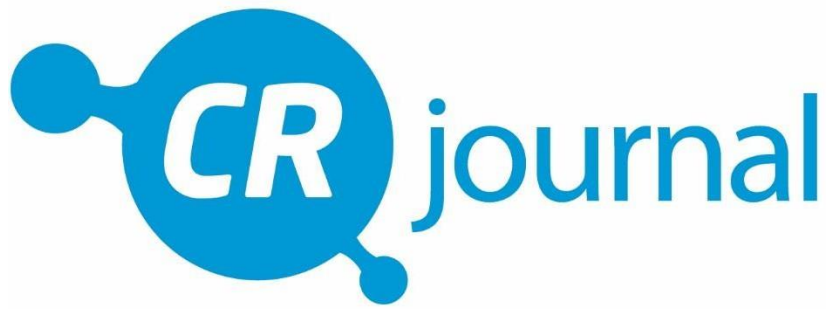
CR JOURNAL

Jalan Kawalayaan Indah Raya No 6 Bandung 40286

Telp: 022-87244652 Fax: 022-7272919

email : jurnal.bp2d@gmail.com

CR Journal (merupakan singkatan dari *Creative Research Journal*) adalah media publikasi hasil penelitian ilmiah di berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan permasalahan pembangunan di Jawa Barat. CR *Journal* dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.



Creative Research for West Java Development

Vol. 09 No. 01 Juni 2023

ISSN: 2460-4194

E-ISSN: 2579-9231

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL CR JOURNAL

Panduan penulisan artikel CR Journal berisi hal-hal yang harus dipenuhi oleh penulis agar artikel dapat diterbitkan dalam jurnal. Secara ilustrasi format naskah artikel dapat dilihat pada halaman terakhir panduan ini.

KETENTUAN UMUM

Naskah artikel yang dapat diterima adalah naskah artikel orisinal penulis yang belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dalam proses diterbitkan di media lain. Naskah artikel harus memuat urutan judul, Nama penulis, alamat, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih (jika ada), dan daftar pustaka.

Naskah artikel dikirim dalam bentuk *electronic file (soft copy)*. Naskah artikel diketik menggunakan Microsoft Word (MS Word) pada kertas A4 dengan format 2 kolom dengan margin kiri, atas, dan bawah sebesar 3 cm, sedangkan margin kanan sebesar 2,5 cm. Huruf yang digunakan adalah Arial 10 dengan spasi satu (kecuali ditentukan lain pada bagian cara penulisan). Jumlah halaman antara 10-15 halaman (termasuk tabel dan gambar). Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

STANDAR PENULISAN

A. Penulisan Judul

1. Judul harus spesifik, efektif, mencerminkan isi tulisan, dan tidak lebih dari 15 (lima belas) kata.
2. Judul ditulis dengan huruf kapital Arial 13, dicetak tebal (*bold*), dan diletakkan di tengah-tengah (*center*).
3. Apabila judul ditulis dalam bahasa Indonesia, maka pada bagian bawahnya ditulis ulang dalam bahasa Inggris dan dicetak miring atau *italic* (demikian pula sebaliknya) serta diberi jarak spasi 1 antar kedua judul.

B. Penulisan Nama Penulis

1. Nama penulis ditulis secara lengkap, tanpa singkatan, tanpa gelar akademis, tanpa jabatan dan tanpa kepangkatan.
2. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial 9, dan diletakkan di tengah-tengah (center).
3. Apabila penulis lebih dari satu orang, maka nama penulis utama diletakkan pada posisi pertama, diikuti dengan penulis selanjutnya menggunakan tanda hubung koma, dan penulis terakhir dengan kata sambung 'dan'.

C. Penulisan Alamat

1. Alamat memuat nama lembaga, nama jalan (beserta nomor), nama kota, kode pos, serta alamat email.
2. Alamat ditulis dengan huruf Arial 9 dan diletakkan di tengah-tengah (center).
3. Apabila artikel ditulis oleh lebih dari satu penulis, maka artikel wajib mencantumkan alamat lembaga dari masing-masing penulis seperti pada huruf C angka 1, namun alamat email cukup dimasukkan alamat email penulis pertama saja.
4. Apabila beberapa penulis memiliki alamat yang sama, maka cukup dicantumkan satu alamat untuk mewakili beberapa penulis tersebut.

D. Penulisan Abstrak

1. Abstrak ditulis secara ringkas dalam satu paragraf dan dalam dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia).
2. Abstrak memuat hal-hal sebagai berikut: a) apa yang akan diteliti; b) mengapa perlu diteliti; c) bagaimana metode yang digunakan; dan d) apa temuan yang diperoleh.
3. Abstrak tidak diperkenankan memuat referensi dan catatan kaki.
4. Abstrak ditulis dengan huruf Arial 9 dan tidak lebih dari 200 kata.
5. Apabila artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, maka abstract dalam bahasa Inggris ditulis terlebih dahulu, lalu selanjutnya diikuti dengan abstrak dalam bahasa Indonesia (demikian pula sebaliknya).
6. Kata 'abstrak (abstract)' ditulis dalam huruf kapital dan dicetak tebal (bold).

E. Penulisan Kata Kunci

1. Kata kunci harus dipilih secara cermat dan mencerminkan hal yang paling penting dalam artikel.
2. Kata kunci ditulis dalam dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam abstrak.
3. Abstrak diikuti dengan kata kunci, sedangkan abstract diikuti dengan keywords.
4. Kata kunci dan *keywords* menggunakan 3 – 5 kata.

F. Penulisan Pendahuluan

1. Pendahuluan memuat: a) latar belakang perlunya penelitian dilakukan yang didukung oleh teori atau literatur terkini dan kontribusinya bagi pengembangan wilayah Jawa Barat, b) fenomena/permasalahan yang menjadi fokus perhatian, dan c) tujuan yang ingin dicapai dari penelitian (termasuk hipotesis apabila ada).
2. Heading penulisan '**PENDAHULUAN**' ditulis dengan format: rata kiri, huruf kapital, Arial 10, dan dicetak tebal (*bold*).

G. Penulisan Metode

1. Metode dijelaskan secara rinci sehingga mudah dipahami.
2. Metode memuat: i) jenis dan teknik pengumpulan data (termasuk penjelasan lokasi, waktu, dan sampel atau bahan dan peralatan apabila menggunakan data primer), serta ii) teknik pengolahan dan analisis data.
3. Heading penulisan '**METODE**' ditulis dengan format: rata kiri, huruf kapital, Arial 10, dan cetak tebal (*bold*).

H. Penulisan Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan pembahasan mencakup interpretasi hasil uji statistik/ wawancara/ kuesioner/ sintesa literatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Hasil dan pembahasan harus dituangkan secara logis serta mendiskusikan kontribusi temuan dalam: a) menjelaskan fenomena/ permasalahan yang menjadi fokus perhatian, dan b) mendukung pembangunan Jawa Barat.
2. Heading penulisan '**HASIL DAN PEMBAHASAN**' ditulis dengan format: rata kiri, huruf kapital, Arial 10, dan cetak tebal (*bold*).

I. Penulisan Kesimpulan

1. Kesimpulan dituangkan secara singkat dan mencerminkan hal-hal penting dari penelitian. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian.
2. Heading penulisan '**KESIMPULAN**' ditulis dengan format: rata kiri, huruf kapital, Arial 10, dan cetak tebal (*bold*).

J. Penulisan Ucapan Terima Kasih (*jika ada*)

1. Ucapan terima kasih dituangkan secara ringkas dan tidak lebih dari 2 (dua) kalimat.
2. Heading penulisan '**UCAPAN TERIMA KASIH**' ditulis dengan format: rata kiri, huruf kapital, Arial 10, dan cetak tebal (*bold*).

K. Penulisan Referensi

1. Referensi disusun berdasarkan abjad, yaitu mulai dari abjad terkecil sampai terbesar dan hanya yang diacu yang dimasukkan dalam referensi.
2. Penulisan referensi mengikuti gaya Harvard (*Harvard style*).
3. Wikipedia dan Blog tidak boleh dijadikan acuan / sumber referensi.
4. Referensi ditulis dengan huruf Arial 9.
5. Bahan / Sumber primer penulisan jurnal harus berasal dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau prosiding terkini (10 tahun terakhir).
6. Contoh penulisan referensi:
 - **Buku**
KADOLPH, S.J. (2007) *Textiles*. 10th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 - **Bagian bab dalam buku**
TUCKMAN, A. (1999) Labour, skills and training. In: LEVITT, R. dkk., (eds.) *The reorganised National Health Service*. 6th ed. Cheltenham: Stanley Thornes, p. 135-155.
 - **Artikel jurnal**
LU, H. dan MIETHE, T.D. (2002) Legal representation and criminal processing in China. *British Journal of Criminology*, 42 (2), p. 267-280.
 - **Surat kabar**
BROWN, P. (2002) New foot and mouth outbreak suspected. *Guardian*, 27th Feb, p. 1.
 - **Artikel dalam konferensi**
GIBSON, E.J. (1977) The performance concept in building. In: *Proceedings of the 7th CIB Triennial Congress, Edinburgh, September 1977*. London: Construction Research International, p. 129-136.
 - **Tesis/disertasi**
MARSHALL, J. (2002) *The Manuscript tradition of Brunetto Latini's "Tresor"*. Unpublished thesis (PhD), University of London.
 - **Website**
UNIVERSITY OF SHEFFIELD LIBRARY (2001) *Citing electronic sources of information* [WWW] University of Sheffield. Diperoleh dari: <http://www.shef.ac.uk/library/libdocs/hslidvc1.pdf> [Diakses 23/02/07].

STANDAR PENYAJIAN TABEL, GAMBAR DAN KUTIPAN

A. Penyajian Tabel

1. Judul tabel ditulis pada bagian atas tabel dengan format: rata kiri dan huruf Arial 9.
2. Tulisan Tabel, Nomor, serta Judul Tabel dicetak tebal (*bold*).
3. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.), diikuti dengan tanda baca titik.
4. Judul tabel diletakkan setelah nomor tabel.

5. Isi tabel menggunakan huruf Arial 8-9 dengan spasi 1.
6. Sumber dan/atau keterangan diletakkan pada bagian bawah tabel dengan format: rata kiri, huruf Arial 8, dan dicetak miring (*italic*).
7. Tulisan pada baris (*row*) pertama tabel (yang umumnya berfungsi sebagai kategori) dicetak tebal (*bold*).
8. Tabel diletakkan di dalam kelompok teks dan dibuat rata tengah.

Contoh:

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pulau di Indonesia

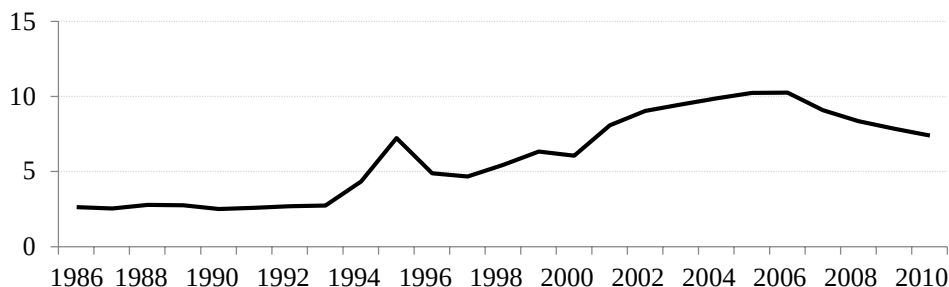
Periode	Indonesia	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya
mid-1980s	2.70%	2.17%	3.14%	1.91%	2.26%	1.10%
1990s	4.31%	4.15%	4.68%	3.55%	4.93%	2.29%
2000s	8.86%	8.69%	9.34%	7.18%	10.05%	5.18%

Sumber: BPS Indonesia, 1986-2010, diolah.

B. Penyajian Gambar

1. Gambar diletakkan di dalam kelompok teks dan dibuat rata tengah.
2. Judul gambar ditulis pada bagian bawah gambar dengan format: rata kiri dan huruf Arial 9.
3. Tulisan 'Tabel', 'Nomor', serta 'Judul Gambar' dicetak tebal (*bold*).
4. Penomoran gambar menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.), diikuti dengan tanda baca titik.
5. Judul gambar diletakkan setelah nomor gambar.
6. Sumber dan/ atau keterangan diletakkan pada bagian bawah judul gambar dengan format: rata kiri, huruf Arial 8, dicetak miring (*italic*).
7. Gambar dalam format file .jpg atau .tif menggunakan resolusi minimal 300 dpi.

Contoh:



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 1986-2010

Sumber: BPS Indonesia, 1986-2010, diolah.

C. Penyajian Kutipan

1. Setiap kutipan atau parafrase harus mencantumkan nama dan tahun publikasi.
2. Nama yang digunakan adalah nama terakhir dan diikuti tanda baca koma serta tahun publikasi, sebagai contoh:
 - a. penulis mengutip tulisan yang ditulis oleh seseorang bernama Andin Pratini yang dipublikasikan pada tahun 2014, maka pengutipan ditulis '(Pratini, 2014)'.
 - b. penulis mengutip tulisan yang ditulis oleh dua orang bernama Andin Pratini dan Anto Pranoto yang dipublikasikan pada tahun 2014, maka pengutipan ditulis '(Pratini dan Pranoto, 2014)'.

- c. penulis mengutip tulisan yang ditulis oleh lebih dari dua orang, yaitu Andin Pratini, Anto Pranoto, dan Anti Prawati, yang dipublikasikan pada tahun 2014, maka pengutipan ditulis '(Pratini dkk., 2014)'.
- 3. Apabila nama seseorang yang dikutip merupakan bagian dari suatu pernyataan maka ditulis sebagai berikut:
 - a. Apabila satu orang: Graham (2014) menyatakan bahwa
 - b. Apabila dua orang: Graham dan Bruce (2014) menyatakan bahwa
 - c. Apabila lebih dari dua orang: Graham dkk. (2014) menyatakan bahwa
- 4. Apabila penulis memberikan kutipan langsung, maka kutipan harus diapit oleh tanda kutip '.. ' dan pada sumber referensi harus ditambahkan halaman.

Contoh:

Observasi merupakan "primary technique for collecting data on nonverbal behavior" (Bailey 2008, p. 242).

Ilustrasi Format Penulisan

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA, MAKSIMAL 15 KATA

TITLE (ENGLISH VERSION), 15 WORDS MAXIMUM

Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3
Nama lembaga nama jalan, nama kota, kode pos
Alamat email penulis 1

ABSTRACT

Abstract english version, written in 1 paragraph contain 200 word. Abstract contain research aim/purpose, method, and reseach results; Abstract using past tense sentences. Abstract shall not contain of references and footnotes.

Keywords: one or more word(s) or phrase(s), that it's important, spesific, or representative for the article, using 3-6 words.

ABSTRAK

Abstrak berbahasa Indonesia berisi 200 kata dan hanya terdiri dari 1 paragraf, yang memuat tujuan, metode, serta hasil penelitian. Abstrak tidak diperkenankan memuat referensi dan catatan kaki.

Kata kunci: Kata kunci harus dipilih secara cermat dan mencerminkan hal yang paling penting dalam artikel menggunakan 3-6 kata.

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang perlunya penelitian dilakukan yang didukung oleh teori atau literatur terkini dan kontribusinya bagi pengembangan wilayah Jawa Barat, fenomena/permasalahan yang menjadi fokus perhatian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian (termasuk hipotesis apabila ada). Setiap kutipan atau parafrase harus mencantumkan nama dan tahun publikasi. Sebagai contoh misalnya ppabila penulis memberikan kutipan langsung, maka kutipan harus diapit oleh tanda kutip „...” dan pada sumber referensi harus ditambahkan halaman. Contoh: Observasi merupakan “primary technique for collecting data on nonverbal behavior” (Bailey, 2008).

Permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian ditulis secara naratif dalam paragraf-paragraf, tidak perlu diberi subjudul khusus. Demikian pula definisi operasional, apabila dirasa perlu, juga ditulis naratif. Pendahuluan ditulis dengan Arial 10, dengan spasi antarbaris *1lines*.

METODE

Metode dijelaskan secara rinci sehingga mudah dipahami. Metode memuat: jenis dan teknik pengumpulan data (termasuk penjelasan lokasi, waktu, dan sampel atau bahan dan peralatan apabila menggunakan data primer), serta teknik pengolahan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mencakup interpretasi hasil uji statistik/wawancara/kuesioner/sintesa literatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Hasil dan pembahasan harus dituangkan secara logis serta mendiskusikan kontribusi temuan dalam:

- menjelaskan fenomena/permasalahan yang menjadi fokus perhatian, dan
- mendukung pembangunan Jawa Barat.

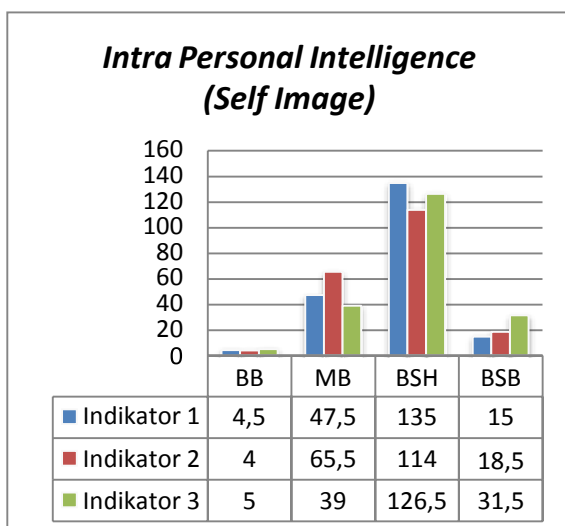
Tabel diletakkan di dalam kelompok teks dan diberi keterangan. Judul Tabel ditulis dari kiri, menggunakan huruf Arial 9, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung dan dicetak tebal dan diberi nomor urut tabel menggunakan angka arab diikuti dengan tanda baca titik. Jika lebih dari satu baris, dituliskan dalam spasi tunggal (*at least 12*). Isi tabel menggunakan huruf Arial 8-9 dengan spasi 1. Tabel yang ditampilkan tanpa garis vertical. Sumber tabel diletakkan pada bagian bawah tabel dengan format rata kiri dan huruf Arial 8, dicetak miring. Sebagai contoh, dapat dilihat Tabel 1.

Hasil berupa gambar, atau data yang dibuat gambar / skema / grafik / diagram / sebangsanya, pemaparannya juga mengikuti aturan yang ada; gambar diletakkan di dalam kelompok teks dan diberi keterangan. Judul gambar diletakkan dibawah gambar, ditulis dari kiri, menggunakan huruf Arial 9, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung dan dicetak tebal dan diberi nomor urut gambar dengan menggunakan angka arab diikuti dengan tanda baca titik. Sumber gambar diletakkan pada bagian bawah judul gambar dengan format rata kiri, huruf Arial 8, dicetak miring (*italic*). Seperti yang dicontohkan pada Gambar 1.

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pulau di Indonesia

Periode	Indonesia	Sumatera	Jawa
Mid-1980s	2.70%	2.17%	3.14%
1990s	4.31%	4.31%	4.15%
2000s	8.86%	8.865	8.69%

Sumber : BPS Indonesia, 1986-2010, diolah



Gambar 1. Tingkat Intra Personal Intelligence (Self Control) Anak Usia 5-6 Tahun di Lembaga PAUD

Sumber: Hasil data sekunder dari tabel 3 poin 1 tentang Intra Personal Intelligence (Self Control)

Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data.

Pembahasan ditulis melekat dengan data yang dibahas. Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dituangkan secara singkat dan mencerminkan hal-hal penting dari penelitian. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menuliskan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu secara substansi maupun finansial dituangkan secara ringkas dan tidak lebih dari 2 (dua) kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

Ditulis di belakang SIMPULAN DAN SARAN,

dengan mengikuti gaya selingkung E-Journal, seperti tercantum dalam *Guideline* jurnal ini (yang meratifikasi *Harvard style*)

Ditulis dalam spasi tunggal (atau *at least 12pt*), antardaftar pustaka diberi jarak 1 spasi.

Sebagian contoh cara penulisan referensi/acuan di dalam DAFTAR PUSTAKA, diberikan berikut.

Contoh jika berasal dari buku teks:

Gronlund, N.E. & Linn, R.L. (1990). *Measurement and evaluation in teaching*. (6thed.). New York: Macmillan.

Contoh jika berasal dari Buku teks yang dirangkum oleh editor :

Sofian Effendi. (1982). Unsur-unsur penelitian ilmiah. Dalam Masri Singarimbun (Ed.). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.

Contoh jika berasal dari berasal Buku terjemahan :

Daniel, W.W. (1980). *Statistika nonparametrik terapan*. (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta : Gramedia.

Contoh jika berasal dari Skripsi/tesis/desertasi :

MARSHALL, J. (2002) The Manuscript tradition of Brunetto Latini's "Tresor". Unpublished thesis (PhD), University of London.

Contoh jika berasal dari Artikel Jurnal :

LU, H. dan MIETHE, T.D. (2002) Legal representation and criminal processing in China. *British Journal of Criminology*, 42 (2), p. 267-280.

Contoh jika berasal dari Dari kumpulan abstrak penelitian atau proceeding:

Paidi. (2008). Urgensi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan metakognitif siswa SMA melalui pembelajaran biologi. *Prosiding, Seminar dan Musyawarah Nasional MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 30 Mei 2008*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Contoh jika berasal dari Website :

UNIVERSITY OF SHEFFIELD LIBRARY (2001) Citing electronic sources of information [WWW] University of Sheffield. Diperoleh dari: <http://www.shef.ac.uk/library/libdocs/hsldevc1.pdf> [Diakses 23/02/07].

PENILAIAN KINERJA IPAL KOMUNAL TERBANGUN DI KOTA CIMAHI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF CONSTRUCTED COMMUNAL WWTP IN CIMAHI CITY

Mohamad Rangga Sururi¹, Mila Dirgawati¹, Wili Wiliana¹, dan Nining Widiawati²

¹Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional Bandung, JL PHH Mustapa No.23, Bandung, 40124

²Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Jl Raden Demang Hardjakusumah, Cimahi, 40153

rangga@itenas.ac.id

ABSTRACT

The problem of domestic waste in Cimahi City must be responded by providing proper sanitation such as a centralized domestic waste water management (SPALD-T) on a communal scale. This system provides infrastructure and facilities for community-based domestic wastewater treatment (Sanimas). In 2021, there were 14 new communal systems that must be monitored to obtain updated technical and non-technical data on the entire built system which was integrated with spatial and non-spatial data based on an information system. This study was conducted to support database availability, identify problems and potential improvements, and provide input in determining and planning the location of wastewater facilities and infrastructure in the future. The existing conditions of the network system and treatment system were obtained by conducting observation and interviews. The system evaluation was carried out based on scoring the parameters of system functioning, the number of house connections, network conditions, wastewater treatment plant (WWTP) conditions, WWTP management financial condition, WWTP maintenance, and institutional aspects. The spatial and non-spatial data were analyzed with ArcGIS. The scoring results and analysis of the entire system have shown that the new system functions have met their purpose with an average score of 82.05%. Moreover, there was one sub-district with a very high-risk sanitation category (red zone), but there is no new communal system in this area. These results form the basis for planning the placement or improvement of wastewater facilities and infrastructure in Cimahi City.

Keywords: Arc gis,communal system,evaluation,score,improvement.

ABSTRAK

Permasalahan limbah domestik di Kota Cimahi harus direspon dengan penyediaan sanitasi yang layak, utamanya pengelolaan limbah domestik terpusat (SPALD-T) skala komunal yang menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik berbasis masyarakat (Sanimas). Pada 2021, terdapat 14 sistem komunal baru yang harus didata untuk memperbarui data keseluruhan sistem yang terbangun. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemutakhiran data dengan sistem informasi yang mengintegrasikan data spasial dan non spasial. Hal ini untuk menunjang ketersediaan *database*, mengidentifikasi permasalahan dan mengenali potensi perbaikan; serta memberikan masukan dalam menentukan dan merencanakan penempatan lokasi sarana serta prasarana air limbah di masa yang akan datang. Kondisi eksisting sistem jaringan dan sistem pengolahan diperoleh dengan pengamatan dan wawancara. Penilaian sistem dilakukan melalui skoring parameter keberfungsian sistem, jumlah sambungan rumah, kondisi jaringan, kondisi IPAL, kondisi keuangan pengelolaan IPAL, pemelihara IPAL, dan aspek kelembagaan. Selain itu akan di data kepadatan penduduk dan status risiko sanitasi setiap kelurahan di integrasikan secara spasial dengan Arc GIS. Hasil skoring dan analisis Arc Gis keseluruhan sistem menunjukkan bahwa sistem baru berfungsi sesuai tujuannya hanya masih lemah dari sisi keuangan dan kelembagaan dengan rata – rata skor 82,05%. Selain itu, terdapat 1 kelurahan berisiko sangat tinggi (zona merah) namun tidak terdapat system baru di wilayah ini. Hasil ini menjadi dasar untuk perencanaan penempatan atau perbaikan sarana serta prasarana air limbah di Kota Cimahi.

Kata kunci: Arc Gis, Sistem Komunal, evaluasi, Skoring, perbaikan.

PENDAHULUAN

Kota Cimahi memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kedua terbesar di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung (DLH Jabar, 2022). Kepadatan rata-rata penduduk di Kota Cimahi mencapai 14.556 jiwa/km² (BPS Kota Cimahi, 2022), secara signifikan menimbulkan tekanan bagi lingkungan, salah satunya terkait air limbah domestik. Respon terbaik bagi tekanan tersebut adalah penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang layak bagi masyarakat.

Walaupun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, pemerintah Kota Cimahi belum menyediakan fasilitas pengolahan air limbah domestik *off site* kawasan (DPKP Kota Cimahi, 2021). Saat ini pengelolaan air limbah domestik di Kota Cimahi masih mengandalkan sistem pengelolaan limbah domestik-terpusat (SPALD-T) hanya pada skala komunal (Dirgawati et al., 2021). Fasilitas limbah domestik yang layak menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Kota Cimahi, karena merupakan hak dasar, terutama guna menunjang kesehatan masyarakat. Kegagalan system pengelolaan air limbah bahkan akan mempengaruhi kualitas air permukaan (Sururi dkk., 2021). Peneliti terdahulu (Dirgawati dkk., 2021; Liberda dkk., 2021) melakukan evaluasi keberhasilan sistem komunal yang dititikberatkan hanya pada aspek teknis, padahal dibutuhkan integrasi aspek keuangan, kelembagaan selain aspek teknis untuk menilai keberhasilan suatu SPALD-T komunal.

Berdasarkan data dalam rencana induk pengelolaan air limbah domestik, pada Tahun 2020, sebanyak 36,86% penduduk di Kota Cimahi belum memiliki sarana pengelolaan air limbah domestik yang layak (DPKP Kota Cimahi, 2021). Perhatian pemerintah difokuskan kepada akses penduduk terhadap prasarana dan sarana air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lingkungan penduduk kumuh yang tidak dilengkapi infrastruktur yang baik termasuk pengelolaan limbah domestik (UN - Habitat, 2004). Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) merespon hal tersebut dengan meluncurkan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), dan sudah melakukannya sejak tahun 2010. Tahun

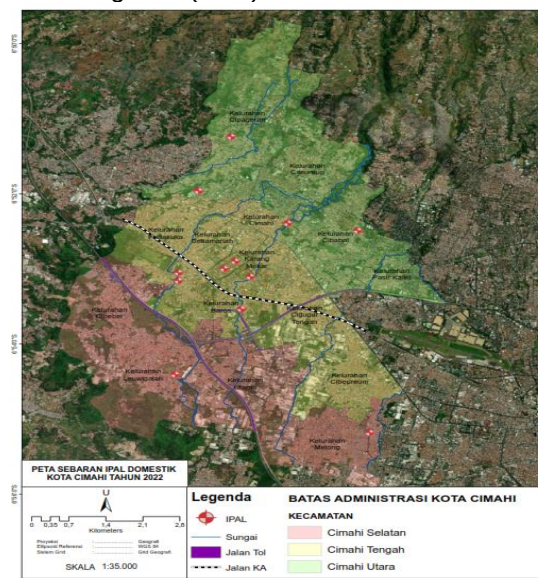
2021 terdapat 14 sistem terbangun dan akan dievaluasi keseluruhan sistem terbangun tersebut.

Evaluasi teknis yang biasa dilakukan akan membutuhkan waktu yang lama serta berbiaya tinggi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kondisi sistem yang baru terbangun dengan *tool* sistem informasi yang mengintegrasikan data spasial dan non spasial, serta mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis seperti kelembagaan, keuangan dan peran serta masyarakat. Selain evaluasi sistem terbangun, *tool* ini akan menunjang ketersediaan *database* bagi pengelolaan air limbah di Kota Cimahi, mengidentifikasi permasalahan terhadap pengelolaan di lapangan dan mengenali potensi perbaikan yang dapat diterapkan di wilayah kegiatan. Selanjutnya, studi ini diharapkan akan memberikan masukan dalam menentukan dan merencanakan penempatan lokasi akses sarana dan prasarana air buangan.

METODE

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah 14 SPALD-T komunal yang dibangun pada Tahun 2021 di Kota Cimahi (Gambar 1). Tabel 1 menunjukkan bahwa SPALD-T komunal tersebut tersebar di tiga kecamatan dan 8 kelurahan di Kota Cimahi. Saat ini setiap sistem dikelola oleh Kelompok Pemanfaat dan Pengelola (KPP).



Gambar 1. Peta Sebaran IPAL Domestik Tahun 2022

Tabel 1. Lokasi SPALD-T Komunal Terbangun di Tahun 2021

No	Kelompok Pemanfaat dan Pengelola (KPP)	Kelurahan	Kecamatan
1	Makmur	Cipageran	Cimahi Utara
2	Balumbang Kulon	Cipageran	Cimahi Utara
3	Balumbang Wetan	Cipageran	Cimahi Utara
4	Citaman Sehat	Cibabat	Cimahi Utara
5	Wisma Sabar	Setiamanah	Cimahi Tengah
6	Poncol Jaya	Baros	Cimahi Tengah
7	Mitra Sejati	Baros	Cimahi Tengah
8	Bartem 1	Baros	Cimahi Tengah
9	Flamboyan	Baros	Cimahi Tengah
10	Marmul	Cimahi	Cimahi Tengah
11	Sambara 2	Karangmekar	Cimahi Tengah
12	Sambara 1	Karangmekar	Cimahi Tengah
13	Berkah Sawargi	Melong	Cimahi Selatan
14	Harapan Indah	Leuwigajah	Cimahi Selatan

DATA SEKUNDER

Data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah:

- Status risiko sanitasi per kelurahan yang diambil dari strategi sanitasi kota (SSK) Tahun 2021. Status sanitasi menggambarkan kondisi pengelolaan sanitasi di suatu wilayah dan akan menentukan strategi pengelolaan fasilitas sanitasi yang harus dipersiapkan (A'isyah dkk., 2021),
- Data kepadatan penduduk bersumber dari buku Kota Cimahi dalam Angka Tahun 2022. Kepadatan penduduk akan menentukan teknologi pengolahan air limbah karena berhubungan dengan ketersediaan lahan serta potensi terjadinya pencemaran lingkungan (A'isyah dkk., 2021; Siddik dkk., 2021).

DATA PRIMER

Data primer pada penelitian ini terdiri dari lokasi jaringan dan IPAL dan kondisi eksisting sistem jaringan.

A) LOKASI/KOORDINAT IPAL DAN JARINGAN

Tracking dan pencatatan koordinat IPAL dilakukan untuk seluruh SPALD-T yang

diteliti dengan menggunakan GPS Garmin 62S. *Tracking* dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terhubung ke sistem.

B) KONDISI EKSISTING SISTEM JARINGAN DAN IPAL

Observasi atau pengamatan dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi eksisting: (i) sistem jaringan; (ii) sistem pengolahan. Wawancara hanya dilakukan kepada pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pengelola (KPP).

PENILAIAN KINERJA IPAL KOMUNAL

Penilaian sistem dilakukan melalui skoring untuk tujuh parameter yang ditentukan bersama dengan DPKP dan fasilitator adalah: keberfungsian sistem, jumlah sambungan rumah, kondisi jaringan, kondisi IPAL, Kondisi keuangan pengelolaan IPAL, pemelihara IPAL, dan aspek kelembagaan. Adapun wawancara yang dilakukan dengan KPP dan warga secara acak menyangkut parameter dengan skoring per parameter sebagai berikut:

1. Indikator Keberfungsian sistem menunjukkan ada atau tidaknya kesalahan konstruksi ataupun perencanaan yang menyebabkan sistem tidak berfungsi. Sistem dengan kondisi keberfungsian yang baik artinya dapat menghantarkan air limbah domestik (*black water* maupun *grey water*) dari sumber (rumah) ke IPAL secara berkelanjutan. Skoring diberikan sebagai berikut: Skor 1 jika SPALD-T tidak berfungsi sama sekali; Skor 2 jika SPALD-T pada bagian sistem terdapat masalah seperti adanya peletakan dan kondisi bak kontrol atau manhole yang tidak sesuai kaidah teknis; Skor 3 jika sistem berfungsi dengan baik.
2. Jumlah SR, dengan indikator tidak ada pengurangan jumlah SR, bahkan terjadi peningkatan jumlah SR yang terhubung ke SPALD-T komunal. Data tersebut diperoleh dengan membandingkan data jumlah SR dari dokumen perencanaan dengan hasil survey pada studi ini. Skoring diberikan sebagai berikut: Skor 1 jika SPALD-T terdapat pengurangan jumlah SR dibandingkan desain; Skor 2 jika jumlah SR yang menggunakan SPALD-T tetap; Skor 3 jika SR yang dilayani SPALD-T bertambah. Pengurangan jumlah SR bisa

diakibatkan karena keberfungsian ataupun kondisi jaringan, sehingga masyarakat memutuskan untuk menghentikan sambungan dan kembali menggunakan SPALD- Setempat (SPALD-S),

3. Kondisi jaringan, dengan indikator terjadinya sumbatan atau kebocoran dan penyebab dari kejadian tersebut juga diidentifikasi pada studi ini. Skor 1 jika jaringan sering tersumbat; Skor 2 jika jaringan kadang-kadang tersumbat; Skor 3 jika jaringan tidak pernah tersumbat. Berbeda dengan indikator keberfungsian, indikator kondisi jaringan terkait dengan operasi dan pemeliharaan jaringan,
4. Kondisi pengolahan IPAL, pengamatan kualitas air limbah di inlet dan outlet secara fisik yang diamati kondisi air limbah apakah berbuih, terdapat sampah, serta warna dari air limbahnya. Skor 1 jika inlet selalu terdapat sampah dan berbuih dan jika outlet berbuih dan berwarna hitam serta berbau; Skor 2 jika jaringan kadang-kadang (beberapa kali dalam satu bulan) di inlet terdapat sampah dan di outlet kadang-kadang kondisi air tetap hitam dan agak berbau; Skor 3 jika di inlet tidak terdapat sampah di outlet tidak hitam dan berbuih serta tidak berbau,
5. Kondisi keuangan KPP untuk pengelolaan IPAL, dengan indikator kondisi keuangan apakah kurang (minus), *balance* atau terdapat keuntungan yang tersimpan. Skor 1 diberikan jika neraca keuangan selisih pemasukan dan pengeluaran minus, skor 2 diberikan jika neraca keuangan *balance* antara pemasukan dan pengeluaran, skor 3 diberikan jika pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran,
6. Pemelihara IPAL, dengan indikator adanya KPP dan keterlibatan masyarakat untuk memelihara sistem. Skor 1 jika tidak ada yang melakukan pemeliharaan, skor 2 jika pemeliharaan dilakukan hanya oleh KPP, skor 3 jika pemeliharaan dilakukan oleh KPP dan terdapat peran serta masyarakat,
7. Aspek kelembagaan terdiri dari beberapa sub-parameter yaitu: (i) legalisasi kelembagaan; (ii) kelengkapan struktur organisasi; (iii)

jumlah pengurus aktif; (iv) kegiatan rapat; dan (v) kompetensi KPP.

Rentang nilai atau skor 1-3, dimana semakin tinggi skor maka semakin baik kinerja IPAL sistem komunal. Secara khusus, parameter kelembagaan terbagi atas beberapa sub-parameter dengan kategori dan penentuan skor sebagai berikut:

- Legalisasi kelembagaan, skor 1 diberikan jika kelembagaan tidak disertai SK atau keterangan tertulis, skor 2 diberikan jika kelembagaan disertai SK atau keterangan tertulis, skor 3 diberikan jika kelembagaan disertai akta notaris.
- Prosedur Operasional Standar (POS) operasional dan pemeliharaan Program Kotaku, Dirjen Cipta karya (2021) menyatakan bahwa struktur organisasi KPP terdiri dari Ketua, sekretaris, serta Koordinator per bidang prasarana sarana yang mengkoordinir para Ketua blok yang berada di tingkat RT. Struktur organisasi, dengan skor 1 jika struktur tidak ada, skor 2 jika struktur tidak lengkap dan Skor 3 jika lengkap seperti POS tersebut.
- Jumlah pengurus aktif, dengan skor 1 jika jumlah pengurus < 2 orang, skor 2 jika jumlah pengurus 2-4, skor 3 jika jumlah pengurus >4 orang. Keberadaan pengurus aktif ditanyakan berdasarkan keaktifan mereka dalam KPP (PUPR,2022),
- Kegiatan rapat, dengan skor 1 jika tidak pernah ada rapat, skor 2 diberikan jika rapat tidak rutin, skor 3 jika rapat dilakukan secara rutin (terjadwal dan terdokumentasi),
- Kompetensi, skor 1 jika tidak ada yang kompeten, skor 2 jika sebagian personil kompeten, skor 3 jika seluruh personil kompeten (pernah mengikuti pelatihan yang diadakan DPKP dan memahami tugas mereka masing-masing). Penilaian kompetensi KPP juga ditanyakan kepada DPKP serta masyarakat setempat ketika survey. KPP dianggap kompeten jika mampu menanggulangi gangguan terhadap keberfungsian sistem khususnya penyumbatan, serta aktif berkomunikasi dengan DPKP jika membutuhkan bimbingan teknis,

Hasil skoring akan direkapitulasi dan dibuat dalam persentase untuk diperbandingkan. Semakin tinggi nilai persentase, maka semakin baik kinerja IPAL sistem komunal.

PENGOLAHAN DATA SPASIAL DAN NON SPASIAL

Seluruh data spasial dan non spasial diolah dengan Sistem Informasi Geografis menggunakan Arc Gis dari ESRI. Data yang digunakan adalah data kepadatan penduduk, status risiko kondisi sanitasi serta hasil perhitungan skoring kondisi SPALD-T komunal.

Pengelompokkan parameter kepadatan penduduk adalah: warna hijau untuk kepadatan sedang dengan nilai kurang dari 85 jiwa/ha; warna kuning untuk kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi dengan nilai 85 – 149 jiwa/ha; dan warna merah kelurahan dengan kepadatan penduduk sangat tinggi dengan nilai lebih dari 150 jiwa/ha. Pengelompokan tersebut didasarkan kepada Batasan penduduk untuk SPALD-T Kawasan atau Kota adalah lebih dari 150 jiwa/Ha (PUPR,2017), sementara kepadatan penduduk terendah di kelurahan Kota Cimahi adalah 85 jiwa/Ha (BPS Kota Cimahi, 2022)

Status risiko kondisi sanitasi dikelompokkan menjadi empat kelompok sebagai berikut: warna hijau dengan skor antara 80 – 86 untuk kategori kelurahan dengan risiko rendah, warna biru dengan skor antara 87 – 91 untuk kategori kelurahan dengan risiko sedang, warna kuning dengan skor antara 92 – 95 untuk kategori kelurahan dengan risiko tinggi, dan warna merah dengan skor lebih dari 96 untuk kategori kelurahan risiko sangat tinggi.

Hasil overlay data kepadatan penduduk dan status risiko kondisi sanitasi memberikan informasi yang lebih jelas dan diharapkan akan memberi masukan penting untuk pembuat kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan SPALD-T di Kota Cimahi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keberfungsian Sistem

Pengecekan kondisi dan pemeliharaan yang rutin terhadap SPALD-T komunal perlu dilakukan untuk menjaga kualitas sistem agar berjalan secara optimal, dan keberlanjutan sistem ini menjadi isu utama di beberapa lokasi di Indonesia (Bahar et al., 2017). Sistem yang berfungsi dengan baik dapat menghantarkan air limbah domestik (*black water* maupun *grey water*) dari sumber (rumah) ke IPAL (Sururi dkk., 2017).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh data seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Informasi Umum Hasil Survey Sistem IPAL Kota Cimahi Tahun 2022

Nama KPP	Fungsional Fasilitas	Skor
Makmur	Berfungsi	3
Balumbang Kulon	Berfungsi	3
Balumbang Wetan	Berfungsi	3
Citaman Sehat	Berfungsi	3
Wisma Sabar	Berfungsi	3
Poncol Jaya	Berfungsi	3
Mitra Sejati	Berfungsi	3
Bartem 1	Berfungsi	3
Flamboyan	Berfungsi	3
Marmul	Berfungsi	3
Sambara 2	Berfungsi	3
Sambara 1	Berfungsi	3
Berkah Sawargi	Berfungsi	3
Harapan Indah	Berfungsi	3
Jumlah (Skor Aktual)		42

Sumber: Hasil Survey, 2022

Skor aktual yang diperoleh sama dengan skor ideal, yakni 42. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperoleh %skor aktual sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{42}{42} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 100 \%$$

Dengan persentase 100%, maka terdata 14 SPALD-T komunal tersebut berfungsi sesuai dengan tujuannya.

b. Sambungan Rumah

Setiap SPALD-T komunal melayani SR sesuai dengan rencana desain yang ditentukan dari kapasitas maksimum pada *catchment* areanya. Penilaian pada parameter ini sistem yang berkelanjutan akan mengalami penambahan SR. Tabel 3. menunjukkan hasil skoring untuk parameter SR.

Tabel 3. Hasil Survey Jumlah Sambungan Rumah IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

NAMA KPP	Status Penambahan/ Pengurangan SR	Skor
Makmur	Tetap	2
Balumbang Kulon	Tetap	2
Balumbang Wetan	Tetap	2
Citaman Sehat	Tetap	2
Wisma Sabar	Tetap	2
Poncol Jaya	Tetap	2
Mitra Sejati	Tetap	2
Bartem 1	Bertambah	3
Flamboyan	Bertambah	3
Marmul	Tetap	2
Sambara 2	Tetap	2
Sambara 1	Tetap	2
Berkah Sawargi	Tetap	2
Harapan Indah	Tetap	2
Jumlah (Score Aktual)		30

Sumber: Hasil Survey, 2022

Berdasarkan Tabel 3, diketahui umumnya (12 SPALD-T) jumlah SR tersambung tetap. Kurangnya minat karena pemilik rumah yang tidak berkenan atau karena adanya kesulitan teknis, fakta ini memperkuat penelitian terdahulu di Kota Bogor (Adhyaksa dkk., 2019). Namun diketahui 2 sistem di Kecamatan Cimahi Tengah (Bartem 1 dan Flamboyan) terjadi penambahan jumlah SR. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut dirasakan bermanfaat dan bekerja sebagaimana mestinya, sehingga ada penambahan minat masyarakat yang pengelolaan air limbahnya ke SPALD-T.

Skor aktual yang didapat berjumlah 30, sementara skor idealnya adalah 42 apabila setiap sistem terjadi penambahan jumlah SR. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh persentase skor aktual sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{30}{42} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 71,43 \%$$

Berdasarkan perhitungan bahwa persentase penambahan sambungan rumah secara total keseluruhan sistem sebesar 71,43%.

c. Jaringan

Pemeliharaan yang rutin terhadap jaringan sistem IPAL perlu dilakukan agar sistem dapat bekerja menghantarkan air limbah, terhindar gangguan berupa sumbatan atau tidak mampu mengalirkan air limbah dari SR. Hasil skoring kondisi jaringan pada sistem IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022 dapat dilihat pada Tabel 4. Sementara contoh informasi jaringan hasil survey yang diinputkan pada Arc Gis dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 4. Hasil Survey Kondisi Jaringan Sistem IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

NAMA KPP	Penyumbatan Jaringan	Skor
Makmur	Kadang-kadang	2
Balumbang Kulon	Kadang-kadang	2
Balumbang Wetan	Tidak	3
Citaman Sehat	Kadang-kadang	2
Wisma Sabar	Kadang-kadang	2
Poncol Jaya	Tidak	3
Mitra Sejati	Tidak	3
Bartem 1	Tidak	3
Flamboyan	Kadang-kadang	2
Marmul	Tidak	3
Sambara 2	Tidak	3
Sambara 1	Tidak	3
Berkah Sawargi	Tidak	3
Harapan Indah	Tidak	3
Jumlah (Skor Aktual)		37

Sumber: Hasil Survey, 2022



Gambar 2. Contoh Informasi Jaringan Sistem IPAL (di Kelurahan Melong) pada Arc Gis

Berdasarkan hasil observasi dan sebaran kuesioner, diketahui dari total 14 SPALD-T komunal yang telah disurvei, sebanyak 9 tidak mengalami penyumbatan pada jaringannya, artinya sistem tersebut terpelihara secara baik. Namun, tercatat terdapat 5 SPALD-T komunal yang terkadang mengalami penyumbatan yaitu KPP Makmur, Balumbang Kulon, Citaman Sehat, Wisma Sabar, dan Flamboyan. Berdasarkan hasil survey terdapat penyebab penyumbatan adanya benda seperti padatan lain (sampah), rambut bahkan batu. Hasil survey menunjukkan bahwa penyumbatan terjadi karena kesadaran pengguna yang kurang baik serta asesoris seperti *floor drain* ataupun bak control yang tidak ada atau tidak berfungsi. Skor aktual yang diperoleh adalah 37 dari total skor ideal sebesar 42. Maka diperoleh % skor aktual sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{37}{42} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 88,09 \%$$

Dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian jaringan sistem IPAL berdasarkan hasil survey 2022 sebesar 88,09%.

d. IPAL

Pada penelitian ini kinerja IPAL dilihat melalui kondisi inlet serta outlet sistem. Hasil wawancara dan observasi terkait kondisi IPAL Sanimas dapat dilihat di Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Survey Kondisi IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

NAMA KPP	kondisi inlet	kondisi efluen yang teramati	Skor
Makmur	Berbuih	Berwarna tidak berbau	1
Balumbang Kulon	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Balumbang Wetan	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Citaman Sehat	Bersampah	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	2
Wisma Sabar	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Kadang kadang berbau	1
Poncol Jaya	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Mitra Sejati	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Bartem 1	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Flamboyan	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Marmul	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Sambara 2	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Sambara 1	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Berkah Sawargi	Bersih (tidak bersampah,	Bersih (tidak berwarna, tidak	3

NAMA KPP	kondisi inlet	kondisi efluen yang teramati	Skor
	tidak berminyak, tidak berbuih)	berbau)	
Harapan Indah	Bersih (tidak bersampah, tidak berminyak, tidak berbuih)	Bersih (tidak berwarna, tidak berbau)	3
Jumlah (Skor Aktual)			37

Sumber: Hasil Survey, 2022

Tabel 5 menunjukkan 12 SPALD-T komunal memiliki kondisi efluen IPAL yang baik (bersih, tidak berwarna, dan tidak berbau). Hal tersebut menandakan adanya proses pengolahan yang baik di IPAL karena ada perbaikan kualitas secara fisik pada air terolah. Namun demikian terdapat 2 sistem IPAL yang terdata masih memiliki kondisi efluen yang berwarna (Makmur) dan kadang berbau (Wisma Sabar). IPAL Makmur memiliki efluen berwarna, kemungkinan dikarenakan efisiensi pengolahan sistem kurang baik. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kondisi inlet di IPAL Makmur yang berminyak dan berbuih. Penyebab masuknya minyak dikarenakan pembuangan sisa aktifitas memasak dari dapur tanpa adanya grease trap pada sistem yang ada. Sementara pada IPAL Wisma Sabar terkadang kondisi efluen berbau, dengan penyebab yang sama. Bau tersebut dapat berupa ammonia dan pada kondisi kurangnya oksigen dapat menyebabkan terjadinya kondisi anoxic dalam reaktor, sehingga menyebabkan bau yang menyengat (Said dkk., 2018). Operasional sistem aerob yang mahal menyebabkan di lokasi ini suplai oksigen diberikan secara *intermiten*. Skor aktual yang didapat adalah 37, sementara skor idealnya adalah 42. Terkait persentase skor aktual dihitung sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{37}{42} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 88,09 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tingkat kesesuaian sistem IPAL berdasarkan kondisi inlet dan efluen yang baik adalah sebesar 86,9%.

e. Pemeliharaan IPAL

Kegiatan pemeliharaan sistem perlu dilakukan secara rutin dan optimal agar SPALD-T komunal beroperasi secara berkelanjutan. Hasil observasi dan wawancara terkait pemeliharaan IPAL dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Survey Kondisi Pemeliharaan IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

NAMA KPP	Jumlah tenaga kerja	Pemelihara Fasilitas Saimas	Score
Makmur	1 orang	KPP	2
Balumbang Kulon	44 orang	KPP	2
Balumbang Wetan	10 orang	KPP	2
Citaman Sehat	3 orang	KPP	2
Wisma Sabar	10 orang	KPP dan penerima manfaat	3
Poncol Jaya	6 orang	KPP	2
Mitra Sejati	10 orang	KPP, Tarka, dan penerima manfaat	3
		KPP, Tarka, dan penerima manfaat	3
Bartem 1	10 orang	KPP dan penerima manfaat	3
Flamboyon	5 orang	KPP	2
Marmul	6 orang	KPP	2
Sambara 2	8 orang	KPP	2
Sambara 1	8 orang	KPP	2
Berkah Sawargi	6 orang	KPP, masyarakat, dan penerima manfaat	3
		KPP dan penerima manfaat	3
Harapan Indah	3 orang	KPP dan penerima manfaat	3
Jumlah (Skor Aktual)			34

Sumber: Hasil Survey, 2022

Tabel 6 menginformasikan bahwa sebagian besar (delapan) SPALD-T komunal memiliki IPAL terpelihara secara rutin, dan pemeliharaan dilakukan oleh KPP. Sementara pada enam sistem lainnya, masyarakat juga ikut andil peduli bersama-sama dengan KPP memelihara secara rutin.

Skor aktual yang diperoleh adalah 34 dari skor ideal sebesar 42. Sementara % skor aktual dapat dihitung sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{34}{42} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 80,95 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tingkat kesesuaian pemeliharaan sistem IPAL Sanimas di Kota Cimahi tahun 2022 dari hasil survey adalah 80,95%.

f. Kondisi Keuangan KPP SPALD-T Komunal

Keuangan yang baik tentunya akan menjamin keberlanjutan pengelolaan sistem komunal. Kondisi keuangan KPP SPALD-T Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Survey Kondisi Keuangan KPP IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

NAMA KPP	Kondisi keuangan bulanan KPP saat ini	Skor
Makmur	Surplus	3
Balumbang Kulon	Balance	2
Balumbang Wetan	Balance	2
Citaman Sehat	Balance	2
Wisma Sabar	Minus	1
Poncol Jaya	Balance	2
Mitra Sejati	Minus	1
Bartem 1	Minus	1
Flamboyan	Surplus	3
Marmul	Balance	2
Sambara 2	Minus	1
Sambara 1	Minus	1
Berkah Sawargi	Balance	2
Harapan Indah	Balance	2
Jumlah (Skor Aktual)		25

Sumber: Hasil Survey, 2022

Terdapat 2 KPP memiliki kondisi keuangan surplus, yakni Makmur dan Flamboyan. Kondisi tersebut sangat baik, karena keuangan yang masuk lebih tinggi daripada keuangan yang keluar. Tercatat 7 sistem dengan kondisi keuangan *balance*. Sementara untuk sistem Wisma Sabar, Mitra Sejati, Bartem 1, Sambara 2, dan Sambara 1 memiliki kondisi keuangan minus. Kondisi minus dapat dikatakan tidak baik, karena keuangan yang masuk lebih kecil

dibandingkan pengeluarannya. Kondisi keuangan yang tidak baik akan berpengaruh terhadap pemeliharaan dan menurunnya kondisi serta kinerja sistem IPAL. Sumber pendapatan KPP berasal dari iuran rutin dari masyarakat pengguna. Setiap sambungan rumah dikenai iuran berkisar Rp 5.000-10.000. Skor aktual yang diperoleh adalah 25 dari skor ideal sebesar 42. Sementara % skor aktual dapat dihitung sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

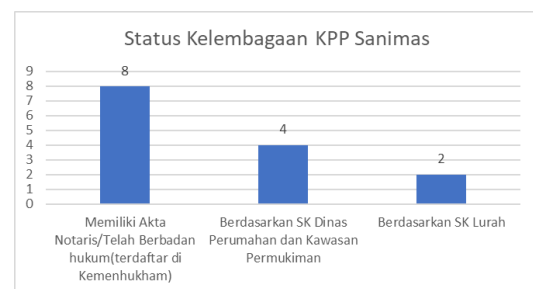
$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{25}{42} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 59,52 \%$$

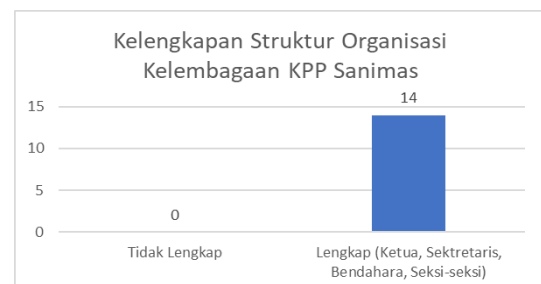
Tingkat kesesuaian keuangan KPP untuk pemeliharaan sistem berdasarkan hasil survey adalah sebesar 59,52%.

g. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi aspek yang dapat menentukan keberlanjutan SPALD-T komunal (Lubis dkk., 2022). **Gambar 3-7** terdata kondisi kelembagaan yang mengelola IPAL Sanimas di Kota Cimahi tahun 2022. Parameter kelembagaan memiliki sub-parameter pada parameter sebagaimana disebutkan pada bagian metodologi. Tingkat kesesuaian kelembagaan KPP untuk pengelolaan sistem IPAL berdasarkan hasil survey adalah 87,62%.



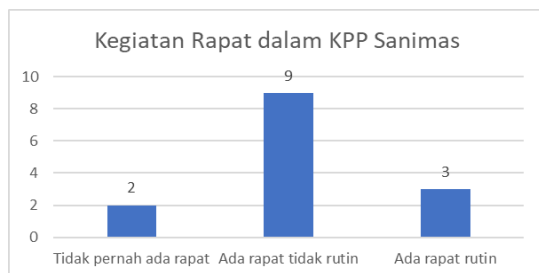
Gambar 3. Status Kelembagaan KPP Sanimas



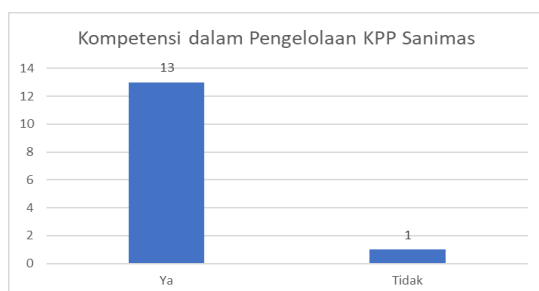
Gambar 4. Kelengkapan Struktur Organisasi Kelembagaan KPP Sanimas



Gambar 5. Jumlah Pengurus Aktif KPP Sanimas



Gambar 6. Kegiatan Rapat dalam KPP Sanimas



Gambar 7. Kompetensi dalam Pengelolaan KPP Sanimas

Khusus bagian kelembagaan, penilaian dilakukan secara akumulatif dari berbagai aspek terkait kelembagaan itu sendiri di setiap KPPnya. Berdasarkan data dalam Gambar 3-7, diketahui walaupun Sebagian besar memiliki struktur yang baik, namun hanya 3 KPP yang mengadakan rapat rutin. Didapatkan hasil akumulasi skor aktual yang diperoleh sebesar 184, dan skor ideal 210, maka didapatkan % score aktualnya sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = \frac{184}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Akhir} = 87,62 \%$$

h. Rekapitulasi Hasil Survey Evaluasi Sistem IPAL Kota Cimahi 2022

Melalui data - data di atas, dapat dilihat hasil rekapitulasi dari *scoring* pengelolaan IPAL Sanimas Kota Cimahi Tahun 2022 pada **Tabel 8.**

Tabel 8. Rekapitulasi Persentase Hasil Skoring Kondisi Pengelolaan IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

Hasil Survey Pengelolaan IPAL Sanimas	Score Akhir
Sistem Berjalan	100,00%
Sambungan Rumah	71,43%
Jaringan	88,09%
IPAL	88,09%
Pemeliharaan IPAL	80,95%
Keuangan	59,52%
Kelembagaan	87,62%
Rata-rata	82,24%

Parameter dengan nilai di bawah 80% adalah parameter SR (71.43%) dan keuangan (59,52%), sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Kondisi ini menggambarkan sulitnya penambahan jumlah SR pada sistem terbangun serta sulitnya mendapatkan keuntungan pada pengelolaan SPALD-T komunal. Masalah di Kota Cimahi tampaknya serupa dengan SPALD-T komunal lainnya di berbagai wilayah lainnya (Lubis dkk., 2022). Peringkat kondisi SPALD-T komunal dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 9. Ranking Hasil Skoring Kondisi Pengelolaan IPAL Sanimas Kota Cimahi 2022

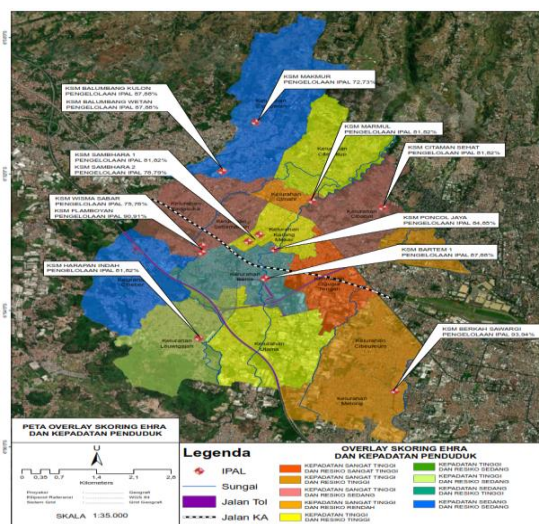
NAMA KPP	Total Score	Prosentase (%)
Berkah Sawargi	31	93,94
Flamboyan	30	90,91
Balumbang Kulon	29	87,88
Balumbang Wetan	29	87,88
Mitra Sejati	29	87,88
Bartem 1	29	87,88
Poncol Jaya	28	84,85
Harapan Indah	28	81,82
Citaman Sehat	27	81,82
Marmul	27	81,82
Sambara 1	27	81,82
Sambara 2	26	78,79
Wisma Sabar	25	75,76
Makmur	24	72,73

Tabel 9 di atas menginformasikan skor rata-rata SPALD-T komunal di Kota Cimahi yang terbangun di Tahun 2021 sebesar **82,24%**,

sehingga tingkat kesesuaian pengelolaan IPAL Sanimas di Kota Cimahi termasuk kategori baik. SPALD-T komunal dengan nilai di atas 90 adalah KPP Berkah Sawargi dan KPP Flamboyan. Tingginya nilai di dua KPP ini karena alasan yang berbeda, pada IPAL Berkah sawargi kondisi keuangan ballance, namun aspek lainnya di IPAL ini mendapatkan skor maksimal, sementara di KPP Flamboyan, kelemahan terdapat dari seringnya penyumbatan yang terjadi, namun dari sisi keuangan mengalami surplus.

Mayoritas SPALD-T komunal memiliki range antara 81,82%-87,88%. SPALD-T komunal yang memiliki nilai dibawah 80 adalah Sambara 2, Wisma Sabar dan Makmur. Rendahnya skor di KPP tersebut disebabkan alasan yang berbeda. Walaupun KPP Makmur secara keuangan surplus, namun memiliki kelemahan dari sisi teknis (pengolahan dan jaringan), sedangkan dua KPP lainnya dengan skor terendah memiliki kelemahan dari sisi keuangan yang minus dan di KPP wisma sabar juga memiliki kendala teknis.

Penggabungan peta kepadatan penduduk dengan peta indeks risiko sanitasi (gambar 8) menjadi langkah yang perlu dilakukan agar dapat memberikan informasi strategis dalam menentukan atau merencanakan penempatan sarana dan prasarana air buangan.



Gambar 8. Peta Overlay Skoring EHRA dan Kepadatan Penduduk

Selain itu kita juga melihat titik lokasi sebaran IPAL domestik Kota Cimahi Tahun 2022 dengan 14 IPAL di 8 kelurahan. Gambar 8 menunjukkan beberapa lokasi seperti Kelurahan Cigugur tengah dengan kepadatan penduduk dan risiko sanitasi yang tinggi tidak mendapatkan jatah pembangunan IPAL komunal, kondisi ini karena sulitnya mendapatkan lahan untuk IPAL di lokasi tersebut.

KESIMPULAN

Sistem pengelolaan air limbah domestik secara komunal yang dibangun di Kota Cimahi sepanjang tahun 2021 memiliki kinerja yang cukup baik (82,24%) dari sisi keberfungsian sistem, jumlah SR, kondisi jaringan, kondisi pengelolaan IPAL, kondisi keuangan, pemeliharaan IPAL dan aspek kelembagaan. Beberapa sistem memiliki kinerja dibawah rata-rata dengan penyebab yang beraneka ragam diantaranya terkait aspek keuangan, aspek teknis yang meliputi effluent IPAL yang masih berbau dan jaringan yang kadang-kadang tersumbat, serta aspek kelembagaan yang tidak diselenggarakan secara maksimal. Kondisi ini menjadi informasi penting bagi pengelola air limbah domestik kota (DPKP Kota Cimahi), untuk menyiapkan strategi perbaikan dan pengembangan dari aspek-aspek teknis, keberfungsian, dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan dan iuran. Sementara KPP terus dibina oleh DPKP dan diberi ruang untuk memperbaiki aspek kelembagaan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat memperbaiki aspek keuangan. Disarankan perbaikan aspek teknis dilakukan dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi sehingga effluent yang dihasilkan tidak berbau dan memenuhi baku mutu. Kerjasama unsur pemerintah-KPP-Masyarakat-Perguruan tinggi tersebut akan memastikan SPALD-T yang dibangun di Kota Cimahi akan secara berlanjut menjalankan fungsinya sehingga kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sistem komunal yang dibangun sepanjang tahun 2021 tidak ada satupun yang dibangun di wilayah prioritas dengan kepadatan dan risiko sanitasi yang tinggi. Ketersediaan lahan menjadi masalah pembangunan sistem di wilayah Kota Cimahi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar - besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu, yakni utamanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dan KPP IPAL Sanimas.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, F. A., & Sururi, M. R. (2021). Strategi sistem pengelolaan air limbah domestik di kecamatan ujungberung, cibiru, panyileukan, dan cileunyi. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 7(1).
- Adhyaksa, T., Lutfi, M., & Alimuddin, A. (2019). Pengembangan Jaringan Perpipaan IPAL Komunal Kelurahan Sindangrasa Kota Bogor. *Prosiding Semnastek*.
- Bahar, E., & Zaman, B. (2017). *Sustainability study of domestic communal wastewater treatment plant in Surabaya City*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- BPS Kota Cimahi. (2022). *Kota Cimahi Dalam Angka 2022*. Cimahi: Jawa Barat
- DPKP Kota Cimahi. (2021). Review rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kota Cimahi. Cimahi: Jawa Barat
- Dirgawati, M., Sururi, M. R., Wiliana, W., & Widiawati, N. (2021). Evaluation of regional domestic waste water treatment plant performance in Cimahi city. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 18(1), p. 141-152.
- DLH Jabar. (2022). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*. Bandung: Jawa Barat.
- Dirjen Ciptakarya. (2021). *Prosedur Operasional Standar (POS) Program Kotaku Perencanaan dan Pelaksanaan Infrastruktur Skala Kawasan*. Jakarta: Indonesia
- Liberda, R., Apriani, I., & Utomo, K. P. (2021). Studi Benchmarking Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Program SANIMAS IDB di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), p. 465-478.
- Lubis, L., Wahyudi, A., & Arieffiani, D. (2022). Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Ipal Komunal. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(1), p. 9-23.
- PUPR. (2022). *Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jendral Cipta Karya*. Jakarta:Indonesia.
- PUPR. (2017). *Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik*. Jakarta:Indonesia.
- Said, N. I. dan Syabani, M.R. (2018). Penghilangan Amoniak di dalam Air Limbah Domestik dengan Proses Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), *Jurnal Air Indonesia (Indonesia Water Journal)*, 7 (1), p. 58.
- Siddik, S. S., & Sururi, M. R. (2021). Strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di wilayah pelayanan ipal regional lagadar. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 13(2), p. 104-119.
- Sururi, M. R., Ainun, S., & Abdillah, F. (2017). Wastewater Collection Performance on Communal Sanitation System in Cimahi Indonesia. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 9(1), p. 60-69.
- Sururi, M. R., Dirgawati, M., Roosmini, D., & Notodarmodjo, S. (2021). Characterization of Fluorescent Dissolved Organic Matter in an Affected Pollution Raw Water Source using an Excitation-Emission Matrix and PARAFAC. *Environment and Natural Resources Journal*, 19(6), p. 459-467.

UN - Habitat. (2004). The challenge of slums: global report on human settlements 2003. *Management of*

Environmental Quality: An International Journal, 15(3), p. 337-338

KONTRIBUSI KOMPONEN DESTINASI WISATA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

THE CONTRIBUTION OF TOURISM DESTINATION COMPONENTS IN SUPPORTING VILLAGE DEVELOPMENT IN PANGANDARAN DISTRICT

Latifah Nurrahmah Juhara¹ dan Agam Marsoyo²

¹Bappeda Kabupaten Pangandaran, Pangandaran

²Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
latifahnuhara@gmail.com

ABSTRACT

Tourism sector development in the context of regional development shows changes that occur in the area around tourist destination. The impact of the tourism sector development on the smallest scale can be felt by the community around the tourist destination. At the lowest government structure there is village government that can be affected. The development of the tourism sector is inseparable from the components of tourist destinations. Tourist destination component consist of attraction, accessibility, amenity, and ancillary services. This study was conducted on fifteen tourist destinations in Pangandaran Regency, West Java Province. The purpose of this study was to identify the components of tourist destinations and its contribution to village development. The research method used in this study is a mixed method. Quantitative methods are carried out using descriptive statistical analysis, that is multidimensional scaling analysis (MDS) to identify components of tourist destinations and qualitative analysis is carried out using content analysis on data obtained from interviews with key informants. The key informants interviewed were village heads and stakeholders who have authority in the tourism sector. The research data used were primary data and secondary data, with primary data obtained from interviews and observations and also secondary data that was documents from institutions related to the tourism sector. The results of this study show the grouping of tourist destinations based on the components of attractions, accessibility, amenities, and ancillary services. There were tourist destinations that have an adequate tourism component and vice versa. It can be concluded that the components of tourist destinations make a positive contribution to village development, one of which is through community involvement in the management of tourist destinations. Even so, this research found several tourist destinations that did not contribute to the development of the village area.

Keywords: tourism, regional development, village development, Pangandaran

ABSTRAK

Pengembangan sektor pariwisata dalam konteks pembangunan wilayah menunjukkan perubahan yang terjadi di wilayah sekitar destinasi wisata. Dampak pengembangan sektor pariwisata pada skala terkecil dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata atau dalam struktur pemerintahan paling rendah adalah pemerintah desa. Perkembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari komponen destinasi wisata, yakni daya tarik, aksesibilitas, amenitas, serta pengelolaan dan pelayanan destinasi wisata. Penelitian dilakukan pada lima belas destinasi wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi komponen destinasi wisata dan kontribusinya terhadap pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode campuran. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif yakni analisis *multidimensional scaling* (MDS) untuk mengidentifikasi komponen destinasi wisata dan analisis kualitatif dilakukan menggunakan analisis konten terhadap data hasil wawancara dengan narasumber kunci yakni kepala desa dan stakeholder yang memiliki wewenang dalam bidang pariwisata untuk mengetahui kontribusi destinasi wisata terhadap pembangunan desa. Data penelitian yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder berupa data dan dokumen dari lembaga yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelompokan destinasi wisata berdasarkan komponen atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta pengelolaan dan pelayanannya. Terdapat destinasi wisata yang memiliki komponen pariwisata yang memadai begitupula sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa komponen destinasi wisata memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, salah satunya melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Meskipun demikian, dalam penelitian ini ditemukan beberapa destinasi wisata yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah desa.

Kata kunci: pariwisata, pembangunan wilayah, pembangunan desa, Pangandaran.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah sebagaimana dikemukakan oleh Mahi (2016) dapat menimbulkan efek spill over yang dapat mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya atau bisa disebut *spread effect*. Terdapat berbagai sektor yang dapat menyebarkan efek dari adanya pembangunan, diantaranya sektor industri, pariwisata, jasa, dan sebagainya. Sebagaimana teori *spread effect* dijelaskan, bahwa suatu sektor dapat memberikan efek menyebar sehingga wilayah di sekitarnya dapat merasakan dampak dari adanya pembangunan. Dewasa ini sektor pariwisata menjadi salah satu primadona dalam mendorong pembangunan wilayah. Efek ikutan yang dapat muncul akibat adanya aktivitas pariwisata dinilai cukup signifikan. Dalam berbagai kasus, sektor pariwisata memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan wilayah (Gun & Var, 2002).

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Barat merupakan lokasi penelitian ini. Kabupaten Pangandaran telah menasbihkan diri sebagai kabupaten pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. Pada tataran nasional dan provinsi, Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran ditunjukkan dengan adanya peningkatan kunjungan wisata yang signifikan setiap tahunnya. Potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran pun tidak terbatas pada wisata pantai yang saat ini sudah dikenal, terdapat berbagai jenis wisata lain seperti wisata budaya, dan wisata edukasi.

Keterkaitan sektor pariwisata dengan pembangunan wilayah dapat dilihat salah satunya melalui komponen destinasi wisata yang melibatkan berbagai aspek. Menurut Cooper (2016) terdapat empat komponen utama pariwisata yakni *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *ancillary service* yang lebih dikenal dengan istilah 4A. *Attraction* atau daya tarik merupakan asal muasal munculnya aktivitas pariwisata. Daya

tarik wisata dapat berupa sumberdaya alam, buatan, budaya, maupun pendidikan. *Accessibility* atau aksesibilitas merupakan komponen yang menggambarkan kemudahan sebuah destinasi wisata untuk diakses oleh pengunjung, baik itu dari aspek sarana maupun prasarana. *Amenity* atau kenyamanan merupakan komponen yang menggambarkan perlunya sarana dan prasarana penunjang aktivitas pariwisata, seperti akomodasi, restoran, toilet, ketersediaan sinyal seluler, dan sebagainya. Komponen terakhir yakni *ancillary service* yang berarti aspek layanan dan pengelolaan menunjukkan perlunya pengelolaan yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata. Sebagaimana teori komponen destinasi wisata yang dikemukakan oleh Cooper (2016) bahwa sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik apabila keempat komponen tersebut dapat menunjukkan perkembangan yang positif.

Melihat keempat komponen destinasi wisata yang cukup komprehensif dapat diketahui bahwa sektor pariwisata berkaitan dengan berbagai aspek. Beragam aspek yang terlibat dalam sektor pariwisata jelas memiliki pelaku yang beragam pula, baik itu pemerintah, masyarakat, hingga swasta. Hal ini mengindikasikan terdapat berbagai aktor yang mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dalam konteks pembangunan wilayah menunjukkan perubahan yang terjadi di wilayah sekitar destinasi wisata. Dampak pengembangan sektor pariwisata pada skala terkecil dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata atau dalam struktur pemerintahan terendah adalah pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang paling dekat dengan masyarakat, terlebih dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk membangun wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam beberapa referensi diantaranya yang dikemukakan oleh Eddyono (2021) bahwa inti dari keberlanjutan pariwisata terletak pada pengelolaannya. Pengelolaan destinasi wisata merupakan hal yang sangat kompleks mulai dari aspek fisik, sosial-budaya, hingga stakeholder, sehingga komponen destinasi wisata dapat memenuhi kebutuhan industri ini. Eddyono (2021) juga menyebutkan bahwa

dalam berbagai literatur parameter keberhasilan adanya destinasi wisata seringkali diukur dari adanya perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kondisi ekonomi wilayah di sekitarnya. UNWTO (2019) atau *United Nation of World Tourism Organization* sebagai lembaga yang bergerak di bidang pariwisata secara internasional memaparkan beberapa indikator keberhasilan pengelolaan destinasi wisata, diantaranya adanya kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, tidak menimbulkan kerusakan secara lingkungan dan sosial, mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata, dan peningkatan jumlah wisatawan. Kotler and Keller (2016) dalam teori manajemen pemasaran menjelaskan bahwa terdapat beberapa parameter keberhasilan dari sebuah pemasaran, hal ini dapat diadaptasi dalam industri pariwisata, salah satunya adalah kesediaan untuk datang kembali dan merekomendasikan destinasi wisata melalui berbagai media.

Teori-teori yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya menyebutkan bahwa keberhasilan pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah, namun di sisi lain Brankov (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam beberapa kasus terdapat pengembangan destinasi wisata yang tidak memberikan dampak positif terhadap wilayah di sekitarnya, begitu juga Yoeti (2008) mengemukakan bahwa pengembangan destinasi wisata justru bisa saja hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu.

Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi komponen destinasi wisata serta kontribusinya terhadap pembangunan desa di Kabupaten Pangandaran.

Penelitian terdahulu dengan topik serupa yang ditemukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Shantika (2018) yang menyatakan bahwa pariwisata di Pulau Nusa Lembongan memberikan dampak positif paling besar yakni terhadap pendapatan masyarakat, namun dampak pemerataan dinilai masih sangat rendah karena belum ada kebijakan pembagian hasil antara pengelola dengan masyarakat yangimbang. Hasil penelitian serupa diungkapkan oleh Makwa (2019) pada penelitiannya di Lombok Timur, bahwa meningkatnya jumlah wisatawan

mampu meningkatkan perputaran arus uang yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Yusuf (2020) melakukan penelitian dengan melihat dampak pariwisata terhadap perubahan lahan, dampak yang dihasilkan terdapat dampak positif pada aspek ekonomi dan negatif pada aspek lingkungan. Penelitian oleh Kronenberg (2021) dengan judul *The socio-economic impact of regional tourism: an occupation-based modelling perspective from Sweden* menemukan bahwa pariwisata menimbulkan dampak ketimpangan pada pariwisata yang tidak dikelola secara optimal. Hanunnindya and Marsoyo (2022) melakukan penelitian dengan judul *Tingkat Kepentingan Dan Kinerja Destinasi Wisata Taman Tebing Breksi Berdasarkan Persepsi Wisatawan* menunjukkan hasil bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi antara penawaran dan permintaan pada sektor pariwisata sehingga dampak yang muncul tidak maksimal. Berdasarkan penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai kontribusi destinasi wisata terhadap pengembangan wilayah, khususnya pada wilayah desa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran secara praktis terkait arah pengembangan sektor pariwisata sehingga dapat mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan komponen destinasi wisata pada setiap destinasi wisata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap keilmuan terutama dalam perencanaan wilayah terkait dengan kontribusi destinasi wisata terhadap pembangunan wilayah khususnya wilayah desa sebagai wilayah yang paling dekat dengan masyarakat, serta penerapan metode yang dapat direplikasi di lokasi lainnya.

METODE

Metode penelitian didefinisikan sebagai cara peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan yakni metode analisis statistik deskriptif, artinya analisis dilakukan tidak untuk menjelaskan

populasi melalui sampel, hanya pada lokasi dan kasus terpilih (Priyastama, 2017). Analisis statistik dilakukan terhadap data-data yang dikumpulkan terkait dengan komponen pariwisata. Sedangkan metode analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis konten terhadap hasil wawancara untuk memahami isi dan makna dari komunikasi yang terjadi dalam proses wawancara. Data yang dianalisis dalam analisis konten yakni data terkait kontribusi komponen pariwisata terhadap pembangunan desa.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 15 destinasi wisata dan 17 desa yang dipengaruhi oleh adanya destinasi wisata tersebut. Pemilihan 15 destinasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman jenis destinasi wisata, pengelola destinasi, serta keberagaman jumlah kunjungan. Arah pengembangan destinasi wisata pada dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah juga menjadi pertimbangan pemilihan lokasi penelitian. Destinasi wisata dan desa yang menjadi lokasi penelitian ini yakni Pantai Pangandaran yang meliputi desa Pangandaran, Pananjung, dan Wonoharjo. Museum Nyamuk yang berada di desa Babakan, Citumang Body Rafting yang berada di desa Bojong, Santirah River Tubing yang berada di desa Selasari. Desa Budaya Cikalong yang berada di desa Cikalong, Ciwayang Body Rafting yang berada di desa Cimindi, Curug Jebulan yang berada di desa Cigugur, Bukit Panenjoan yang berada di desa Kersaratu, Terasering Sukamulya yang berada di desa Sukamulya. Pantai Batukaras yang berada di desa Batukaras, Pantai Madasari yang berada di desa Masawah, Pantai Karapyak yang berada di desa Bagolo, Pantai Karangnini yang berada di desa Emplak, Curug Bojong yang berada di desa Sukahurip, dan Green Canyon Body Rafting yang berada di desa Kertayasa.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan desa berdasarkan status indeks desa membangun (IDM) dari tahun 2016 hingga tahun 2022. IDM 2016 digunakan karena tahun 2016 merupakan tahun awal pengukuran IDM. Indeks desa membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari berbagai dimensi sehingga dapat digunakan sebagai gambaran tingkat pembangunan pada setiap desa. Berikut tabel desa lokasi penelitian berdasarkan status IDM pada tahun 2016 sampai tahun 2022.

Tabel 1. Status Indeks Desa Membangun

Desa	Status Desa	
	2016	2022
Pangandaran	Mandiri	Mandiri
Wonoharjo	Maju	Mandiri
Pananjung	Mandiri	Mandiri
Batukaras	Maju	Mandiri
Bagolo	Berkembang	Maju
Kertayasa	Berkembang	Maju
Masawah	Maju	Mandiri
Bojong	Berkembang	Maju
Emplak	Berkembang	Maju
Cimindi	Berkembang	Mandiri
Selasari	Berkembang	Mandiri
Cikalong	Berkembang	Maju
Cigugur	Berkembang	Berkembang
Kersaratu	Sangat Tertinggal	Maju
Sukahurip	Berkembang	Mandiri
Babakan	Maju	Mandiri
Sukamulya	Tertinggal	Berkembang

Sumber: Hasil Identifikasi Penulis, 2022

Selain itu pemilihan lokasi penelitian juga dilihat berdasarkan jenis daya tarik yang berbeda-beda. Terdapat destinasi wisata dengan daya tarik berupa bentang alam pesisir, sungai, perdesaan, budaya, dan edukasi. Jenis daya tarik destinasi wisata pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jenis Daya Tarik Destinasi Wisata

Destinasi Wisata	Jenis Daya Tarik Wisata
Pantai Pangandaran	Wisata Pantai
Pantai Batukaras	Wisata Pantai
Pantai Karapyak	Wisata Pantai
Green Canyon Bodyrafting	Wisata Sungai
Pantai Madasari	Wisata Pantai
Citumang Bodyrafting	Wisata Sungai
Pantai Karangnini	Wisata Pantai
Ciwayang Bodyrafting	Wisata Sungai
Santirah Bodyrafting	Wisata Sungai
Desa Budaya Cikalong	Wisata Budaya
Curug Jebulan	Wisata Sungai
Bukit Panenjoan	Wisata Perbukitan
Curug Bojong	Wisata Sungai
Museum Nyamuk	Wisata Edukasi
Terasering Sukamulya	Wisata Perdesaan dan Budaya

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2022

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari lembaga terkait diantaranya data sektoral pariwisata seperti jumlah wisatawan dan fasilitas

penunjang pariwisata yang didapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Observasi dilakukan melalui survey secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi destinasi wisata serta melakukan pengukuran lapangan. Observasi lapangan dilakukan dengan menggunakan instrument berupa daftar periksa dan tabel isian. Data yang dikumpulkan melalui observasi diantaranya kondisi destinasi wisata, kondisi jalan akses, lebar jalan akses, dan jumlah serta jarak menuju sarana pendukung pariwisata. Data primer yang dikumpulkan dalam observasi lapangan yakni data mengenai kondisi jalan, akses menuju destinasi wisata, dan jarak destinasi wisata ke sarana pendukung.

Narasumber pada survey primer ditentukan dengan cara *purposive sampling* yakni dengan menentukan narasumber yang dinilai memiliki pemahaman terkait topik penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara semiterstruktur terkait dengan kontribusi adanya destinasi wisata terhadap pembangunan di desa. Terdapat 27 narasumber kunci dalam penelitian ini, tabel berikut ini menampilkan daftar narasumber dalam penelitian ini berdasarkan jabatannya masing-masing.

Tabel 3. Daftar Narasumber Penelitian

No	Narasumber
1	Sekretaris Bappeda
2	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Perangkat Desa Babakan
4	Sekretaris Desa Pangandaran
5	Kepala Desa Pananjung
6	Kepala Desa Selasari
7	Sekretaris Desa Bojong
8	Kepala Desa Sukahurip
9	Kepala Desa Wonoharjo
10	Sekretaris Desa Kersaratu
11	Tokoh Desa Cikalong
12	Kepala Desa Batukaras
13	Sekretaris Desa Cigugur
14	Kepala Desa Cimindi
15	Sekretaris Desa Kertayasa
16	Kepala Desa Sukamulya
17	Kepala Desa Masawah
18	Kepala Desa Bagolo
19	Kepala Desa Emplak

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Destinasi wisata dinilai berdasarkan komponen destinasi wisata 4A yakni *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *ancillary service*. Keempat komponen destinasi wisata kemudian menjadi variabel penelitian yang dijelaskan ke dalam 18 sub variabel penelitian. Variabel *Attraction* atau daya tarik terdiri atas sub variabel luas kawasan destinasi wisata dan variasi aktivitas wisata. Variabel *accessibility* atau aksesibilitas dijelaskan melalui sub variabel jarak destinasi wisata ke jalan kabupaten terdekat, jarak destinasi wisata menuju sarana transportasi umum, jumlah moda transportasi umum, serta lebar jalan akses menuju destinasi wisata. Variabel *amenity* atau amenitas terdiri atas sub variabel jumlah akomodasi dan restoran. Sedangkan variabel pengelolaan dan pelayanan dilihat berdasarkan ketersediaan pengelola destinasi wisata dan struktur lembaga pengelola. Keempat komponen pariwisata ini tidak dapat saling dipisahkan.

Data terkait variabel penelitian mencakup 15 destinasi wisata yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian pada analisis ini merupakan destinasi wisata yang selanjutnya diidentifikasi komponen destinasi wisata 4A sesuai dengan sub variabel penelitian. Seluruh variabel selanjutnya dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 24 dengan analisis *multidimensional scaling* (MDS). Analisis ini digunakan karena dinilai sesuai untuk menggambarkan posisi destinasi wisata berdasarkan komponen destinasi wisata. Analisis *multidimensional scaling* merupakan analisis statistik yang menghasilkan pemetaan ulang posisi relatif antar objek penelitian. Jenis analisis MDS yang digunakan dalam penelitian ini yakni MDS metrik. MDS metrik merupakan analisis yang menggunakan data berupa data interval/rasio kemudian dihitung jarak antar objeknya sehingga dapat menghasilkan konfigurasi posisi atau urutan objek penelitian berdasarkan kesamaan karakteristiknya.

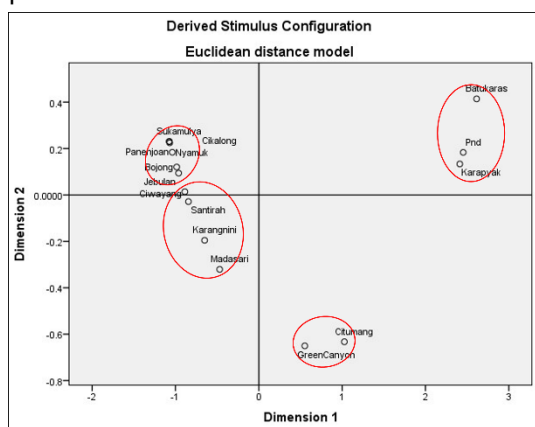
Hasil analisis ini menghasilkan titik-titik yang merupakan gambaran destinasi wisata sebagai objek penelitian berurutan sesuai kemiripan karakteristiknya. Dengan demikian hasil analisis ini dapat menunjukkan ranking destinasi wisata berdasarkan atribut data masukan yang merupakan gambaran komponen destinasi wisata 4A. Model yang dihasilkan dari hasil analisis ini berupa

diagram yang ditampilkan dalam satu dimensi.

Model yang dihasilkan pada analisis ini dinilai baik apabila nilai RSQ atau *R square* paling tidak 0,6 (Malhotra, 2005) dan nilai *stress* lebih kecil dari 10% (Kruskal, 1964). Berdasarkan hasil analisis, model pada penelitian ini memiliki nilai RSQ dan nilai *stress* yang memenuhi ketentuan, hal ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan dan analisis dapat dilanjutkan. Pembahasan hasil analisis disajikan dalam empat sub pembahasan berdasarkan komponen destinasi wisata. Masing-masing komponen dianalisis berdasarkan variabel penelitian untuk melihat kondisi setiap destinasi wisata pada setiap komponen. Dihasilkan diagram yang menunjukkan kemiripan destinasi wisata berdasarkan karakteristik pada komponen yang dibahas. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan destinasi wisata, serta dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan perencanaan wilayah dan kota khususnya pengembangan kepariwisataan.

A. Atraksi

Kondisi destinasi wisata berdasarkan komponen atraksi atau daya tarik pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada gambar 1. Pantai Batukaras, Pantai Pangandaran, dan Pantai Karapayak memiliki karakteristik yang mirip sehingga berada pada posisi yang berdekatan, ketiga destinasi ini merupakan destinasi wisata pantai.



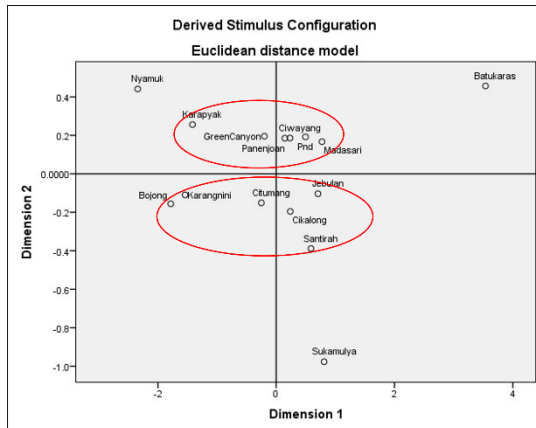
Gambar 1. Posisi Destinasi Wisata berdasarkan Komponen Atraksi.

Sumber: Hasil analisis, 2022

Destinasi wisata Citumang Bodyrafting dan Green Canyon Bodyrafting memiliki karakteristik yang mirip yakni berupa betang alam sungai dengan aktivitas bodyrafting. Destinasi wisata Ciwayang, Santirah, Karangnini, dan Pantai Madasari memiliki karakteristik yang serupa. Destinasi wisata lainnya yakni Terasering Sukamulya, Desa Budaya Cikalong, Bukit Panenjoan, Museum Nyamuk, Curug Bojong, dan Jebulan memiliki karakteristik daya tarik yang mirip, yakni dilihat dari jumlah aktivitas yang dilakukan sangat terbatas, dan luas kawasannya.

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas destinasi wisata berdasarkan hasil analisis dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 2. Destinasi wisata terbagi atas empat kelompok berdasarkan kedekatannya dalam diagram. Pantai Pangandaran, Pantai Madasari, Pantai Karapayak, Green Canyon Bodyrafting, Ciwayang Bodyrafting, dan Bukit Panenjoan memiliki aksesibilitas yang relatif serupa. Sedangkan Pantai Batukaras, Museum Nyamuk, dan Terasering Sukamulya memiliki aksesibilitas yang cenderung berbeda dengan destinasi wisata lainnya. Karakteristik destinasi wisata berdasarkan aksesibilitas ini ditentukan oleh beberapa variabel diantaranya posisi destinasi wisata terhadap jalan kabupaten, lebar jalan kabupaten, dan jarak tempuh ke sarana angkutan umum. Tidak hanya jarak yang menjadi pertimbangan, namun kondisi akses juga menjadi variabel yang menentukan kondisi aksesibilitas. Selain daya tarik, aksesibilitas menjadi komponen utama yang dapat meningkatkan motivasi wisatawan untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata (Delamartha, 2021). Gambar 2 berikut ini menunjukkan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran berdasarkan aksesibilitasnya.



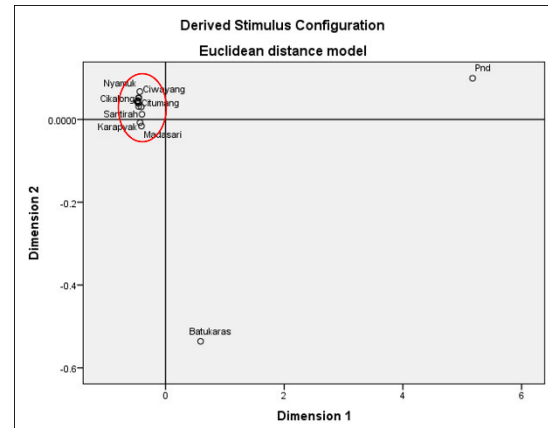
Gambar 2. Posisi Destinasi Wisata berdasarkan Komponen Aksesibilitas.

Sumber: Hasil analisis, 2022

C. Amenitas

Amenitas atau fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan di kawasan wisata terdiri atas akomodasi dan fasilitas rumah makan. Amenitas destinasi wisata berdasarkan karakteristiknya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama. Terdapat satu kelompok destinasi wisata yang terdiri atas tiga belas destinasi wisata, sedangkan destinasi wisata Pantai Pangandaran dan Pantai Batukaras berada pada kelompok yang berbeda.

Secara umum amenities pariwisata di Kabupaten Pangandaran berkumpul pada destinasi wisata saja, yakni pada destinasi wisata Pantai Pangandaran dan Pantai Batukaras. Sebagian besar hotel dan penginapan berada di Pantai Pangandaran, begitu juga dengan fasilitas rumah makan. Sehingga destinasi wisata lainnya menggunakan fasilitas amenities yang ada pada destinasi wisata Pangandaran dan Batukaras. Gambar 3 dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran memiliki karakteristik amenities yang serupa. Amenitas ini merupakan komponen yang dapat menentukan kenyamanan wisatawan dalam melakukan aktivitas pariwisata pada destinasi wisata tertentu.



Gambar 3. Posisi Destinasi Wisata berdasarkan Komponen Amenitas.

Sumber: Hasil analisis, 2022

D. Pengelolaan dan Pelayanan

Pengelolaan dan pelayanan pada sektor pariwisata merupakan hal yang sangat penting. Eddyono (2021) menyebutkan bahwa pengelolaan destinasi wisata yang baik dapat meningkatkan kualitas komponen destinasi wisata lainnya. Berdasarkan hasil analisis, destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran pada penelitian ini terbagi kedalam tiga kelompok, yakni kelompok yang terdiri atas destinasi wisata Pantai Pangandaran, Pantai Batukaras, Pantai Karapyak, Green Canyon Bodyrafting, Citumang Bodyrafting, Pantai Karangnini, dan Museum Nyamuk. Kelompok berikutnya terdiri atas destinasi wisata Ciwayang Bodyrafting, Pantai Madasari, dan Santirah River Tubing. Kelompok destinasi wisata berikutnya berdasarkan pengelolaan dan pelayanannya terdiri atas destinasi wisata Jebulan, Curug Bojong, Terasering Sukamulya, Desa Budaya Cikalong, dan Bukit Panenjoan.

Ketiga kelompok destinasi wisata pada komponen pengelolaan dan pelayanan ini berdasarkan karakteristiknya terbagi atas kelompok dengan pengelola berupa masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan pengelola dengan lembaga yang lebih terorganisir yakni pemerintah daerah, dan swasta. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata lebih terlihat pada destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Selain menentukan kualitas pelayanan pada destinasi wisata, pengelolaan ini juga dapat menentukan arah perkembangan destinasi wisata.

4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata;
5. Peningkatan jumlah wisatawan; dan
6. Ketersediaan wisatawan untuk merekomendasikan destinasi wisata melalui berbagai media.

Untuk menjawab praduga bahwa semakin baik komponen destinasi wisata maka kontribusi terhadap pembangunan desa akan semakin besar selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil wawancara kepada narasumber kunci terkait kontribusi setiap destinasi wisata dalam pembangunan wilayah desa dimana destinasi wisata tersebut berada.

Destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah yakni destinasi wisata Pantai Pangandaran, Pantai Batukaras, Pantai Karapyak, dan Green Canyon Bodyrafting menunjukkan adanya kontribusi positif bagi pembangunan di desa. Destinasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dalam berdasarkan komponen destinasi wisata menunjukkan kondisi yang lebih baik dari destinasi wisata lainnya. Khususnya pada komponen aksesibilitas dan amenitas, destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten memiliki kelengkapan yang baik. Pantai Pangandaran salah satunya sebagai destinasi wisata dengan komponen destinasi wisata yang paling baik, hal ini sesuai dengan kondisi destinasi wisata pantai pangandaran yang menjadi destinasi dengan kunjungan wisatawan tertinggi di Kabupaten Pangandaran. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi gambaran bahwa destinasi wisata Pantai Pangandaran memiliki komponen destinasi wisata yang baik.

Kontribusi destinasi wisata Pantai Pangandaran, dikemukakan oleh narasumber Sekretaris Desa Pangandaran, bahwa:

“Kalau untuk desa Pangandaran dampak pariwisata ini sangat positif sekali”

Dampak positif bagi desa Pangandaran dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk aspek sosial, dan ekonomi. Perubahan masyarakat nelayan menjadi masyarakat pariwisata menjadi nilai positif tersendiri bagi desa Pangandaran. Hal ini juga dirasakan oleh desa Wonoharjo, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Wonoharjo:

“Di kita juga banyak masyarakat yang terlibat langsung di pariwisata termasuk para pedagang, pemilik perahu wisata, bahkan pemandu juga tidak sedikit, di wonoharjo juga sudah ada penginapan-penginapan”

Adanya destinasi wisata Pantai Pangandaran juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADES), meskipun destinasi wisata Pantai Pangandaran dikelola oleh pemerintah daerah, namun pemerintah desa mendapatkan bagi hasil dari retribusi tiket objek wisata yang cukup besar.

Dana bagi hasil tersebut kemudian menjadi bagian dari APBDES yang dapat digunakan untuk pembangunan di desa, baik itu pembangunan infrastruktur fisik, maupun sosial budaya, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Kertayasa, desa lokasi destinasi wisata Green Canyon Bodyrafting:

“Jadi masyarakat desa Kertayasa secara umum juga secara tidak langsung merasakan manfaatnya dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari bagi hasil pariwisata”

Hal ini juga berlaku bagi desa-desa lain yang memiliki destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, selain masyarakat desa dapat turut dalam aktivitas pariwisata, pemerintah desa Pananjung dan Wonoharjo juga mendapatkan dana bagi hasil yang menjadi pemasukan bagi APBDES. Dampak positif adanya aktivitas pariwisata Pantai Pangandaran, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pariwisata, namun juga masyarakat lainnya melalui adanya pembangunan yang bersumber dari dana bagi hasil pariwisata. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Batukaras:

“desa juga dapat dana bagi hasil yang lumayan besar dan masuk ke APBDes bisa digunakan untuk pembangunan di desa”

Desa-desa dengan destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah desa melalui BUMDES mendapatkan kontribusi destinasi wisata yang cukup baik terhadap pembangunan desa. Salah satunya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Cimindi, desa yang menjadi lokasi destinasi wisata Ciwayang Bodyrafting:

“kami juga mengapresiasi dengan adanya anak-anak pengangguran jadi punya penghasilan juga bagi pemerintah desa merupakan suatu kebanggaan, ada masyarakat pedagang bisa punya penghasilan ada kontribusi masuk ke PADes itu semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya”

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Cimindi senada dengan narasumber kunci dari desa Selasari yang menjadi lokasi destinasi wisata Santirah Bodyrafting, kepala desa Masawah yang menjadi lokasi destinasi wisata Pantai Madasari. Ketiga desa ini menyampaikan bahwa adanya destinasi wisata yang terus berkembang ini memberikan dampak yang sangat positif bagi pemerintah desa dalam mendorong pembangunan di desa.

Selanjutnya destinasi wisata Citumang Bodyrafting, dan Pantai Karangnini yang dikelola oleh Perum Perhutani. Kontribusi destinasi wisata Pantai Karangnini tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa meskipun memiliki komponen destinasi wisata yang baik. Sebagaimana pernyataan dari pemerintah desa Emplak melalui Kepala Desa Emplak bahwa destinasi wisata Pantai Karangnini tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat desa maupun pemerintah desa.

“Tidak ada sih kalau pengaruh secara umum ke desa Emplak. Sebetulnya kalau perhutani melibatkan desa kan bisa bekerjasama, tapi sampai sekarang juga tidak ada apa-apa.”

Pengelolaan Pantai Karangnini dilakukan oleh Perum Perhutani, dan tidak melibatkan desa dalam pengelolaannya, hanya beberapa masyarakat yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan. Meskipun Pantai Karangnini memiliki komponen destinasi wisata yang baik, namun lokasi yang berada di dalam kawasan milik perhutani membatasi keterlibatan masyarakat dan desa dalam pengelolaan destinasi wisata. Berbeda halnya dengan destinasi wisata Citumang Bodyrafting, meskipun pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani, masyarakat desa melalui pemerintah desa membuat kesepakatan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bojong, yang menjadi lokasi destinasi wisata Citumang Bodyrafting:

“... ada kerjasama dengan perhutani, satu mengaktivitaskan para putra daerah menjadi pemandu, yang kedua ikut serta dalam kebersihan dan pengamanan di wilayah destinasi wisata”

Dengan demikian, meskipun pengelolaan destinasi wisata tidak dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat dapat turut berkontribusi dan merasakan manfaat adanya destinasi wisata. Destinasi wisata lainnya yang dikelola oleh pihak lain adalah Museum Nyamuk dan Curug Jebulan. Kontribusi Museum Nyamuk terhadap pembangunan desa pun dapat dinilai sangat rendah, hal ini berkaitan dengan kawasan museum nyamuk yang cenderung kecil, dan aktor yang terlibat dalam pengelolaannya hanya Kementerian Kesehatan. Kepentingan museum nyamuk sebagai destinasi wisata hanya sebatas pada wisata edukasi. Kondisi ini serupa dengan destinasi wisata Jebulan yang dikelola oleh individu, sehingga masyarakat tidak dapat turut berpartisipasi dan aktivitas wisata di Jebulan tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Destinasi wisata Jebulan memiliki komponen destinasi wisata yang tidak sebaik destinasi wisata lainnya.

Destinasi wisata Bukit Panenjoan dapat dinilai sebagai destinasi wisata potensial, hal ini dilihat dari komponen destinasi wisata yang belum begitu optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kunci yakni Sekretaris Desa Kersaratu, lokasi destinasi wisata Bukit Panenjoan, destinasi ini dikelola oleh masyarakat melalui Karangtaruna. Kondisi destinasi ini pada saat penelitian dilakukan berada pada kondisi yang tidak terawat. Disampaikan oleh Sekretaris Desa Kersaratu, bahwa:

“awalnya memang dikelola oleh karangtaruna cuma ya gitulah belum berjalan baik, belum dibina dengan baik, karena kadang-kadang karangtaruna sudah berjalan baik, anggotanya menikah ke orang luar, atau ada kesibukan lain, akhirnya ditinggalkan, jadi tidak stabil pengelolaannya.”

Kondisi serupa dengan destinasi wisata Bukit Panenjoan juga terjadi pada destinasi wisata Curug Bojong. Curug Bojong merupakan destinasi wisata yang berada di desa Sukahurip yang dikelola oleh Kompepar atau Kelompok Penggerak Pariwisata. Namun pengelolaan yang dilakukan belum optimal hal ini terjadi karena ketidaksiapan kompepar

dalam mengelola destinasi wisata, sehingga hingga saat ini keberadaan destinasi wisata Curug Bojong belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sukahurip:

“Curug bojong sampai hari ini belum bisa menghasilkan uang. Untuk pengelolaannya saja tidak ada, apalagi ke desa. Kendalanya yang pertama tentu anggaran, yang kedua sumber daya manusia yang sampai hari ini belum menunjukkan keseriusan dan kekreatifan yang harus dibina, itu saja sebetulnya kendalanya.”

Destinasi wisata budaya Cikalong berbeda dengan seluruh destinasi yang sebelumnya dibahas, desa budaya Cikalong merupakan desa budaya yang didasari dengan kebiasaan dan adat masyarakat desa. Pengunjung tidak begitu ramai setiap saat, namun setiap tahun terdapat festival yang disebut Festival Nampaling yang menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga pemerintah desa Cikalong dan masyarakat desa Cikalong, dengan ada atau tidak adanya aktivitas wisata, kegiatan adat istiadat akan terus berlangsung.

Destinasi wisata Terasering Sukamulya merupakan destinasi wisata yang baru terekspose dua tahun lalu tepatnya pada tahun 2019, dengan daya tarik berupa hamparan terasering sawah lebih dari 1200 hektar. Destinasi ini masih sangat sederhana dan dikelola secara swadaya, sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan desa Sukamulya dan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sukamulya:

“Kalau pengaruh belum ada lah sebut saja, karena segalanya ini masih swadaya dan swakelola, dari desa juga bukan tidak mau turut serta tapi ada prioritas lain.”

Keberhasilan destinasi wisata selain dari kontribusinya terhadap pembangunan desa, juga dapat dilihat dari kesediaan wisatawan untuk merekomendasikan destinasi wisata melalui berbagai media sebagaimana dikemukakan oleh Kotler (2012). Dapat diketahui dari jumlah pencarian kata kunci destinasi wisata pada sosial media, semakin banyak wisatawan menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata maka dapat meningkatkan popularitas destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan baru. Salah satu media sosial yang saat ini memiliki

pengguna aktif bulanan terbanyak adalah instagram. Pantai Pangandaran menjadi destinasi wisata dengan jumlah gambar dan tagar terbanyak yang dibagikan. Tidak hanya Pantai Pangandaran, destinasi wisata lainnya pun memiliki jumlah pencarian yang berbeda-beda. Jumlah ini menunjukkan popularitas dari destinasi wisata.

Terdapat beberapa poin temuan dalam penelitian ini, yakni pengelolaan destinasi wisata sangat mempengaruhi kontribusi destinasi wisata terhadap pembangunan desa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa melalui BUMDES memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah desa. Sedangkan destinasi wisata yang dikelola oleh pihak lain dapat memberikan kontribusi baik apabila dilakukan melalui skema kerjasama, sehingga setiap pihak mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas pariwisata. Pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat dapat berjalan baik apabila pengelolaannya berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, bahwa pengembangan destinasi wisata dapat mendorong pembangunan desa. Meskipun demikian, dalam penelitian ini ditemukan beberapa destinasi wisata yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah desa, yakni destinasi wisata Pantai Karangnini dan destinasi wisata Jebulan. Destinasi wisata Pantai Karangnini dikelola oleh pihak ketiga yakni Perum Perhutani, namun tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu lingkup kawasan destinasi wisata Pantai Karangnini yang berada di tengah kawasan hutan tidak memberikan dampak secara ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Hal serupa terjadi pada destinasi wisata Jebulan, destinasi wisata ini berupa air terjun/curug dan aliran sungai dengan bentang alam karst yang dikelola oleh individu tanpa melibatkan masyarakat dan pemerintah desa sehingga tidak memberikan kontribusi pada pembangunan. Sedangkan destinasi wisata lainnya, yakni Pantai Pangandaran, Museum Nyamuk, Citumang Body Rafting, Santirah River Tubing, Desa Budaya Cikalong, Ciwayang Body Rafting, Bukit Panenjoan, Terasering Sukamulya, Pantai Batukaras,

Pantai Madasari, Pantai Karapyak, Curug Bojong, dan Green Canyon Body Rafting mengindikasikan adanya kontribusi positif terhadap pembangunan wilayah desa. Kontribusi yang diberikan dapat berupa pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata maupun melalui adanya bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Komponen destinasi wisata 4A perlu untuk ditingkatkan, namun tidak hanya komponen fisik saja, perlu diperhatikan pula peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata, terutama pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kontribusi yang lebih baik dari destinasi yang dikelola oleh pihak lainnya. Destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDES memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi besar bagi pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat memiliki potensi yang sangat besar, dengan sumberdaya finansial terbatas namun dapat mengembangkan destinasi wisata dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, keluarga, Bappeda Kabupaten Pangandaran, dan dosen pembimbing saya yang telah mendukung proses penulisan hingga selesainya penelitian ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta CR Journal Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menulis penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Brankov, J. (2019). Residents' Perceptions Of Tourism Impact On Community In National Parks In Serbia. *Sciend*, 11, 124-142.

Cooper, C. (2016). *Essential of Tourism Second Edition*. Harlow: Pearson.

Delamartha, A. H. (2021). Kesiapan Aksesibilitas Wisata dalam Mengintegrasikan Obyek Wisata (Studi Kasus : Karanganyar Bagian Timur). *Plano Buana*, 1(2), 78-91.

Eddyono, F. (2021). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Gun, C. A., & Var, T. (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. New York: Taylor & Francis.

Hanunnindya, R. P., & Marsoyo, A. (2022). Tingkat Kepentingan Dan Kinerja Destinasi Wisata Taman Tebing Breksi Berdasarkan Persepsi Wisatawan. *Cakra Wisata*, 22(23-34).

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management*. London: Pearson Education.

Kronenberg, K., & Fuchs, M. (2021). The socio-economic impact of regional tourism: an occupation-based modelling perspective from Sweden. *Journal of Sustainable Tourism*, 30, 1-21.

Kruskal, J. B. (1964). Nonmetric multidimensional scaling: A numerical method. *Psychometrika*, 29(2), 115-129. doi:10.1007/BF02289694

Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Kencana.

Makwa, H. (2019). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal di Desa Tanjung Luar Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*, 5(2), 108-125.

Malhotra, N. K. (2005). Riset pemasaran pendekatan terapan. *Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia*.

Pemerintah-Kabupaten-Pangandaran. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026*. Pangandaran.

Pemerintah-RI. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*. Jakarta.

Pemerintah-RI. (2016). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa*. Jakarta.

Priyastama, R. (2017). *Buku sakti kuasai SPSS*. Bantul: Star up.

- Shantika, B., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pulau Nusa Lembongan. *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*, 6(1), 177-183.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UNWTO. (2019). *Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs)*. Madrid.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yusuf, I., & Hadi, T. S. (2020). Studi Literatur : Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Lahan. *Pondasi*, 25(2), 157-183.

DAMPAK SOSIAL PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

SOCIAL IMPACT OF THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF WEST JAVA INTERNATIONAL AIRPORT AND KERTAJATI AEROCITY ON SOCIAL LIFE OF COMMUNITIES

Harun Din Haq dan Heru Purboyo Hidayat Putro

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung, Gedung Labtek IX.A Sugijanto Soegijoko, Lantai II, Jalan Ganesha Nomor 10, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132
harundinhaq@gmail.com

ABSTRACT

Massive infrastructure development is currently giving rise to many mega-projects that have sprung up in Indonesia. Even though airports in several studies have stated that they can increase economic activity, in practice they often ignore the social aspects of the community in their participation in planning, implementing, and supervising existing megaprojects. The objectives of this study is determine the social impact of the planning and development of West Java International Airport and Kertajati Aerocity. The data collection method was carried out through secondary data collection in planning documents owned by the West Java Provincial Government and the Majalengka Regency Government and interviews with several stakeholders related to BIJB. The analytical method used in this study is the analytical method used in the Yiftachel and Mandelbaum (2017) article using social impact assessment. Based on the results of the analysis carried out by the researchers, it can be seen that some components in the social impact analysis have shown quite good results, but some components still show deficiencies which reflects that the planning of BIJB and Kertajati Aerocity still does not meet the rules of an equitable city due to several factors. Based on social impact analysis using the theoretical perspective of Yiftachel and Mandelbaum (2017) the importance of social impact analysis on a large project that greatly impacts the lives of the surrounding community is no less important than environmental impact analysis.

Keywords: Social Impact, Social Impact Assessment, Infrastructure Impact, Development Impact, Social Life

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur secara masif saat ini menimbulkan banyak megaprojek-megaprojek yang bermunculan di Indonesia. Walaupun bandara di beberapa studi telah disebutkan bahwa dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, namun pada praktiknya seringkali mengabaikan aspek sosial masyarakat dalam partisipasinya dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan terhadap megaprojek yang ada. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak sosial dari perencanaan dan pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity terhadap kehidupan sosial masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dalam dokumen-dokumen perencanaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Majalengka serta wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan BIJB. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis seperti yang digunakan pada artikel Yiftachel dan Mandelbaum (2017) dengan teori *social impact assessment*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa beberapa komponen dalam analisis dampak sosial sudah menunjukkan hasil yang cukup baik yang ditunjukkan dengan 8 potensi pada variabel lingkungan terbangun dan 2 potensi kesenjangan sosio-spasial namun untuk beberapa komponen masih menunjukkan kekurangan yang mencerminkan bahwa perencanaan BIJB dan Kertajati Aerocity masih belum memenuhi kaidah kota yang berkeadilan yang ditunjukkan dengan 8 poin kekurangan pada variabel lingkungan terbangun dan 2 poin kekurangan pada variabel kesenjangan sosio-spasial. Berdasarkan analisis dampak sosial menggunakan sudut pandang teori Yiftachel dan Mandelbaum (2017) pentingnya analisa dampak sosial terhadap suatu proyek yang besar yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar menjadi hal yang tak kalah penting dari analisa dampak lingkungan.

Kata kunci: Dampak Sosial, *Social Impact Assessment*, Dampak Infrastruktur, Dampak Pembangunan, Kehidupan Sosial

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur secara masif saat ini menimbulkan banyak megaprojek-megaprojek yang bermunculan di Indonesia. Tak terkecuali pada sektor transportasi karena pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada tingginya permintaan akan moda transportasi yang cepat efektif dan efisien. Atmadjati (2014) mengungkapkan bahwa Indonesia bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik bakal menikmati *booming* penumpang udara yang begitu dahsyat. Petinggi airbus memprediksi industri penerbangan di Asia Pasifik dalam kurun 20 tahun ke depan tumbuh lebih dari 200%, sebuah pencapaian hebat, mengingat dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan itu “hanya” mencapai 50%. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak sosial terhadap perilaku bepergian masyarakat.

Meningkatnya permintaan terhadap transportasi udara menimbulkan banyak dibangunnya bandara-bandara baru di Indonesia seperti dikutip dari cnbcindonesia.com (diakses pada 04 Desember 2019) bahwa PT. Angkasa Pura II telah mengalokasikan belanja modal senilai Rp.11 triliun pada 2019 dengan 5 proyek bandara megah yang saat ini sering diperbincangkan yaitu: (1) Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Majalengka; (2) Bandara Kediri; (3) Bandara NYIA di Kulonprogo, Yogyakarta; (4) Bandara Baru di Bali Utara; (5) Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta II. Maraknya pembanguna bandara juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di sekitar bandara.

Walaupun bandara di beberapa studi telah disebutkan bahwa dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, namun pada praktiknya seringkali mengabaikan aspek sosial masyarakat dalam partisipasinya dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan terhadap megaprojek yang ada. Selain itu pembangunan bandara seringkali mengkonversikan lahan pertanian mengingat lahan pertanian adalah lahan dengan tingkat kelerengan yang rendah (cenderung datar) sehingga sangat cocok untuk dibangun bandara dan fasilitas lainnya seperti *runway* yang membutuhkan tanah dengan kelerengan yang rendah. Alih fungsi lahan pertanian menjadi berbagai bentuk berdasarkan kebutuhan pembangunan pada saat ini tidak semata mata memunculkan permasalahan dari

bidang pangan akan tetapi berdampak kepada munculnya permasalahan sosial maupun ekonomi bagi mereka yang selama ini menjadikan pertanian sebagai *livelihood* atau mata pencaharian (Soebajja, 2014).

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dimana Lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi petani beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Dengan adanya perubahan fungsi lahan pertanian, maka petani akan merasakan dampaknya. Bila demikian maka apa yang terjadi terhadap petani di daerah Kertajati tersebut? Hal itu terjadi mengingat posisi dan fungsi tanah/lahan memiliki arti penting (Soebajja, 2014).

Dengan total luasan lahan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity mencapai sekitar 5.000 ha maka partisipasi masyarakat menjadi penting sebagai arahan kepada pemerintah untuk pengembangan di masa yang akan datang. Dengan skala proyek yang besar tersebut dan dampaknya terhadap Kecamatan Kertajati dan Kabupaten Majalengka karena transformasi dari kegiatan pedesaan menuju kegiatan metropolitan yang besar maka perlu dinilai seberapa besar dampak sosial dan partisipasi masyarakat Kecamatan Kertajati dalam pembangunan BIJB dan Kertajati Aerocity.

Zulfikar dan Rukayat (2017) meneliti Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka dengan hasil penelitian dampak sosial, ekonomi dan politis Dalam pembangunan BIJB Kertajati dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekpektasi yang terjadi di masyarakat setempat. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaan, dipengaruhi juga oleh sejauhmana strategi yang dilaksanakan serta sinergitas lembaga dan program yang masih rendah dalam menyikapi permasalahan pembebasan lahan yang semakin kompleks. Penelitian ini hanya berfokus ranah kebijakan yang berimplikasi pada dampak sosial, ekonomi dan politis.

Santoso, Nurwati, dan Apsari (2019) meneliti pergeseran mata pencaharian masyarakat di wilayah pembangunan bandara internasional jawa barat (BIJB) membuah hasil bahwa Pembangunan BIJB faktanya telah menggusur banyak pemukiman milik warga dan juga menggusur sebagian besar lahan pertanian produktif warga masyarakat, sehingga berdampak pada terjadinya perubahan sosial dan juga perubahan ekonomi pada masyarakat setempat yang notabene sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani (di sektor agraris). Terdapat berbagai bentuk pergeseran mata pencaharian dan pilihan pekerjaan baru yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menyikapi hal tersebut, salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertajati adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri pada sektor informal, karena dipandang sesuai dengan kapasitas mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bekerja. Penelitian ini berfokus pada dampak sosial dari segi mata pencaharian penduduk.

Rinandar (2019) meneliti dampak pembangunan bandara internasional jawa barat (BIJB) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat menghasilkan perkembangan pembangunan BIJB dan respon masyarakat masih dengan tanggapan yang baik dan menunggu pengembangan BIJB menuju masyarakat yang sejahtera, Masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak sebagian merespon dengan positif dan sebagian lain merespon dengan negatif. Masyarakat yang merespon dengan positif ditunjukan dengan membangun pemukiman baru dan melakukan perubahan pekerjaan menjadi lebih baik dari petani menjadi pekerja di PT. BIJB, sedangkan yang merespon dengan negatif ditunjukan dengan keluhan kesah masyarakat karena hilangnya mata pencaharian yang tadinya petani menjadi tidak bekerja; Perubahan sosial masyarakat dilihat dari penguasaan tanahnya, tanah yang dikuasai oleh diri sendiri 60% dan 40% dikuasai orang lain. Dilihat dari mata pencahariannya yang tadinya petani berubah menjadi wiraswasta, pedagang, peternak dan lain-lain, Perubahan ekonomi masyarakat dilihat dari pendapatan masyarakat, dengan adanya pembangunan BIJB pendapatan masyarakat bertambah, terutama bagi petani mampu melakukan strategi penghidupan dengan mencari tambahan di luar sektor pertanian. Dilihat dari perkembangan pasar tanah, harga tanah di sekitar BIJB cukup stabil

dan terbilang sangat murah, namun setelah pembangunan BIJB harga semakin cepat perkembangannya sehingga harga bervariasi, ditunjukan dengan estimasi harga tanah di sebelah Barat BIJB lebih mahal dari sebelah Utara. Penelitian ini lebih berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi akibat perubahan harga tanah di kawasan sekitar BIJB.

Hermanto (2021) meneliti dampak pembangunan Bandara Internasional Kertajati dalam kajian *green political theory* menyimpulkan dalam pembangunan Bandara Internasional Kertajati, negara dalam memberikan kesempatan kepada warga neraga secara kolektif untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik baik bersifat ekosentrisme maupun antroposentrisme (eko-demokrasi). Jangan sampai pembangunan Bandara Internasional Kertajati menimbulkan bencana alam, perubahan iklim, polusi udara, dan kehancuran lingkungan. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati tidak boleh bersifat ekosentrisme saja, dimana lingkungan alam dimanfaatkan secara maksimal hingga mengakibatkan krisis. Penelitian ini lebih berfokus kepada dampak lingkungan serta sosial dan ekonomi secara umum dari segi *green political theory*.

Haq dan Putro (2021) meneliti dampak Bandara Internasional Jawa Barat terhadap wilayah sekitarnya menghasilkan dampak BIJB terhadap wilayah sekitarnya memberikan 3 dampak sosial dan ekonomi yang positif, memberikan 6 dampak sosial negatif namun hanya memberikan 1 dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini berfokus pada pembangunan berkelanjutan yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan konsep *just city* dan SIA menurut Yiftachel dan Mandelbaum (2017) menggunakan variabel lingkungan terbangun dan kesenjangan sosio-spasial. Sehingga perlu diteliti sejauh mana dampak sosial akibat adanya pembangunan BIJB dan wilayah sekitarnya guna mengetahui apakah BIJB dan wilayah sekitarnya memberikan dampak positif atau negatif dan seberapa jauh BIJB dan wilayah sekitarnya memberikan kesejahteraan kepada penduduk lokal khususnya di Kecamatan Kertajati dan umumnya di Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian yaitu mengetahui dampak sosial dari perencanaan dan pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* terhadap kehidupan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang dimuat dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dampak sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kertajati sebagai dampak yang ditimbulkan oleh Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

TINJAUAN PUSTAKA

Bandar udara secara teknis/fisik adalah suatu jalur tanah yang rata dan diperkeras, yang digunakan oleh pesawat udara melakukan lepas landas dan pendaratan, biasanya dilengkapi dengan menara pengawas, hanggar, serta terminal penumpang dan terminal kargo (*The Hertitage Illustrated Dictionary of the English Language* dalam Adisasmita, 2013).

Secara operasional, bandar udara didefinisikan sebagai tempat yang melayani pesawat udara yang melakukan lepas landas (*take-off*) dan pendaratan (*landing*), menaikkan dan menurunkan penumpang, memuat dan membongkar barang (kargo) udara, serta merupakan alih moda transportasi secara, antar dan intra (Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Tataran Kebandarudaraan Nasional dalam Adisasmita, 2013).

Secara fungsional bandara udara diartikan sebagai prasarana transportasi udara terdiri dari fasilitas sisi udara (*airside*) dan sisi darat (*landside*) yang disediakan dan digunakan untuk melayani kegiatan penerbangan yang dilakukan melalui bandar udara (Adisasmita, 2013). Menurut Adisasmita (2013) salah satu fungsi utama bandara yaitu merupakan tempat perpindahan moda transportasi, atau alih antar moda transportasi, yaitu antara moda pesawat udara dengan transportasi jalan, atau sebaliknya antara moda transportasi jalan dengan moda pesawat udara, atau antar pesawat udara dengan pesawat udara dalam angkutan terusan (*transfer*). Setiap bandar udara harus mampu melayani kegiatan penerbangan pada setiap saat (tanpa pengecualian) dengan menjamin keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban.

merupakan penjelasan yang dimuat sepenuhnya merupakan penjelasan yang dimuat dari Yiftachel dan Mandelbaum (2017) terkait penilaih dampak sosial. Mari kita tarik memutar waktu singkat ke belakang untuk mengetahui paradigma dari SIA. Asal usul SIA (*Social Impact Assessment*) diperkirakan terjadi pada tahun 1960an karena terjadinya periode gejolak fenomena sosial di Eropa dan Amerika.

Ulasan terkait SIA juga mengidentifikasi beberapa kekurangan, terutama kurangnya relatifnya referensi yang eksplisit dan terbuka di sebagian besar prosedur SIA untuk budaya, identitas, gender, hubungan kekuasaan dan masalah hak asasi manusia dan sosial keadilan. Investigasi kami nanti dalam makalah ini bertujuan untuk berkontribusi pada masalah-masalah yang sedang dipelajari.

Walaupun demikian penggunaan dan penelitian SIA pada perencanaan wilayah dan kota masih bersifat sporadis (belum dominan). Para ahli berupaya memutuskan metode untuk menilai dampak pembangunan dimulai dari beberapa dekade lalu tetapi tanpa keserasian dan koordinasi antar ahli.

Terdapat beberapa dampak sosial positif dari adanya bandara yaitu harga tanah di wilayah sekitar menjadi tinggi. Tanah yang awalnya hanya lahan kosong, saat ini menjadi sesuatu hal yang memiliki harga jual tinggi. Penghasilan masyarakat bertambah sehingga tingkat pendidikan masyarakat pun semakin meningkat sehingga mereka menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat mendapatkan *training*, *workshop* dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka membangun SDM yang berkualitas dan mempersiapkan IKM dari Pemerintah Daerah (Nurkhodilah dan Pratiwi, 2020).



Gambar 1. Presiden Meninjau Proyek BIJB

Sumber: kbr.id diakses pada 16 Juni 2023

Dibalik dampak positif tentu juga bandara memiliki dampak sosial yang negatif diantaranya berdampak pada penambahan jumlah penduduk di sekitar kawasan bandara, banyak budaya baru yang masuk, terjadi penipuan, pencurian dan menjadi daerah rawan kriminalitas. Selain munculnya mafia tanah dan sengketa tanah. Kemudian beberapa dampak yang kemungkinan akan terjadi yaitu pengaruh budaya asing yang kurang baik akan mudah ditiru oleh generasi penerus, dan menjadi daerah pengguna narkoba (Nurkhodilah dan Pratiwi, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif kualitatif dengan menggunakan kerangka penelitian Yiftachel dan Mandelbaum (2017) namun hanya memakai 2 variabel yakni keadaan lingkungan terbangun dan kesenjangan spasial sosial-ekonomi. Sedangkan untuk variabel identitas dan keanekaragaman budaya dan demokrasi dalam perencanaan tidak digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara, penelaahan data-data sekunder dan observasi lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu juga digunakan sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

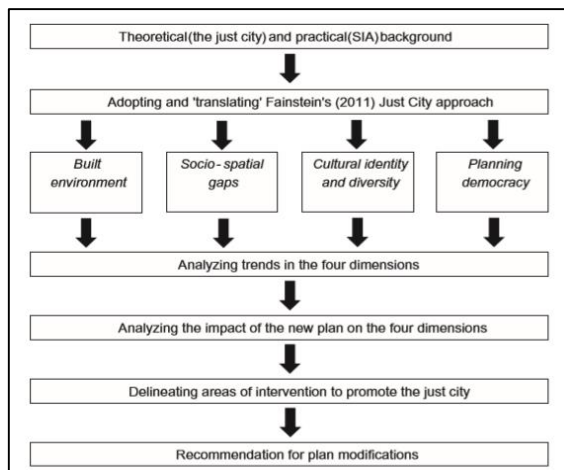
Instrumen penelitian menggunakan *in-depth* interview berdasarkan pertanyaan variabel variabel turunan terkait aspek-aspek SIA (*Social Impact Assessment*) yang ditujukan kepada informan penelitian dengan rekapitulasi tertulis terkait poin-poin penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Kamera dari *smartphone* juga digunakan untuk mendokumentasikan kondisi eksisting yang ada di lapangan berdasarkan kondisi terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dalam dokumen-dokumen perencanaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Majalengka. Untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria *stakeholders* yang berkaitan dengan

pembangunan BIJB yaitu beberapa informan penelitian dari OPD di Kabupaten Majalengka maupun Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui perkembangan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Kriteria pemilihan responden wawancara ditentukan berdasarkan keterkaitan pemangku kepentingan terhadap keterlibatannya dalam pembangunan BIJB seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan dan beberapa pihak terkait baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Majalengka khususnya para kepala bidang yang berkaitan langsung dengan BIJB. Kriteria pemilihan untuk beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan bandara seperti PT.BIJB dan PT.Angkasa Pura II juga dilakukan guna mengetahui gambaran secara langsung terkait BIJB di lapangan. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis seperti yang digunakan pada artikel Yiftachel dan Mandelbaum (2017) dengan teori *social impact assessment* sehingga variabel yang akan diteliti sesuai dengan artikel tersebut namun metode ini akan dipakai untuk menilai dampak sosial dalam studi kasus Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Hasil elaborasi teorinya melahirkan 4 variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini menurut Yiftachel dan Mandelbaum (2017) yaitu:

1. Keadaan lingkungan terbangun: menilai dan membandingkan kondisi fisik lingkungan kota sesuai dengan "Indeks Pemeliharaan-Pengabaian" yang telah dibuat. Selain itu, kami menganalisis pola spasial dari investasi kota yang tercermin dari anggaran kota.
2. Kesenjangan spasial sosial-ekonomi: menganalisis karakteristik populasi dan kesenjangan sosial-ekonomi antara lingkungan hunian.
3. Identitas dan keanekaragaman budaya: memetakan identitas komunitas dan sejauh mana perencanaan kota memenuhi kebutuhan mereka. Untuk variabel ini tidak akan dipakai dalam penelitian.
4. Demokrasi dalam perencanaan dan opini publik: menganalisis survei komprehensif terkait partisipasi publik dan sikap terhadap perencanaan kota secara umum, dan rencana kota baru pada khususnya. Untuk variabel ini tidak akan dipakai dalam penelitian.

Analisis dari data yang dikumpulkan dalam tiga dimensi ini mengarahkan peneliti untuk mengidentifikasi serangkaian masalah dan peluang dalam mempromosikan kota yang adil pada perencanaan BIJB dan Kertajati *Aerocity*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Metode Analisis

Sumber : Yiftachel dan Mandelbaum, 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan dijelaskan kondisi eksisting ketujuh elemen pengelolaan yang telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan eksisting yang ada di BIJB saat ini. Untuk memperoleh data ini peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan perwakilan dari pihak PT.Angkasa Pura II dan PT. BIJB selaku pengelola dan operator BIJB. Berikut merupakan gambar hasil observasi lapangan berkaitan dengan variabel penelitian yang ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Dokumentasi hasil observasi lapangan berdasarkan variabel penelitian

No	Variabel	Foto dan Deskripsi
1.	Ruang Publik Perkotaan	 Kondisi Pedestrian Jalan Kertajati-Jatituh

No	Variabel	Foto dan Deskripsi
		 Kondisi Pedestrian Jalan di depan Kantor Desa Kertawinangun
2.	Bangunan Publik	 Lantai 3 Terminal BIJB  Lantai 1 Terminal BIJB
3.	Infrastruktur dan Transportasi Publik	 Shuttle Bus di BIJB  Bus Damri di BIJB  Angkutan Pedesaan di Kecamatan Kertajati  Kendaraan Pribadi (motor) di jalan Kertajati-Jatituh

No	Variabel	Foto dan Deskripsi
4.	Ruang Terbuka Publik	
		Rencana RTH pedestrian milik PT.BIJB
		
		Rencana RTH publik berupa taman milik PT.BIJB
		
		Lapangan olahraga di Kecamatan Kertajati
		
		Ruang terbuka publik di depan Kantor Kecamatan Kertajati
5.	Kualitas Pemeliharaan Perumahan	
		Mesjid di Desa Pakubereum
		
		Mesjid di Desa Bantarjati

No	Variabel	Foto dan Deskripsi
		
		Jalan lingkungan di Desa Sukamulya
		
		Jalan lingkungan di Desa Mekarjaya
6.	Tingkat Integrasi Struktur Perkotaan	
		Puskesmas Sukamulya sebagai fasilitas kesehatan di Kecamatan Kertajati
		
		Salah satu SD sebagai fasilitas pendidikan di Kecamatan Kertajati
		
		Pasar di Kecamatan Jatitujuh sebagai fasilitas perdagangan

No	Variabel	Foto dan Deskripsi
		 Fasilitas perdagangan di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Indramayu

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019

A. Analisis Dampak Sosial

1. Analisis Lingkungan Terbangun

Perencanaan tata ruang publik adalah faktor kunci dalam distribusi sumber daya publik seperti alam, status, dan pemeliharaan lingkungan. Pada bagian ini berdasarkan Yiftachel dan Mandelbaum (2017) terdapat 6 parameter sebagai elemen kunci dari kualitas kehidupan perkotaan yaitu : (1) Ruang Publik Perkotaan – jalan dan alun-alun; (2) Bangunan Publik; (3) Infrastruktur dan Transportasi Publik (aksesibilitas dan frekuensi); (4) Ruang Terbuka Publik; (5) Kualitas Pemeliharaan Perumahan; (6) Tingkat integrasi struktur perkotaan.

a. Ruang Publik Perkotaan

Untuk ketersediaan ruang jalan maupun pedestrian di Kecamatan Kertajati belum terdapat jalur pedestrian khusus karena masih bercirikan kawasan pedesaan namun hal ini membahayakan bagi pengguna jalan khusus seperti penyandang disabilitas, anak-anak maupun orang tua karena sangat rentan disebabkan oleh ruang pedestrian yang minim.

Selain itu ketersediaan fasilitas pendukung ruang jalan masih minim. Penunjuk jalan ditunjukan hanya untuk kendaraan saja, untuk penunjuk jalan bagi pejalan kaki masih kurang dan fasilitas penerangan jalan masih terbatas sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk bepergian di malam hari dan mengurangi tingkat keamanan saat berjalan kaki.

b. Bangunan Publik

Tak hanya ruang terbuka hijau saja yang dijadikan ruang publik namun bangunan terminal bandara pun dijadikan ruang publik masyarakat Kertajati untuk sekedar berlibur dan bercengkrama karena lantai 1 dan lantai 3 gedung terminal dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai macam fasilitas yang memadai untuk bersantai dan berkumpul. Walaupun sebelum adanya bandara, yang dijadikan bangunan publik untuk masyarakat

berkegiatan hanyalah bangunan serbaguna di sekitar kantor desa maupun kantor kecamatan yang kerap kali terbatas dan hanya tersedia 1 bangunan di setiap desa maupun setiap kecamatan penyebarannya.

Oleh karena itu dengan kehadiran BIJB sebenarnya menambah bangunan publik yang ada di Kertajati sehingga menambah inklusifitas Kecamatan Kertajati dengan semakin bertambahnya ruang publik yang ada dan dapat diakses banyak kalangan karena bandara merupakan sebuah simpul kegiatan transportasi dimana semua orang datang dan pergi.

c. Infrastruktur dan Transportasi Publik

Infrastruktur dan transportasi publik yang tersedia di Kecamatan Kertajati belum banyak memadai dan hanya terkonsentrasi di dalam kawasan bandara yang merupakan simpul kegiatan transportasi. Namun hal ini berdampak positif karena terdapat banyak moda transportasi darat yang menuju Kecamatan Kertajati dari luar Kabupaten Majalengka.

Namun untuk transportasi dalam Kecamatan Kertajati masih sangat minim yakni hanya dilalui Angkot (Angkutan Perkotaan) dan Angdes (Angkutan Pedesaan) yang jam operasionalnya terbatas hanya sampai sore saja dengan armada yang tidak terlalu banyak. Hal ini membuat masyarakat Kertajati masih mengandalkan sepeda motor sebagai kendaraan pribadi untuk bepergian dalam kawasan Kecamatan Kertajati dan mengurangi inklusifitas dalam segi transportasi publik.

Selain itu ketersediaan halte maupun tempat pemberhentian transportasi publik sangatlah minim, tidak ada halte untuk angkot maupun angdes sehingga masyarakat harus menunggu di pinggir jalan untuk menaiki moda transportasi tersebut. Satu-satunya pemberhentian beberapa moda transportasi darat hanya ada dalam kawasan BIJB sehingga menyulitkan masyarakat Kertajati untuk mengakses transportasi umum dan membuat ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

d. Ruang Terbuka Publik

Secara umum berdasarkan pengamatan peneliti, ruang terbuka publik yang terdapat pada Kertajati *Aerocity* sudah cukup baik dengan penyediaan ruang kreatif dan teknologi untuk menunjang bisnis penerbangan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat kota

yang membutuhkan ruang publik yang aman dan nyaman seperti pada gambar poin ke 4 dalam tabel 1 di bagian sebelumnya.

Namun pada kenyataannya, ruang publik yang ada di kawasan rencana Kertajati Aerocity saat ini masih didominasi oleh alun-alun desa dan lapangan sepak bola sebagai saran masyarakat Kertajati untuk berkumpul dan berinteraksi dengan kondisi yang cukup memadai sebagai ruang publik Kecamatan Kertajati. Bahkan dengan adanya BIJB, Kantor Kecamatan Kertajati semakin baik dari segi estetika sehingga menarik masyarakat untuk berkegiatan dan berkumpul.

e. Kualitas Pemeliharaan Perumahan

Kualitas pemeliharaan kawasan perumahan di sekitar Kecamatan Kertajati terpelihara cukup baik karena masih dalam kawasan pedesaan yang asri dengan kualitas lingkungan yang baik. Gedung-gedung kantor pemerintahan desa juga masih baik dan beberapa direnovasi sebagai dampak CSR dari PT.BIJB sendiri.

Namun untuk beberapa jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan perumahan di Kertajati masih mengalami kekurangan karena kualitas jalan yang buruk dan sangat sulit dilalui oleh kendaraan bermotor karena banyaknya jalan berlubang dan perkerasan jalan yang kurang terawat sehingga menyulitkan aksesibilitas lingkungan bagi masyarakat.

f. Tingkat Integrasi Struktur Perkotaan

Tingkat integrasi struktur perkotaan yang ada Kecamatan Kertajati bisa disebut cukup minim karena walaupun dekat dengan Tol Cipali dan adanya BIJB, fasilitas penunjang untuk kawasan perumahan masih cukup minim. Seperti untuk fasilitas kesehatan hanya ada puskesmas dan menyulitkan masyarakat Kertajati untuk mendapat fasilitas kesehatan yang notabene dalam Kecamatan Kertajati terdapat bandara internasional.

Untuk fasilitas pendidikan dominasinya Sekolah Dasar yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kertajati. Sedangkan untuk SMP dan SMA/SMK hanya terletak di sekitar jalan kolektor primer Kertajati-Indramayu yang persebarannya kurang baik.

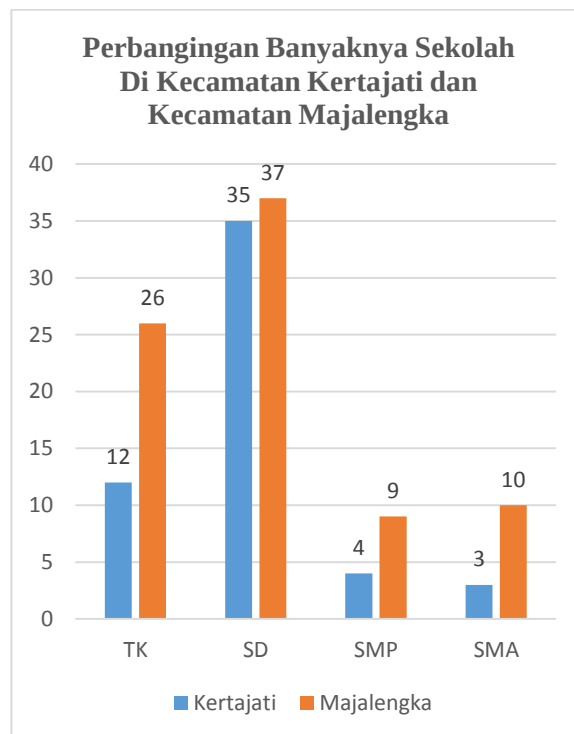
Fasilitas perdagangan dan jasa juga masih sangat minim di Kecamatan Kertajati. Untuk pasar saja masih terdapat di Kecamatan Jatitujuh yang berada di utara Kecamatan Kertajati dan untuk fasilitas komersil yang lebih lengkap terdapat di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Indramayu karena dekat dengan

Stasiun Jatibarang sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

B. Analisis Kesenjangan Sosio-Spasial

1. Pendidikan

Analisis pada bagian pendidikan dilakukan dengan membandingkan antara banyaknya sekolah yang ada di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka sebagai pusat Kabupaten Majalengka sebagai indikator tingkat pendidikan di 2 kecamatan tersebut.



Gambar 2. Perbandingan Banyaknya Sekolah di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka

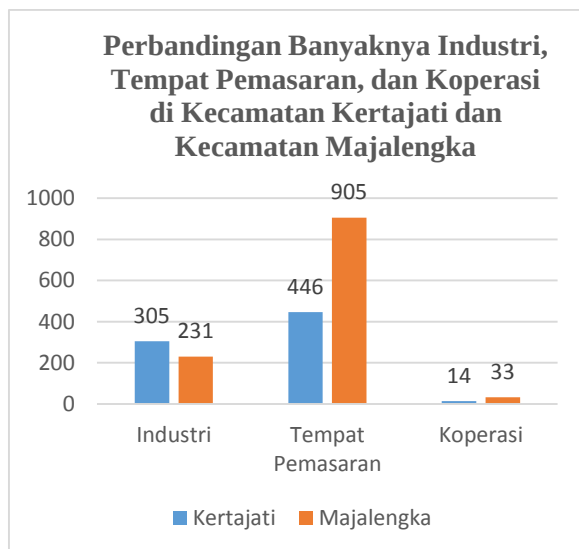
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2019

Untuk rasio perbandingan jumlah banyaknya sekolah antara Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka perbedaannya masih cukup jauh sehingga menimbulkan kesenjangan di bidang pendidikan yang sangat berbeda dimana seharusnya untuk kawasan yang akan bertransformasi ke bentuk perkotaan metropolitan dengan kegiatan bisnis dan industri sebaiknya akses masyarakat untuk pendidikan yang baik dan layak harus tersedia dengan baik.

2. Pendapatan

Untuk mengetahui komparasi pendapatan yang berimplikasi pada tersedianya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang ada di

dalamnya di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka dilakukan dengan membandingkan bidang ekonomi yaitu jumlah industri, tempat pemasaran dan koperasi di Kabupaten Majalengka untuk mengetahui potensi pendapatan dari ketiga sektor usaha ini. Semakin banyak sektor usaha yang ada maka akan berpotensi pada semakin besar pendapatan kecamatan tersebut.



Gambar 3. Perbandingan Banyaknya Industri, Tempat Pemasaran, dan Koperasi di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2019

Data menunjukkan bahwa dari segi kuantitas industri masih dimenangkan oleh Kecamatan Kertajati namun segi ketimpangannya dengan Kecamatan Majalengka masih cukup baik. Untuk tempat pemasaran masih terbilang ketimpangannya cukup jauh karena Kecamatan Majalengka memiliki 905 tempat pemasaran sedangkan Kecamatan Kertajati hanya 446. Jumlah koperasi juga masih memiliki ketimpangan yang signifikan yakni 14 koperasi di Kecamatan Kertajati dan 33 Koperasi di Kecamatan Majalengka. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan di Kecamatan Kertajati masih terpaut jauh dengan tingkat pendapatan di Kecamatan Majalengka yang idealnya kawasan yang akan dikembangkan menjadi metropolitan pendapatan daerahnya setidaknya harus sedikit mendekati dengan pendapatan ibukota Kabupaten.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan terbangun dapat diketahui bahwa kawasan ruang terbuka hijau di sekitar kecamatan kertajati masih bercirikan pedesaan yang

mudah untuk ditata, selain itu terdapat terminal bandara sebagai bangunan publik yang menjadi ruang publik untuk berekspresi. Selain itu infrastruktur transportasi yang mulai tumbuh memudahkan akses dari dan menuju Kecamatan Kertajati. Ruang terbuka publik juga telah direncanakan dengan baik di masa yang akan datang oleh PT.BIJB serta saat ini Kecamatan Kertajati terhubung dengan Tol Cipali sehingga mudah diakses dari Cirebon, Bandung, maupun kota-kota besar lain di Indonesia.

Kendati demikian masih terdapat beberapa kekurangan dari segi lingkungan terbangun yakni belum ada fasilitas pendukung pedestrian dan pendukung kaum difabel. Bangunan publik yang ada belum tersebar secara merata serta hanya terdapat moda transportasi angkot dan angdes dalam Kecamatan Kertajati. Selain itu saat ini RTH yang ada hanya berupa lapangan sepak bola dan alun-alun desa yang minim fasilitas. Dari segi konektivitas juga beberapa jalan lingkungan masih berkualitas buruk dengan aspal yang berlubang dan perkerasan yang buruk. Dari segi fasilitas, fasilitas pendidikan serta perdagangan dan jasa yang merupakan fasilitas utama yang dibutuhkan oleh kawasan berbasis bandara masih minim dan belum tersebar secara merata

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan sosio spasial diketahui rasio perbandingan sekolah SD di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka sudah menunjukkan rasio yang cukup baik. Kecamatan Majalengka menjadi tolak ukur karena merupakan ibukota Kabupaten Majalengka dimana fasilitas umum dan fasilitas sosialnya sudah cukup memadai. Selain itu banyak industri yang berkembang di Kecamatan Kertajati lebih banyak dari Kecamatan Majalengka.

Namun untuk rasio perbandingan sekolah TK, SMP dan SMA rasionya masih cukup jauh dengan Kecamatan Majalengka serta tempat pemasaran dan koperasi masih minim dibandingkan dengan Kecamatan Majalengka.

Berdasarkan pembahasan maka dapat diketahui potensi dampak sosial yang ada di BIJB dan wilayah sekitarnya untuk variabel yaitu:

1. Masih bercirikan kawasan pedesaan yang mudah untuk ditata untuk kawasan pedestrian.
2. Terdapat terminal bandara sebagai ruang publik masyarakat kertajati untuk berekreasi.

3. Infrastruktur dan transportasi publik terpusat pada kawasan bandara yang memudahkan Kecamatan Kertajati diakses dari luar.
4. PT.BIJB telah menyediakan rencana ruang terbuka publik yang baik untuk Kertajati *Aerocity*.
5. Pemeliharaan kawasan perumahan cukup baik setelah adanya BIJB karena bantuan dana CSR dari PT. BIJB untuk Kecamatan Kertajati.
6. Terhubung dengan Tol Cipali yang mendukung konektivitas dengan struktur ruang kota diluar Kecamatan Kertajati.

Sedangkan untuk variabel kesenjangan sosio-spasial potensi atau kelebihan adalah :

1. Rasio perbandingan sekolah SD antara Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka cukup baik.
2. Banyaknya industri di Kecamatan Kertajati melebihi Kecamatan Majalengka.

Walaupun demikian untuk variabel lingkungan terbangun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu:

1. Belum ada fasilitas pedestrian untuk yang berkebutuhan khusus;
2. Fasilitas pendukung pedestrian belum memadai;
3. Bangunan publik yang ada belum tersebar secara merata untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat;
4. Hanya terdapat angkot dan angdes dengan armada yang terbatas untuk transportasi di dalam Kecamatan Kertajati;
Banyak jalan lingkungan yang menghubungkan antar kawasan

Sedangkan dari segi variabel kesenjangan sosio spasial terdapat beberapa kekurangan yaitu:

1. Rasio perbandingan jumlah banyaknya sekolah di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka masih cukup jauh antara sekolah TK, SMP, dan SMA;
2. Banyaknya tempat pemasaran dan koperasi di Kecamatan Kertajati masih terpaut jauh jumlahnya dengan yang ada di Kecamatan Majalengka;

PEMBAHASAN

Beberapa Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda lebih sulit diimplementasikan sehingga isi kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan.

Hal ini tercermin dari hasil penelitian dimana fasilitas umum dan fasilitas sosial belum merata karena belum banyak program dari pemerintah yang belum terlaksana. Contohnya belum adanya fasilitas difabel, fasilitas pedestrian di ruang terbuka perkotaan.

Alih fungsi lahan pertanian dapat mengubah struktur mata pencaharian dalam satu keluarga dan pilihan pekerjaan baru yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menyikapi hal tersebut, salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kertajati adalah menjadi pekerja migran ke luar negeri pada sektor informal, karena dipandang sesuai dengan kapasitas mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bekerja. Hal ini didukung dengan hasil perbandingan rasio sekolah yang ada di Kecamatan Kertajati masih minim. Diperlukan pemerataan dari segi pendidikan di Kecamatan Kertajati untuk mempersiapkan masyarakat Kecamatan Kertajati yang akan bertransformasi menjadi masyarakat kota besar.

Berdasarkan konsep politik hijau dimana teori politik harus selaras dengan teori-teori lingkungan menyebutkan jangan sampai pembangunan Bandara Internasional Kertajati menimbulkan bencana alam, perubahan iklim, polusi udara, dan kehancuran lingkungan. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati tidak boleh bersifat ekosentrisme saja, dimana lingkungan alam dimanfaatkan secara maksimal hingga mengakibatkan krisis. Hal ini didukung oleh hasil penelitian ini bahwa ruang terbuka publik yang ada masih minim sehingga perlu diperhatikan pembangunan dari segi ekologis untuk keberlanjutan lingkungan yang akan datang di Kecamatan Kertajati.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa dampak pembangunan BIJB memberikan peningkatan kepadatan akan kawasan terbangun, peningkatan kepemilikan lahan besar-besaran oleh swasta atau pemerintah, peningkatan perubahan guna lahan, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan harga tanah dan bangunan.

Peningkatan volume kendaraan yang berakibat kepadatan lalu lintas, dan penurunan kualitas kesehatan. Hal ini didukung oleh penelitian ini dimana beberapa dampak sosial negatif telah dirasakan oleh masyarakat sehingga perlu

penanganan dampak sosial guna kesejahteraan sosial masyarakat Kecamatan Kertaji di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa beberapa komponen dalam analisis dampak sosial sudah menunjukkan hasil yang cukup baik secara kualitatif dari segi variabel lingkungan terbangun dan kesenjangan sosio-spasial dilihat dari 10 potensi yang dibahas pada bagian pembahasan.

Namun untuk beberapa komponen masih menunjukkan kekurangan yakni terdapat 8 poin variabel lingkungan terbangun dan 2 variabel kesenjangan sosio spasial yang mencerminkan bahwa perencanaan BIJB dan Kertaji Aerocity masih belum memenuhi kaidah kota yang berkeadilan seperti yang dijelaskan pada bagian pembahasan.

Berdasarkan analisis dampak sosial menggunakan sudut pandang teori Yiftachel dan Mandelbaum (2017) menunjukkan bahwa dampak sosial dari adanya BIJB yang dirasakan oleh masyarakat masih minim yang ditunjukan dengan pemerataan fasilitas publik pada kecamatan yang didalamnya terdapat bandara bertaraf internasional masih minim dan belum merata serta menjangkau semua kalangan termasuk yang berkebutuhan khusus dan terakhir masih terjadi kesenjangan sosio-spasial dengan kecamatan yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Majalengka yang idealnya kesenjangan antara kedua kecamatan ini tidak terlalu jauh karena Kecamatan Majalengka sebagai pusat pemerintahan dan Kecamatan Kertaji sebagai pusat industri dan bisnis yang sebaiknya bisa setara kondisi sosio-spasialnya.

Berikut merupakan rekomendasi atau saran yang sebaiknya dilakukan dari peneliti terkait hasil analisis dampak sosial dan respon masyarakat yang disusun berdasarkan komponen matriks potensi dan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya sebelumnya:

1. Ruang Publik Perkotaan

Perlu inklusifitas khususnya untuk kaum difabel pada pedestrian dan penambahan fasilitas perlengkapan jalan pada ruang publik di BIJB untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat.

2. Bangunan Publik

Perlu optimalisasi terkait keramahan terhadap kaum difabel dan inklusifitas terkait fasilitas di beberapa bangunan publik di BIJB dan beberapa penambahan beberapa bangunan publik dengan pemerataan agar mudah diakses masyarakat

3. Infrastruktur dan Transportasi Publik

Perlu penambahan moda transportasi baik yang ada di dalam kawasan maupun luar kawasan BIJB guna mempermudah aksesibilitas dan konektivitas BIJB.

4. Kualitas Pemeliharaan Perumahan

Dibutuhkan peningkatan kualitas pemeliharaan kawasan perumahan dan perawatan jalan lingkungan untuk meningkatkan visual keindahan kawasan sekitar BIJB.

5. Tingkat Integrasi Struktur Perkotaan

Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan Tol Cisumdawu dan trase kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertaji dan fasilitas pendidikan dan perdagangan dan jasa perlu dibangun secara merata di Kecamatan Kertaji guna meningkatkan integrasi struktur perkotaan

6. Pendidikan

Pemerintah sebaiknya menambah fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Kertaji.

7. Pendapatan

Industri-industri yang ada di Kecamatan Kertaji sebaiknya ditambahkan kualitas dan kuantitasnya secara optimal dan tempat pemasaran dan koperasi perlu ditambahkan dan disebar secara merata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagai penutup, pentingnya analisa dampak sosial terhadap suatu proyek yang besar yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar menjadi hal yang tak kalah penting dari analisa dampak lingkungan. Karena jika suatu proyek dirasa oleh masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidupnya maka proyek tersebut akan prospektif di masa yang akan datang karena keterlibatan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sendiri. Konflik antara pemerintah dan masyarakat pun akan minim sehingga pemerintah maupun pengelola BIJB dan Kertaji Aerocity tidak perlu lagi mengeluarkan dana CSR sebagai bentuk tanggung jawab

kepada masyarakat serta masyarakat sendiri yang akan menjaga *sustainability* dari proyek yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, D.E.A selaku dosen pembimbing mata kuliah teori perencanaan penulis yang telah membimbing, memberikan arahan maupun bahan literatur dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung tempat penulis menuntut ilmu dan memperoleh gelar M.PWK yang telah memberikan ilmu sebagai dasar penulis dalam menyelesaikan karya ini dan memberikan dukungan finansial untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ADISASMITA, SAKTI ADJI. 2013. Mega City dan Mega Airport. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- ATMADJATI, ARISTA. 2012. Manajemen Bandar Udara. Yogyakarta: leutrikaprio.
- BPS KABUPATEN MAJALENGKA.2019. Kecamatan Kertajati Dalam Angka 2018. BPS Kabupaten Majalengka:Majalengka
- BPS KABUPATEN MAJALENGKA.2019. Kecamatan Majalengka Dalam Angka 2018. BPS Kabupaten Majalengka:Majalengka
- CNBCINDONESIA.COM.2019. diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190120134328-4-51489/ini-5-proyek-bandara-raksasa-ri-ada-yang-bisa-salip-changi> diakses pada 04 Desember 2019
- HAQ, HARUN DIN DAN PUTRO, HERU PURBOYO HIDAYAT PUTRO. 2021. Dampak Bandara Internasional Jawa Barat Terhadap Wilayah Sekitarnya. CR Journal Volume 7 No.1 Juni 2021 Hal.38-50.

HERMANTO, BAMBANG. 2021. Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati dalam Kajian *Green Political Theory*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA), Volume 5 Nomor 2 (2021) Hal.62-73.

NURKHODILLAH, ANNISA FITRI dan PRATIWI, POERWANTI HADI. 2020. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Bagi Masyarakat Purworejo. Jurnal Pendidikan Sosiologi. Voulme 9 Nomor 1 2020 Hal 1-29.

RINANDAR, NIAR MUFLIHAT. 2019. Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta:Tidak Diterbitkan.

SANTOSO, MEILANNY BUDIARTI. NURWATI, NUNUNG. APSARI, NURLIANA CIPTA. 2019. Pergeseran Mata Pencaharian Masyarakat di Wilayah Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Share : Social Work Jurnal. Volume 9 Nomor 2 Hal.168-178.

SOEBAGJA, RIAN ARFIANSYAH. 2014. Implikasi Pembebasan Lahan Terhadap Pekerjaan dan Kelangsungan Hidup (Studi Kasus Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Blok Cintakarya Desa Kertajati Kabupaten Majalengka). Program Studi Sosiologi FISIPOL-UGM: Tidak diterbitkan.

YIFTACHEL, OREN DAN MANDELBAUM, RANI.2017.Doing the Just City: Social Impact Assessment and the Planning of Beersheba, Israel. Planning Theory dan Practice.18:4, 525-548.DOI: 10.1080/14649357.2017.1381758

ZULFIKAR, WALUYO DAN RUKAYAT, YAYAT. 2017. Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. CR Journal Volume 3 No.1 Juni 2017 Hal.13-24.

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENURUNAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT

THE ROLE OF COMMUNITY PARTICIPATION IN REDUCING POVERTY IN GARUT REGENCY

Ayuka Pradina Ashara Primadipta Sewaminggi, Ahmad Muhajirin, Garan Paruta, Keni Dwikania, Mira Janu
Yustisi, Ribut Qori'ah, Urip Basuki, dan Bayu Kharisma
Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
apapssewaminggi@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to identify the conditions of poverty, the role of community participation in poverty alleviation efforts, and formulate alternative strategies for handling poverty from a social aspect. This research was conducted in Garut Regency, West Java. The collection of research data was carried out using a literature study and interviews using a questionnaire. The data obtained were processed using gap correlation analysis and SWOT analysis. The study shows that poverty in the Garut Regency in 2015-2020 has decreased in the last six years. However, the achievements still need to be improved compared to other regions. There is a strong relationship between community participation, poverty, and human development, with a correlation above 0.9 for each variable. This strong relationship needs to be addressed by optimizing the interrelationships between variables with a comprehensive strategy. An aggressive strategy (S-O) was produced as the best strategy by utilizing natural resources in Garut Regency through collaboration between the Central and Regional Governments while still involving community participation as the development subject in Garut Regency. Collaborative efforts between the government and the community in developing human resources, especially in the educational and economic aspects, are closely related to poverty. Thus, through active community involvement to encourage the participation of all parties to develop the regional economy with the potential it has, it can be an alternative effort to reduce poverty.

Keywords: Poverty, human development, HDI, community participation, SWOT

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi kemiskinan, peran partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan dan merumuskan strategi alternatif penanganan kemiskinan dari aspek sosial. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut Jawa Barat. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan analisis, analisis korelasi serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Garut pada periode 2015-2020 mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, namun capaiannya masih belum optimal dibandingkan dengan daerah lain. Terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi masyarakat, kemiskinan, dan pembangunan manusia dengan korelasi diatas 0,9 pada masing-masing variabel. Hubungan yang kuat tersebut perlu disikapi dengan mengoptimalkan keterkaitan antar variabel dengan strategi yang komprehensif. Strategi agresif (S-O) sebagai strategi terbaik dengan pemanfaatan SDA di Kabupaten Garut melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Garut. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, tersebut khususnya pada aspek pendidikan dan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Dengan demikian, melalui keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendorong partisipasi seluruh pihak membangun ekonomi daerah dengan potensi yang dimiliki dapat menjadi alternatif upaya pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, pembangunan manusia, IPM, partisipasi masyarakat, SWOT

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial dalam suatu masyarakat yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Masalah kemiskinan ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan. Pengukuran tingkat kemiskinan

dapat dilihat dari ketidakmampuan masyarakat baik dari segi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan (Alviannor & Fahrati, 2021).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan pokok atau sulitnya akses pendidikan yang layak, pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjangkau dan juga kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Garut merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang masih menghadapi tingkat kemiskinan sebagai permasalahan utama.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut dibentuk demi mengurangi jumlah tingkat kemiskinan. Namun, penanggulangan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Menurut dari hasil pendataan

BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 18,58 ribu jiwa dari 262.78 ribu jiwa (9.98 %) pada tahun 2020 menjadi sebanyak 281.36 ribu jiwa (10.65 %) pada tahun 2021, atau meningkat sebesar 1%. Sementara itu, pada Gambar 1 menunjukkan bahwa indikator kemiskinan di Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2015-2020 mengalami trend perbaikan, namun belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini salah satunya terlihat dari angka kemiskinan di Kabupaten Garut masih cukup tinggi dan perbandingan angka persentase penduduk miskin antara Kabupaten Garut dengan Jawa Barat maupun Nasional.



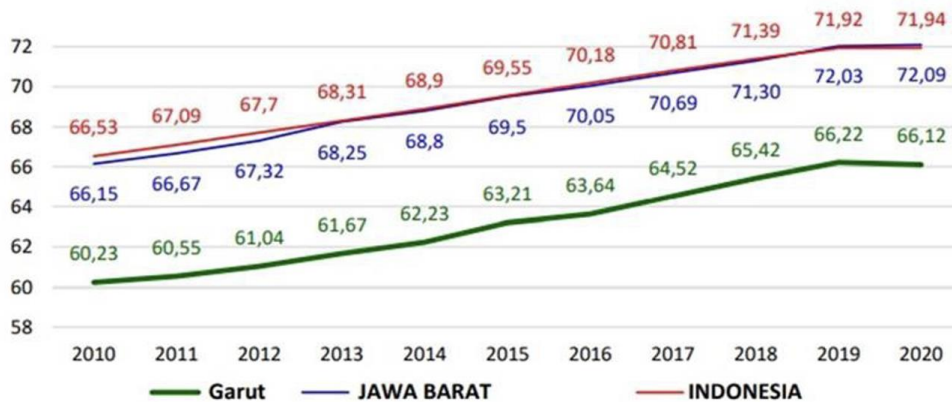
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2020

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019-2024

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memberikan suatu kesejahteraan pada suatu kelompok masyarakat (Endah, 2020). Berdasarkan pandangan antroposentris, manusia dalam pembangunan merupakan obyek dan subyek pembangunan (Wagner & Suteki, 2019). Dengan demikian, manusia berperan sentral dalam suatu pembangunan. Hal ini kemudian memunculkan istilah pembangunan manusia.

Sementara itu, pembangunan manusia dapat diketahui kondisi ketercapaiannya dengan mengukur suatu indikator tertentu, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

atau *Human Development Index* (HDI) (Kirana, Nasution, & Wanto, 2019). IPM merupakan indeks komposit yang mengukur kondisi kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah berkorelasi dengan tingkat ketercapaian IPM, begitu juga di Kabupaten Garut. Dalam perkembangannya, selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 IPM di Kabupaten Garut mengalami trend meningkat. Walaupun jika diranking, IPM Kabupaten Garut tetap berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2020

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019-2024

Berbagai kebijakan telah disusun untuk mengurangi masalah kemiskinan, salah satunya untuk menurunkan angka kemiskinan mulai dari yang rumit sampai yang sangat sederhana seperti Bantuan Bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan-bantuan langsung atau semi langsung lainnya. Namun demikian, belum semua kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa program ternyata kurang sesuai dengan kondisi wilayah setempat, bahkan disinyalir bantuan untuk masyarakat miskin sering tidak tepat sasaran. Kebijakan pengentasan kemiskinan kebanyakan belum dapat mengakomodasi potensi wilayah serta karakteristik penduduk miskin sebagai sasaran utama. Hal ini disebabkan kemiskinan tidak bisa hanya didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material atau perspektif ekonomi semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia atau perspektif sosial (Legawati & Nugraheni, 2019).

Penanggulangan atau penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan cara memanfaatkan keunggulan lokal dapat menjadi salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya tanggung jawab masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada di daerah masing-masing dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dalam penanganannya melalui pendekatan aspek sosial utamanya dengan melibatkan masyarakat dapat menjadi kunci mengoptimalkan penangan kemiskinan.

Aspek sosial yang digunakan dalam penanganan kemiskinan adalah melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat

sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar masyarakat, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya (Herman, 2019). Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama melalui strategi penyadaran. Selain itu, keberhasilan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan masyarakat tidak lepas dari partisipasi dan inisiatif dari masyarakatnya mulai dari tahap awal sampai akhir (Macdonald, 2018).

Secara tersirat partisipasi masyarakat menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Garut sebagaimana tercantum pada pembahasan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lebih lanjut, partisipasi masyarakat diadopsi menjadi strategi kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan pada pembangunan daerah Kabupaten Garut selama periode 2019 – 2024. Beberapa contoh partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut adalah dalam kegiatan Keluarga Bencana, pemberdayaan perempuan

dan anak, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sampah. Namun, pada berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, partisipasi masyarakat di kegiatan-kegiatan tersebut masih belum optimal dan menjadi bagian dari permasalahan dan isu strategis daerah.

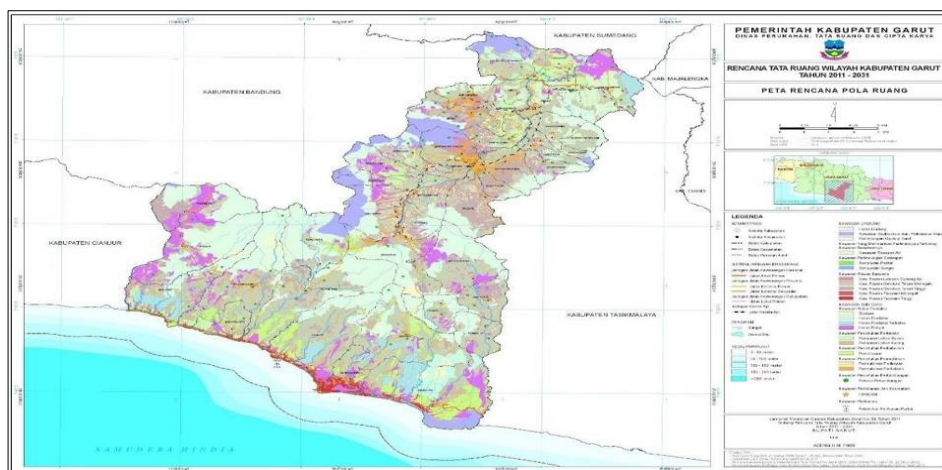
Beberapa hasil studi mengenai pentingnya peran masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan oleh Diyanayati & Padmiati (2017) menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Sulawesi selatan lebih dititikberatkan pada penyadaran masyarakat tentang berbagai kebiasaan yang sudah menjadi budaya dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Saptatiningsih, Nugrahani, & Rejeki (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Koestedjo (2018) menyatakan bahwa salah satu strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik yaitu mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah mengenai penggunaan metodologi penelitian yang

berbeda dan juga lokasi penelitian, sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan, peran partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan dan merumuskan strategi alternatif penanganan kemiskinan dari aspek sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, mengingat penelitian mengenai peran partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan masih terbatas, khususnya di Kabupaten Garut yang merupakan wilayah yang memiliki kemiskinan ekstem tertinggi ke lima antar kabupaten/kota di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung yang mencapai 82,17 ribu jiwa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2008. Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" LS dan 107°25'8" - 108°7'30" BT. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 307,407 Ha (3.074,07 km²), dengan batas sebelah Utara adalah Kabupaten Bandung dan Sumedang. Batas sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia, batas sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya, dan batas sebelah Barat dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Kabupaten Garut

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut tahun 2014-2019

Secara administratif, Kabupaten Garut mempunyai luas 307.407 ha atau $\pm 8,28$ persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi dalam 42 kecamatan dan 422 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibalong dengan luas 21,359 ha atau 6,97% dari luas Kabupaten Garut. Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersamanah dengan luas 1,650 ha atau 0,54% dari luas Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan (Danandjaja, 2014). Metode kepustakaan ini dipilih karena lebih banyak menggunakan data sekunder yang tersedia.. Pengumpulan data penelitian juga dilakukan dengan wawancara secara daring

menggunakan angket (kuesioner).

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya, atau hal lain yang diketahui oleh responden. Sementara itu, dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Syatriani, 2020) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel yang dikehendaki

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan 10%

Dalam hal ini bahwa 10% margin eror sama dengan dengan 0,10. Dengan jumlah populasi 43 orang dengan margin error 10% adalah 30.06 atau berjumlah sekitar 30 orang. Data yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Data Sekunder yang Digunakan dalam Penelitian

No	Data	Sumber Data	Tahun
1	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
2	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
3	Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
4	Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
5	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut	DP2KBP3A	2019-2024
6	Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut	Bappeda Kabupaten Garut	2014-2018 2019-2024
7	Indikator Kemiskinan	BPS Kabupaten Garut	2015-2020
8	Data jumlah penduduk laki - laki dan perempuan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Garut	Dinas Kependudukan	2020

Data yang dikumpulkan berasal dari instansi terkait seperti Bappeda Kabupaten Garut, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan 3 (tiga) metode yaitu analisis SWOT, analisis kesenjangan dan analisis korelasi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi. Menurut Galavan (2014), analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*) yaitu analisis untuk mendapat strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan

publik saat itu, peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) digunakan untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal kemudian kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Untuk menganalisis masalah kemiskinan dan keterkaitannya dengan indikator pembangunan manusia antara periode maka dilakukan *gap analysis*.

Gap analysis atau analisis kesenjangan merupakan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diinginkan. Berdasarkan teori *discrepancy* atau teori kesenjangan, Jennings, (2000) menyatakan

bahwa ketidakpuasan merupakan perbedaan antara seberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dan seberapa banyak yang diterima pada kenyataannya. *Gap analysis* dapat digunakan sebagai metode atau alat untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi. Dalam kondisi umum, kinerja suatu institusi dapat tercermin dalam sistem operasional maupun strategi yang digunakan oleh suatu institusi. *Gap* dapat bernilai (+) apabila nilai aktual lebih besar dari nilai target, sebaliknya dapat bernilai (-) negatif.

Korelasi

Korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau lebih yang digambarkan oleh besarnya korelasi. Analisis korelasi merupakan bagian dari ilmu statistika yang mempunyai sembilan macam jenis diantaranya: Korelasi Pearson *Product Moment* (r); Korelasi Ration (y); Korelasi *Spearman Rank* atau *Rhi* (r_s atau p); Korelasi Berserial (r_b); Korelasi Poin Berserial (r_{pb}); Korelasi Phi (ϕ); Korelasi Tetrachoric (r_t); Korelasi Kontingency (C); Korelasi Kendall's Tau (Sugiyono, 2015). Menurut Cleff (2019) analisis korelasi adalah sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel, gagasan dasar dari analisis korelasi untuk melaporkan hubungan antara dua variabel. Berikut, pedoman untuk memberikan interpretasi dan analisis bagi koefisien korelasi (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini, dimana penelitian menggunakan uji korelasi parsial.

Tabel 2. Interpretasi dan Analisis Koefisien Korelasi

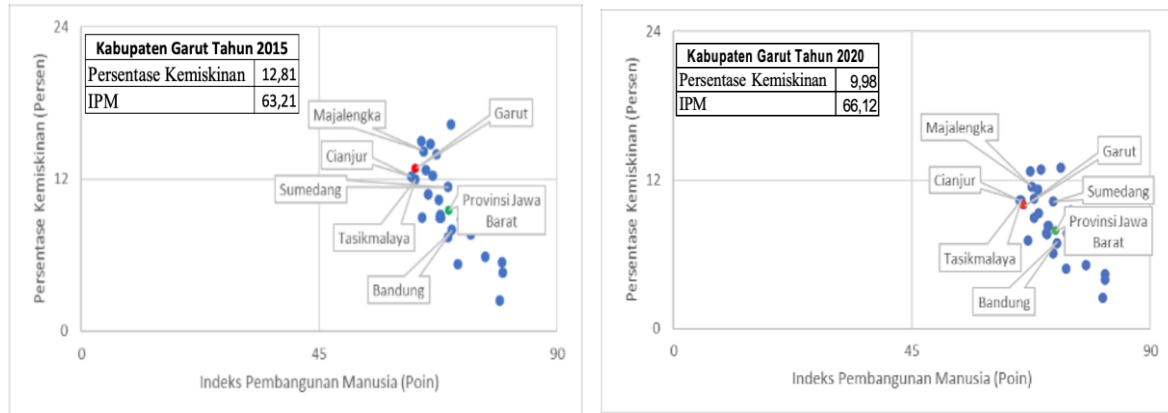
Nilai Korelasi	Kekuatan Hubungan
0,00 – 0,1999	Sangat Rendah
0,20 – 0,3999	Rendah
0,40 – 0,5999	Sedang
0,60 – 0,7999	Kuat
0,80 – 1,0000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembandingan indikator kemiskinan dan pembangunan manusia antar tahun dapat menggambarkan berkembang dari tiap indikator. Penurunan kemiskinan yang selaras dengan peningkatan indikator pembangunan manusia selanjutnya akan dikaitkan dengan upaya-upaya terkait dari partisipasi masyarakat yang telah dilakukan di Kabupaten Garut.

Selama kurun waktu tahun 2020 secara umum terdapat peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selaras dengan penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Garut sebagaimana tertera pada Gambar 5. Diketahui bahwa IPM pada tahun 2015 sebesar 63,21 poin dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi 66,12 poin. Begitu pula persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan dari 12,81 persen pada 2015 menjadi 9,98 persen di tahun 2020. Apabila disandingkan antara kedua indikator tersebut diketahui bahwa secara rata-rata terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan namun berbeda dengan IPM yang cenderung berada di posisi yang hampir sama antara tahun 2015 dan 2020. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Garut tetapi juga Kabupaten Majalengka dan Cianjur sebagai daerah perbatasan. Berdasarkan capaian tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu enam tahun kualitas IPM di Kabupaten Garut masih tergolong dalam kelompok sedang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi hal tersebut dengan pendekatan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendorong partisipasi seluruh pihak membangun ekonomi daerah dengan potensi yang dimiliki diketahui berdampak positif pada penurunan kemiskinan sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 namun pada indikator pembangunan manusia dengan IPM sebagai pendekatannya diketahui belum mencapai target yang diharapkan hingga saat ini. Berada pada posisi ke 25 dari 27 Kabupaten Kota di Garut mengindikasikan perlu adanya pendekatan yang lebih holistik-integratif dalam penanganan kemiskinan. Selain itu, tidak hanya pendekatan dari kuantitas belanja daerah tetapi juga kualitas dari belanja pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat yang diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan.



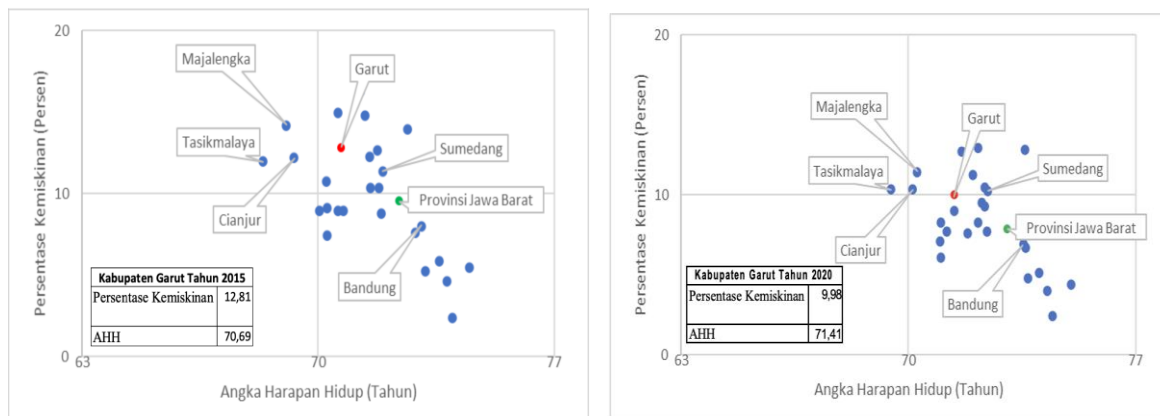
Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015 dan 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Keterkaitan Aspek Kesehatan dan Kemiskinan di Kabupaten Garut

Faktor kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengentasan lingkaran kemiskinan. Melalui tenaga kerja yang sehat maka diharapkan produktivitas akan meningkat

dan mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan. Aspek kesehatan sebagai salah satu dimensi dalam perhitungan indeks pembangunan manusia secara umum menunjukkan adanya peningkatan angka harapan hidup (AHH) dari tahun 2015 hingga 2020.



Gambar 6. Angka Harapan Hidup dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian dimana pada tahun 2015 AHH Kabupaten Garut sebesar 70,69 tahun dan pada tahun 2020 sebesar 71,41 tahun. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terjadi peningkatan 0,72 tahun atau sekitar 8 bulan 19 hari angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Garut. Capaian tersebut relatif lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 0,63 tahun. Bila dibandingkan dengan daerah lain maka peningkatan AHH Kabupaten Garut dalam kurun waktu yang sama masih lebih rendah dari Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Majalengka.

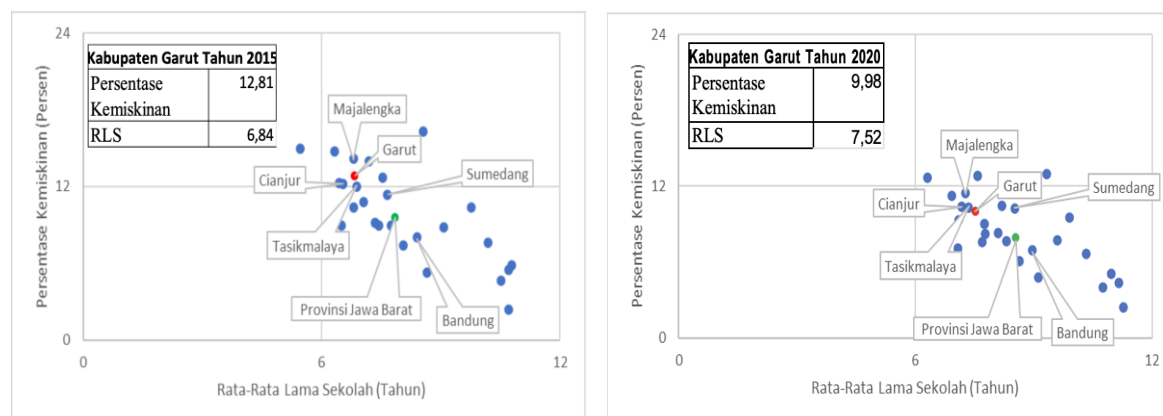
Keterkaitan Aspek Pendidikan dan Kemiskinan di Kabupaten Garut

Faktor pendidikan dalam pembangunan manusia adalah salah satu bentuk investasi yang dilakukan untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada melalui peningkatan produktivitas masyarakat.

Melalui pendekatan indeks pembangunan manusia maka dimensi pendidikan dapat dilihat dari dua indikator yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan juga harapan lama sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh rata-rata penduduk dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah merupakan

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (umumnya 7 tahun) di masa mendatang secara rata-rata di suatu daerah.



Gambar 7. Rata-Rata Lama Sekolah dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015 dan 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Berdasarkan *gap analysis* yang dilakukan di Kabupaten Garut pada Gambar 7. Tercatat pada tahun 2015 RLS berada pada posisi 6,84 tahun atau dapat dikatakan rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Garut hanya sampai SD kelas 6. Seiring perkembangan waktu pada tahun 2020 diketahui bahwa RLS mencapai 7,52 tahun atau rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Garut hingga kelas 1 SMP. Seiring dengan hal tersebut, terjadi penurunan kemiskinan yang menggeser posisi dari tahun 2015 sebanyak 12,81 persen menuju 9,98 persen pada tahun 2020. Berdasarkan rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat posisi kemiskinan dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Garut antara tahun 2015 dan 2020 mengalami perubahan posisi rata-rata namun tidak signifikan. Apabila dibandingkan dengan daerah lain diketahui bahwa Kabupaten Sumedang berada satu tingkat lebih baik dalam peningkatan rata-rata lama sekolah. Pada periode yang sama terjadi peningkatan 0,85 tahun atau 10,2 bulan sedangkan Garut pada tahun 2015 hingga 2020 meningkatkan RLS sebanyak 0,68 tahun atau 8,16 bulan. Posisi tersebut masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yakni 0,69 tahun.

Keterkaitan Aspek Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Garut

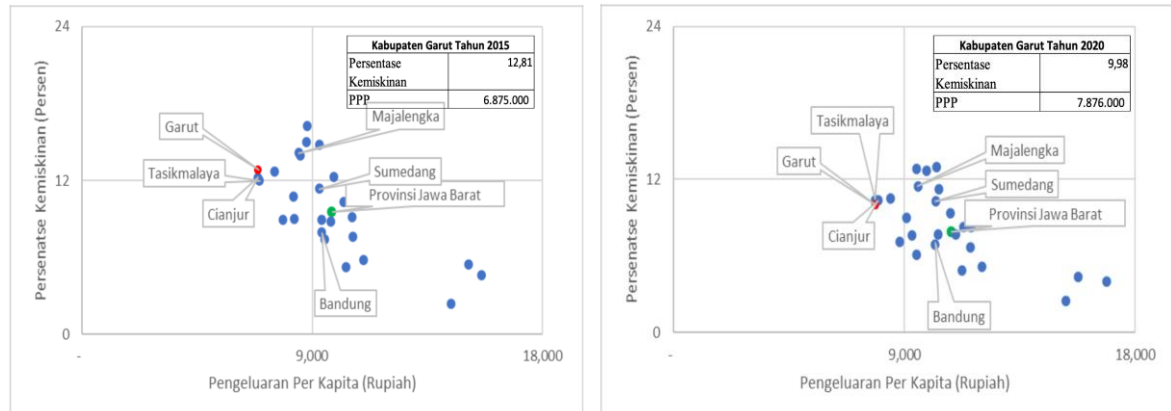
Aspek ekonomi merupakan salah satu bagian utama dalam penyusun indeks pembangunan manusia. Dimensi pengeluaran yang menjadi

pendekatan ekonomi dapat menggambarkan standar hidup layak (Maulidya, 2021). Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita (PPP) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Melalui peningkatan pengeluaran per kapita yang juga merepresentasikan pendapatan Mengacu pada *gap analysis* yang dilakukan, Kabupaten Garut pada tahun 2015 tercatat bahwa pengeluaran per kapita sebesar Rp. 6.875.000,- dan meningkat selama enam tahun mencapai Rp.7.876.000,-. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

Peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Garut dalam kurun waktu 6 tahun cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, dan Sumedang. Namun apabila dibandingkan dengan *starting point* PPP di tahun 2015 dari kabupaten yang berbatasan maka diketahui bahwa Kabupaten Garut menempati posisi terendah dan berada dibawah rata-rata provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, apabila dilihat pada Gambar 8 dalam kurun waktu 2015-2020 secara umum di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang cenderung terpisah dari rata-rata kabupaten/kota lain. Hal tersebut menggambarkan lambatnya peningkatan PPP dibandingkan dengan rata rata di Provinsi Jawa

Barat. Secara umum permasalahan ini menjadi kendala utama dalam peningkatan IPM yang

tentunya menghambat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut.



Gambar 8. Pengeluaran Per Kapita dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015 dan 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Hubungan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kemiskinan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Mengacu pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa masih belum optimalnya capaian IPM di Kabupaten Garut yang selaras dengan penurunan penduduk miskin yang masih dapat dimaksimalkan. Pendekatan partisipasi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan IPM dari dimensi kesehatan, pendidikan dan daya beli dapat diharapkan mampu mendorong pengentasan kemiskinan secara optimal. Guna melihat hubungan antara partisipasi masyarakat, pembangunan manusia dan kemiskinan di Kabupaten Garut maka dilakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel.

Menggunakan data tahun 2015-2020 terkait persentase kemiskinan, IPM dan partisipasi masyarakat yang ditinjau dari keterlibatan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pasca program pada kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dapat diketahui pada Tabel 3 bahwa terdapat hubungan tinggi antara seluruh variabel yang diuji. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terdapat korelasi negatif yang kuat antara kemiskinan dan IPM dengan nilai $-0,9338$. Hal tersebut selaras dengan Singh, (2012) dan Prasada, Yulhar, & Rosa, (2020), dimana IPM

berhubungan dengan penurunan kemiskinan. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut, IPM memiliki pengaruh pada upaya pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

Selanjutnya apabila ditinjau hubungan kemiskinan dan partisipasi masyarakat secara umum berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan negatif yang kuat dengan masing-masing nilai sebesar $-0,9048$ untuk partisipasi masyarakat secara swadaya dan $-0,9552$ untuk partisipasi masyarakat dalam konteks pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Garut. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Osei-Kufuor & Koomson, (2014) dan Nugrahani, Suharni, & Saptatiningsih, (2019), dimana partisipasi masyarakat berpengaruh pada penurunan kemiskinan di suatu daerah. Terdapat pula hubungan positif yang kuat antara partisipasi masyarakat dan capaian IPM di Kabupaten Garut. Berdasarkan tabel tersebut diketahui korelasi antar kedua variabel tersebut sebesar $0,9681$ untuk hubungan IPM dan swadaya masyarakat dan $0,9579$ untuk hubungan IPM dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Diperlukan upaya dari *stakeholder* terkait untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Garut, khususnya masalah kemiskinan.

Tabel 3. Analisis Korelasi Indikator Kemiskinan, IPM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Garut

Keterangan	Persentase Kemiskinan	IPM	Partisipasi: Swadaya Masyarakat*	Partisipasi: Pemeliharaan Pasca Program*
Persentase Kemiskinan	1,0000	-0,9338	-0,9048	-0,9552
IPM	-0,9338	1,0000	0,9681	0,9579
Partisipasi: Swadaya Masyarakat	-0,9048	0,9681	1,0000	0,9249
Partisipasi: Pemeliharaan Pasca Program	-0,9552	0,9579	0,9249	1,0000

Sumber: BPS 2021, RKPD Kabupaten Garut 2021 (diolah)

- Perhitungan dengan menggunakan data primer

Strategi Penanganan Kemiskinan dari Aspek Sosial di Kabupaten Garut

Pada kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut salah satunya menggunakan analisis *Strenghts, Weaknesses, Opportunities*

dan *Threats* (SWOT) untuk menggali potensi sekaligus mengidentifikasi permasalahan berikut solusi kebijakan yang dapat diambil dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut. Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis *Strenghts, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (SWOT)

Faktor Internal Kekuatan (<i>Strenghts</i>)		Faktor Internal Kelemahan (<i>Weakness</i>)	
1.	Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program pembangunan daerah di Kabupaten Garut	1.	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal untuk memenuhi kriteria lapangan kerja
2.	Sumber daya alam melimpah di Kabupaten Garut	2.	Sektor pendidikan formal yang belum optimal di Kabupaten Garut
3.	Komitmen pimpinan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Garut	3.	Tingginya ego sektoral stakeholder dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut
4.	Faktor kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut yang baik (terlihat dari angka harapan hidup)	4.	Proses perencanaan dan evaluasi yang belum melibatkan masyarakat secara optimal di Kabupaten Garut
5.	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang responsif dalam penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan manusia di Kabupaten Garut	5.	Aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Garut
Faktor Eksternal Peluang (<i>Opportunities</i>)		Faktor Eksternal Ancaman (<i>Threats</i>)	
1.	Kolaborasi pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) di Kabupaten Garut	1.	Arus urbanisasi (desa ke kota) di Kabupaten Garut
2.	Pembangunan manusia secara partisipatif melalui CSR di Kabupaten Garut	2.	Masalah sosial-ekonomi dari jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Garut
3.	Budaya gotong-royong antar masyarakat yang mendukung pembangunan di Kabupaten Garut	3.	Potensi bencana alam yang tidak dapat di prediksi di Kabupaten Garut
4.	Modal sosial yang tinggi dari masyarakat untuk membantu masyarakat yang lain	4.	Masuknya pengaruh negatif dari budaya barat ke Kabupaten Garut
5.	Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut	5.	Generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi

Sumber : Hasil Analisis

Tahap selanjutnya adalah melakukan perangkingan untuk setiap faktor internal dan eksternal pada masing-masing kategori S-W-O-T. Dengan perangkingan maka didapat hasil

tertinggi pada masing-masing kategori (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*) seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perangkingan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

No	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Skor	Rangking
1	Sumber daya alam melimpah di Kabupaten Garut	79	1
2	Komitmen pimpinan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Garut	53	2
3	Pelibatan masyarakat dalam implementasi program kegiatan pembangunan daerah di Garut	30	3
4	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang responsif dalam penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan manusia di Kabupaten Garut	24	4
5	Faktor kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut yang baik (terlihat dari angka harapan hidup)	19	5
No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Skor	Ranking
1	Proses perencanaan dan evaluasi yang belum melibatkan masyarakat secara optimal di Kabupaten Garut	24	1
2	Aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Garut	24	2
3	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal untuk memenuhi kriteria lapangan kerja	23	3
4	Tingginya ego sektoral dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut	18	4
5	Sektor pendidikan formal yang belum optimal di Kabupaten Garut	7	5
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Skor	Ranking
1	Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut	45	1
2	Kolaborasi pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) di Kabupaten Garut	30	2
3	Pembangunan manusia secara partisipatif melalui CSR di Kabupaten Garut	30	2
4	Budaya gotong-royong antar masyarakat yang mendukung pembangunan di Kabupaten Garut	30	2
5	Modal sosial dari masyarakat untuk membantu masyarakat lain yang tinggi	30	2
No	Ancaman (<i>Threats</i>)	Skor	Ranking
1	Masalah sosial-ekonomi dari jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Garut	38	1
2	Potensi bencana alam yang tidak dapat di prediksi di Kabupaten Garut	27	2
3	Arus urbanisasi (desa ke kota) di Kabupaten Garut	25	3
4	Generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi	23	4
5	Pengaruh negatif dari budaya barat yang masuk ke Kabupaten Garut	18	5

Sumber : Hasil Analisis

Dalam menganalisis strategi peran partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut dapat memanfaatkan strategi *Strenghts – Opportunities* (SO) yaitu gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang antara lain melalui:

1. Mengoptimalkan sumber daya alam di Kabupaten Garut dengan keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi secara kolaboratif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut
2. Meningkatkan komitmen pimpinan untuk kolaborasi secara pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) untuk menurunkan kemiskinan
3. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan daerah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)

secara partisipatif.

4. Meningkatkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong dengan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
5. Meningkatkan faktor kesehatan masyarakat yang baik sebagai modal sosial dari masyarakat untuk membantu masyarakat lain.

Strategi *Weakness-Opportunities* (W-O) yakni gunakan peluang, menanggulangi kelemahan, diperoleh beberapa strategi kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan keterlibatan pemerintah pusat, provinsi dan masyarakat secara optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk menangani kemiskinan.

2. Meningkatkan kolaborasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) dalam aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia secara partisipatif melalui CSR untuk mengoptimalkan kapasitas SDM yang memenuhi kriteria lapangan kerja.
4. Meningkatkan budaya gotong-royong antar masyarakat dalam pembangunan untuk mengurangi ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.
5. Mengoptimalkan sektor pendidikan formal untuk meningkatkan modal sosial dari masyarakat dalam membantu masyarakat lain.

Strategi *Strengths-Threats* (S-T) yakni kekuatan mengubah ancaman menjadi peluang diperoleh beberapa strategi kebijakan antara lain:

1. Mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi dari perspektif demografi.
2. Memperkuat komitmen pimpinan untuk memitigasi dan mengatasi potensi bencana alam yang berdampak pada kemiskinan.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah untuk mengurangi arus urbanisasi (desa ke kota).
4. Memperkuat peranan ASN dalam merespon dan menangani generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi.
5. Meningkatkan faktor kesehatan masyarakat yang baik untuk mengurangi pengaruh negatif dari budaya barat yang masuk.

Pada asumsi *Weakness-Threats* (W-T) yakni perkecil kelemahan, hindari ancaman diperoleh beberapa strategi kebijakan antara lain :

1. Mengoptimalkan proses perencanaan dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi secara demografi.
2. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk memitigasi potensi bencana alam yang tidak dapat di prediksi.
3. Meningkatkan SDM yang belum optimal untuk menghindari arus urbanisasi (desa ke kota).
4. Meningkatkan pemahaman generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi untuk menekan ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.
5. Memperkuat sektor pendidikan formal yang belum optimal untuk mengurangi pengaruh

negatif dari budaya barat yang masuk.

Berdasarkan hasil analisis strategi berkaitan dengan peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut maka diprioritaskan pada strategi *Strength-Opportunities* (SO) yaitu dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk mengambil manfaat dari peluang lingkungan yang ada. Pemilihan strategi ini didasarkan pada perbandingan dengan skor yang tertinggi. Pemerintah daerah pasti ingin daerahnya dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Garut juga akan berusaha untuk memenuhi strategi yang lain yaitu strategi *Weakness-Opportunities* (WO), *Strength-Threats* (ST), atau *Weakness-Threats* (WT) untuk menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah dapat menerapkan strategi SO. Ketika sebuah daerah mempunyai kelemahan utama, maka daerah tersebut akan berusaha mengatasinya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Begitu juga ketika daerah menghadapi ancaman yang besar, maka sebuah daerah tersebut akan menghindarinya dan berkonsentrasi kepada peluang. Dapat dilihat bahwa analisis SWOT merupakan perkembangan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal, merupakan kekuatan (S) serta kelemahan (W) terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang (O) serta ancaman (T).

Potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan bahwa faktor kekuatan yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi internal baik dari kapasitas individu masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dapat meminimalkan kelemahan berkaitan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan aktivitas perekonomian masyarakat yang terbatas. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif komitmen pemerintah daerah dalam memberikan peluang ekonomi kepada untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sedangkan berdasarkan hasil identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan bahwa faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat cukup potensial dalam menangkap peluang berkaitan keterlibatan pemerintah pusat maupun provinsi dalam menghadapi permasalahan sosial-ekonomi pada masyarakat.

Mengacu pada hasil pembahasan maka ditentukan beberapa poin penjabaran atau penjelasan dari strategi S – O (Agresif) sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Garut dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat secara kolaboratif dalam penanganan kemiskinan meliputi adanya program-kegiatan pada pemerintah pusat dan provinsi berupa program-kegiatan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Garut meliputi pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan pariwisata potensi alam (daratan dan laut), pelatihan olahan makanan, pengembangan IKM yang berkaitan dengan industri kulit karena Kabupaten Garut terkenal dengan industri kulit dombanya dengan adanya berbagai program baik dari Pemerintah Daerah Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat akan berdampak pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Garut;
2. Meningkatkan komitmen pimpinan daerah untuk melakukan kolaborasi secara *pentahelix* yang meliputi dari unsur akademisi, dunia usia, komunitas/masyarakat, pemerintah daerah dan media untuk menurunkan kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan dengan misalnya dengan mengoptimalkan gerakan-gerakan yang ada. Salah satu gerakan tersebut antara lain *Gentra Karya* ini yang merupakan suatu terobosan dari *Disnakertrans* Kabupaten Garut yang berkolaborasi secara *pentahelix* bersama dengan beberapa elemen untuk menangani angka pengangguran di Kabupaten Garut. Gerakan seperti itu harus dipertahankan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Garut yang dari tahun tahun semakin meningkat. Program *Gentra Karya* melibatkan semua unsur masyarakat dan *stakeholder* untuk dapat berbuat, bekerja, atau berkarya sehingga kalau masyarakat berkarya baik secara informal maupun formal bekerja di perusahaan atau manufaktur di industri ataupun berkarya mempunyai wirausaha sendiri yang kemudian masyarakat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lain;
3. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan daerah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara partisipatif. Pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Garut untuk melibatkan masyarakat untuk dapat secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui CSR misalnya berupa pembangunan fisik sarana prasarana antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat hingga optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagainya sehingga masyarakat juga akan merasakan manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan;
4. Meningkatkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong dengan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Garut. Perlu dipertahankannya sikap gotong royong antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat berupa sumbang tenaga, pikiran, materi dan hal lainnya. Salah satu gerakan yang telah dilakukan adalah *Bhakti Gotong Royong Masyarakat* (BGRM). Diketahui bahwa Kabupaten Garut selalu mendapatkan nominasi juara dalam pelaksanaan program *Bhakti Gotong Royong Masyarakat* (BGRM) baik ditingkat Provinsi maupun nasional. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan semangat kebersamaan kekeluargaan menuju penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil akhir pembangunan;
5. Meningkatkan faktor kesehatan masyarakat yang baik sebagai modal sosial dari masyarakat untuk membantu masyarakat lain. Penduduk Kabupaten Garut memiliki modal sosial berupa sikap atau *attitude* yang di miliki mayoritas penduduknya yaitu *silih asah, silih asuh, silih asih*. Hal ini dapat menjadi kekuatan antar masyarakat Garut untuk saling tolong menolong dan menjaga satu sama lain. Diharapkan masyarakat Kabupaten Garut dapat selalu menjaga sikap sosial ini ditengah budaya-budaya barat atau modern masuk ke lingkungan sosial di Kabupaten Garut. Rasa solidaritas sosial masyarakat di Kabupaten Garut harus terus

ditingkatkan untuk membantu masyarakat yang lain. Melalui keterlibatan pemerintah untuk menguatkan modal sosial yang ada melalui program-kegiatan terkait maka diharapkan dapat meningkatkan kekuatan intrinsik secara sosial di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka strategi agresif (*strength-opportunity*) menjadi pilihan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan di Kabupaten Garut secara umum mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir namun capaiannya masih belum optimal apabila dibandingkan dengan daerah lain.

Pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengakselerasi capaian tersebut melalui keterlibatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang resilien. Kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan partisipasi masyarakat dan pembangunan manusia sehingga perlu disikapi dengan mengoptimalkan keterkaitan antar variabel tersebut dengan strategi yang komprehensif. Pendekatan partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat untuk menekan masalah kemiskinan. Partisipasi tersebut meliputi upaya bersama untuk membangun komunitas yang terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi di tingkat masyarakat, memberikan edukasi terkait pengembangan perekonomian sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, melakukan mentoring dan pengembangan bisnis secara swadaya, melakukan regenerasi pelaku ekonomi, hingga melakukan penguatan partisipasi antar masyarakat dan pelaku bisnis. Upaya tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dan mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Garut.

Strategi agresif (S-O) merupakan pilihan strategi terbaik dengan pemanfaatan SDA di Kabupaten Garut melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Garut. Guna menekan angka kemiskinan maka diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan manusia khususnya pada aspek pendidikan dan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan.

Partisipasi masyarakat yang optimal dapat memberdayakan masyarakat secara umum di Kabupaten Garut. Pembangunan manusia yang melibatkan partisipasi masyarakat perlu diciptakan agar muncul pembangunan *bottom-up* yang menjawab permasalahan di lingkungan masyarakat. Gerakan-gerakan yang dirancang oleh pemerintah perlu mengoptimalkan peran masyarakat sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Garut perlu melakukan pendataan, perencanaan hingga move dari setiap gerakan partisipasi masyarakat yang memanfaatkan potensi SDA sehingga muncul pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan tujuan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviannor, A., & Fahrati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/jiep.v4i1.3544>
- Bappeda Kabupaten Garut. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019*. Kabupaten Garut: Bappeda Kabupaten Garut.
- Bappeda Kabupaten Garut. (2021). *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024*. Kabupaten Garut: Bappeda Kabupaten Garut.
- BPS. (2021). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2021*. Bandung: BPS.
- BPS. (2021). *Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2021*. Garut: BPS.
- Cleff, T. (2019). *Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics. Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-17767-6>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 0(52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Diyanayati, K., & Padmiati, E. (2017). Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, N.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat*:

- Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Jennings, M. D. (2000). Gap analysis: Concepts, methods, and recent results. *Landscape Ecology*, 15(1). <https://doi.org/10.1023/A:1008184408300>
- Kirana, I. O., Nasution, Z. M., & Wanto, A. (2019). Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Menggunakan Metode Statistical Parabolic Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 16(2). <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v16i2.18178>
- Koestedjo, E. H. (2018). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(1). <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i1.445>
- Legawati, L., & Nugraheni, S. A. (2019). Determinan Sosial, Budaya Dan Kesehatan Serta Faktor Risiko Kehamilan Remaja Di Negara Miskin Dan Berkembang. *Journal Of Research In Public Health Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.33486/jrphs.v1i1.13>
- Macdonald, C. (2018). The Role of Participation in Sustainable Community Development Programmes in the Extractive Industries. *Extractive Industries: The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development*, (February).
- Maulidya, R. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2015 – 2018). *Jurnal Ilmiah*, 9.
- Nugrahani, T. S., Suharni, S., & Saptatiningsih, R. I. (2019). Potential of Social Capital and Community Participation in Village Development. *JEJAK*, 12(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.15775>
- Osei-Kufuor, P., & Koomson, F. (2014). Reducing poverty through community participation: The case of the National Poverty Reduction Program in the Dangme-West district of Ghana. *International Journal of Development and Sustainability*, 3(8).
- Prasada, I. Y., Yulhar, T. F. M., & Rosa, T. A. (2020). Determinants of poverty rate in Java Island: Poverty alleviation policy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.29259/jep.v18i2.11664>
- Saptatiningsih, R. I., Nugrahani, T. S., & Rejeki, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Singh, R. (2012). Human Development Indeks and Poverty Linkages. *Journal of Marketing and Technology*, 2(5).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 5).
- Syatriani, D. (2020). Rumus Slovin. *Dwi Syatriani*, 5(3).
- Wagner, I., & Suteki, S. (2019). Independensi Penilaian Amdal Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Tabel Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 6. Contoh Tabel KAFI

Kesimpulan Analisis Faktor Internal						
No	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor (BxR)	Ranking	Kesimpulan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
	Kekuatan (<i>Strengths</i>)					
1						Total S
2						
3						
	Kelemahan (<i>Weakness</i>)					
1						Total W
2						
3						
	Total	100				

Range rating : 4 (sangat menonjol), 3 (menonjol), 2 (tidak menonjol), 1 (paling tidak menonjol)

Lampiran 2. Contoh Tabel Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 7. Contoh Tabel KAFE

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal						
No	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor (BxR)	Ranking	Kesimpulan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
	Peluang (<i>Opportunities</i>)					
1						Total O
2						
3						
	Ancaman (<i>Threats</i>)					
1						Total T
2						
3						
	Total	100				

Range rating: 4 (sangat menonjol), 3 (menonjol), 2 (tidak menonjol), 1 (paling tidak menonjol)

DAMPAK AKSES INTERNET TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA BARAT SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

(INTERNET ACCESS IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN WEST JAVA BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC)

Siswanto

Universitas Negeri Semarang, Jalan Raya Banaran, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, 50229
Siswanto27@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

The study's purpose is to examine the effect of Internet infrastructure on economic growth before and during the Covid-19 pandemic in West Java. Other independent variables such as COVID-19 positive cases growth, labor, and domestic investment are also investigated. The research method used is panel data linear regression analysis with the selected approach, namely the fixed effect model. The data used is panel data which consists of data from 27 districts/cities in West Java with a 4-year period from 2018-2021. Data sources come from the Central Bureau of Statistics, Community and Village Empowerment Service, Manpower and Transmigration Office, Investment and One-Stop Services Office, and Covid-19 Information & Coordination Center of West Java Province. The main results show that internet infrastructure has a positive and significant effect on economic growth in West Java both before and during the pandemic. Every 1% increase in districts/cities with internet infrastructure in West Java increases economic growth by 0.359794% during the pandemic or greater than before the pandemic by 0.093785%. The COVID-19 positive cases growth has had a significant effect on reducing economic growth in West Java. Labor was another variable that affected economic growth during the pandemic, while domestic investment show an insignificant effect.

Keywords: COVID-19, Domestic Direct Investment; Economic Growth, Internet, Labor

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Variabel independen lainnya seperti pertumbuhan kasus positif COVID-19, tenaga kerja, dan investasi dalam negeri juga diselidiki. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier data panel dengan pendekatan terpilih yaitu model fixed effect. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari data 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan periode 4 tahun dari tahun 2018-2021. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat. Hasil utama menunjukkan bahwa infrastruktur internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat baik sebelum maupun selama pandemi. Setiap kenaikan 1% kabupaten/kota yang memiliki infrastruktur internet di Jawa Barat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,359794% pada masa pandemi atau lebih besar dari sebelum pandemi sebesar 0,093785%. Pertumbuhan kasus positif COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Tenaga kerja merupakan variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama pandemi, sedangkan investasi domestik menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Kata Kunci: COVID-19, Internet, Investasi dalam negeri, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali menginfeksi Indonesia pada awal tahun 2020 lalu, Pandemi COVID-19 telah berhasil mengubah berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun pandemi juga membuat perekonomian jatuh. Hal tersebut

disebabkan karena banyaknya kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan di seluruh wilayah, khususnya Pulau Jawa, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus (Fauzi, 2020).

Seluruh perilaku masyarakat, mulai dari aktivitas belajar, bertransaksi, melakukan konsumsi hingga bekerja dibatasi selama pandemi. Jika semula, semua aktivitas dapat dikerjakan secara langsung dan melibatkan kontak fisik, namun dengan adanya pandemi, semua kegiatan dialihkan ke sistem online karena adanya kebijakan pembatasan sosial seperti kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) yang masif diterapkan. Sebagai akibat dari adanya kebijakan ini, produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa menurun selama pandemi sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Yamali & Putri, 2020).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerima dampak ekonomi pandemi yang cukup signifikan. Sebelum terjadi pandemi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selalu konsisten berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 1). Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat juga berperan krusial dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Barat terhadap PDB nasional tercatat sebesar 13,1% dan berada pada posisi ketiga di Indonesia. Namun, setelah pandemi menyerang Indonesia, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut langsung terkontraksi sebesar 2,52% dan bahkan penurunan ini lebih besar dari rata-rata nasional yang hanya menurun sebesar 2,07% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023). Saat ini, perekonomian di Jawa Barat mulai menunjukkan pulih yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi di Indonesia.

Di saat situasi sulit dan serba terbatas yang sedang terjadi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet di masa pandemi menjadi urgen, khususnya untuk keperluan pekerjaan dan melakukan kegiatan bisnis. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2021 menyatakan sebanyak 16,83% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce) pada masa pandemi. Sementara itu, sekitar 37% masyarakat lainnya menggunakan internet untuk

mendukung kelancaran bekerja (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2021). Dalam arti lain, pandemi telah mendorong pergeseran penggunaan internet menjadi lebih intensif.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional 2013-2021 (%)

Sumber: BPS 2013-2021, diolah

Internet dapat mengubah aktivitas perekonomian masyarakat. Jika dulu, kegiatan jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung melalui kontak fisik, namun dengan adanya internet masyarakat dapat membeli atau menjual barang dan jasa tanpa harus bertemu secara langsung. Saat ini, telah banyak berkembang aplikasi e-commerce yang sistemnya harus terkoneksi internet untuk menjual atau membeli barang tanpa harus bertemu. Selain mendorong kegiatan jual beli menjadi lebih praktis, internet juga dapat memperlancar aktivitas pekerjaan. Masyarakat pekerja dapat lebih mudah dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya untuk meningkatkan produktivitasnya. Kegiatan rapat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dengan adanya internet karena dapat berkomunikasi secara langsung melalui aplikasi *video conference* (Sianturi, 2017).

Internet dapat berimplikasi positif terhadap pembangunan ekonomi digital. Sejalan dengan hal ini, program digitalisasi saat ini sedang gencar dilakukan di berbagai daerah termasuk Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan pengguna internet terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 35,1 juta orang (Ripaldi, 2022). Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan akses internet yang merata ke semua desa

menjadi tantangan bagi Jawa Barat di masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan internet penduduk, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperluas jaringan internet hingga ke 5.300 desa di Jawa Barat melalui Program Desa Digital (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2022).

Sebagai akibat dari adanya fenomena teknologi internet ini, telah banyak penelitian terdahulu yang menyelidiki dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian Tripathi & Inani (2016) mengenai pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di 42 negara Sub-Sahara Afrika. Penelitian mengenai dampak infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi juga pernah dilakukan di Indonesia. Dengan menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2001-2016, Lubis & Febrianty (2018) menyimpulkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, maka berdampak positif terhadap peningkatan PDB.

Studi lainnya, dilakukan oleh Gruber dkk., (2014) yang memperkirakan dampak akses infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di 27 negara anggota Uni Eropa. Penelitian serupa dilakukan oleh Ghosh (2017) untuk negara-negara Timur Tengah-Afrika Utara dan Jung & Lopez-Bazoc (2020) yang melakukan penelitian dengan menggunakan data 27 negara bagian Brasil. Sementara itu, penelitian tentang dampak infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat ditemukan dalam penelitian Untari dkk. (2019) dan Gunawan (2019). Sebagian besar penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa teknologi internet telah banyak memengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat ditentukan oleh teknologi, termasuk internet yang saat ini telah berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena internet membuat aktivitas perekonomian menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Dengan bertambah majunya teknologi internet, masyarakat menjadi saling terhubung satu sama lain dan lebih mudah dalam mengakses atau mencari informasi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan bisnis (Katz dkk., 2020). Selain itu, internet juga memudahkan masyarakat

dalam memasarkan dan menjual produk melalui bantuan aplikasi berupa e-commerce serta membantu memudahkan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan lebih efektif dan efisien (Zhang, 2021).

Meskipun sudah banyak literatur sebelumnya yang meninjau mengenai pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebagian besar studi dilakukan pada situasi ekonomi yang cenderung normal. Saat ini, karya yang meneliti tentang dampak infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di situasi ekonomi yang sulit seperti Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi masih terbatas. Katz dkk., (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh digitalisasi yang diukur dengan penggunaan internet broadband terhadap pertumbuhan ekonomi selama terjadinya wabah SARS. Pada penelitian ini, wabah SARS yang terjadi pada tahun 2002-2004 dijadikan acuan untuk menilai “kesulitan ekonomi” yang terjadi pada saat itu dan menyelidiki bagaimana internet bekerja dalam memitigasi kerusakan ekonomi yang terjadi. Meskipun demikian, riset yang menginvestigasi mengenai dampak infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa Pandemi COVID-19 masih sulit ditemukan. Padahal, Pandemi COVID-19 merupakan fenomena baru yang belum pernah dihadapi manusia sebelumnya dan dampaknya terjadi secara global di seluruh dunia.

Secara general, karya ini bertujuan untuk menyelidiki dampak infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat pada dua tahun pertama terjadinya Pandemi COVID-19. Di samping itu, penelitian ini juga menginvestigasi pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama 2 tahun sebelum terjadi pandemi, sehingga dapat diketahui berapa besar perbedaan pengaruh internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat baik sebelum maupun selama terjadi pandemi.

Menurut studi sebelumnya (Menajang, (2019); Nizar dkk., (2013); dan Hellen dkk., (2017)), terdapat beberapa variabel penjelas lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja dan investasi. Hal ini juga

diperjelas pada teori produksi perusahaan - yang merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi- menyatakan bahwa selain bahan baku, faktor lainnya yang mempengaruhi produksi barang dan jasa di perusahaan adalah tenaga kerja, investasi, dan penerapan teknologi (Autor & Salomons, 2018). Oleh karena itu, variabel tenaga kerja dan investasi dalam negeri juga diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Selain itu, untuk mengestimasi dampak Pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, jumlah pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Jawa Barat juga disertakan dalam persamaan regresi pada model regresi selama terjadi pandemi COVID-19. Pada akhirnya, penelitian ini menjawab pertanyaan besar apakah internet dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak negatif pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

METODE

Data yang dianalisis di dalam penelitian ini adalah data panel yang bersumber dari data 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

dengan periode waktu penelitian selama 4 tahun dari 2018-2021. Periode penelitian mencakup 2 tahun sebelum terjadi pandemi (2018-2019) dan 2 tahun selama pandemi (2020-2021). Keterbatasan data membuat periode penelitian hanya dilakukan masing-masing selama 2 tahun. Di samping itu, 2 tahun awal terjadinya Pandemi COVID-19 merupakan periode-periode krusial pandemi daripada tahun-tahun setelahnya karena program vaksinasi belum intensif dilaksanakan pada periode ini. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2023), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2022), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat (2021), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat (2022), dan Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (2023).

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi dan 4 variabel penjelas yaitu infrastruktur internet, tenaga kerja, investasi dalam negeri, dan kasus positif COVID-19. Seluruh variabel dijelaskan secara operasional melalui tabel berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Sumber Data
Dependent		
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Logaritma Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Badan Pusat Statistik Jawa Barat
Independent		
Internet (INT)	Logaritma banyaknya desa di Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki akses internet	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat
Tenaga Kerja (LAB)	Logaritma jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang bekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat
Investasi dalam negeri (INV)	Logaritma jumlah realisasi investasi dalam negeri yang masuk ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat
Pertumbuhan Kasus Positif COVID-19 (COV19)	Logaritma dari pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat

Sumber: Penulis, 2023

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu 1) Mengetahui pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sebelum terjadi pandemi dan 2) Mengetahui pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Jawa Barat selama terjadi pandemi. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis regresi linear berganda data panel digunakan untuk menarik kesimpulan. Agar hasil penelitian semakin akurat, penelitian ini menyertakan variabel lainnya yang dapat memengaruhi

pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja dan investasi dalam negeri.

Untuk menjawab dua tujuan penelitian tersebut, penelitian ini berpedoman pada penelitian Katz dkk., (2020) dan Zhang (2021) di mana model regresi yang dibangun untuk mengestimasi efek infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebelum dan selama terjadi pandemi dijelaskan melalui dua model sebagai berikut:

$$PDRB_{i,t} = \alpha + \beta_1 INT_{i,t} + \beta_2 LAB_{i,t} + \beta_3 INV_{i,t} + \epsilon \dots (1)$$

$$PDRB_{i,t} = \alpha + \beta_1 INT_{i,t} + \beta_2 LAB_{i,t} + \beta_3 INV_{i,t} + \beta_4 COV19_{i,t} + \epsilon \dots (2)$$

Di mana: Persamaan (1) menggambarkan model regresi untuk mengetahui pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat di dua tahun sebelum terjadinya pandemi sedangkan Persamaan (2) digunakan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat

selama dua tahun terjadi pandemi. PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi, INT mewakili infrastruktur internet, LAB adalah tenaga kerja, INV merupakan investasi dalam negeri dan COV adalah pertumbuhan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat per 31 Desember 2020 dan 2021. α didefinisikan sebagai konstanta regresi, sementara β_1 -5 merupakan koefisien regresi dari masing-masing seluruh variabel tidak terikat. i menunjukkan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, t merupakan tahun dan ϵ adalah error. Sebelum dilakukan analisis linear berganda, model regresi harus melalui Uji Choi, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan metode pemilihan model estimasi yang paling tepat. Selain itu, model regresi juga harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Rata-Rata	Standar Deviasi	Maksimal	Minimal
Sebelum COVID-19 (2018-2019)				
PDRB Per Kapita (Rp Ribu)	40002,1	24451,6	113177	19009
Tenaga Kerja (Orang)	790423	531863	2538637	85113
Investasi dalam negeri (Rp Milyar)	1695,6	3475,21	20206,85	0
Internet (Jumlah Desa)	141	92	344	15
Selama COVID-19 (2020-2021)				
PDRB Per Kapita (Rp Ribu)	42438,87	26738,8	121126	19241
Tenaga Kerja (Orang)	814598	536604	2445768	88631
Investasi dalam negeri (Rp Milyar)	2062	3058,06	11777,33	0,2574
Internet (Jumlah Desa)	176	109	368	15
Pertumbuhan COVID-19 (%)	1442,19	2968,92	13622	3,32

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel di atas menerangkan gambaran ukuran penyebaran data untuk semua variabel penelitian baik sebelum maupun selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang terlihat pada tabel, nilai rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat sebelum terjadi Pandemi COVID-19 (2018-2019) adalah sebesar Rp 40.002.100,

sedangkan selama pandemi (2020-2021), nilai rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat meningkat sebesar Rp 42.438.870. Meskipun terjadi peningkatan pada rata-rata PDRB per kapita, namun pada periode awal terjadinya pandemi COVID-19 (tahun 2020), nilai rata-rata PDRB per kapita sempat menurun di 17 wilayah dari

periode sebelumnya (periode 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan terhadap PDRB per kapita di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada periode pandemi berikutnya (periode 2021), pembangunan ekonomi di Jawa Barat mulai menunjukkan tanda-tanda pulih sering dengan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah dan adanya program vaksinasi COVID-19.

Nilai standar deviasi PDRB per kapita di Jawa Barat baik sebelum dan selama Pandemi COVID-19 menunjukkan angka lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya. Ini menyiratkan bahwa data menyebar secara homogen atau tidak terdapat penyimpangan yang berarti pada data. Kota Bandung memiliki PDRB per kapita tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar Rp 113.177.000 pada 2019 (periode sebelum COVID-19) dan Rp 121.126.000 pada 2021 (periode selama COVID-19). Sedangkan Kabupaten Cianjur adalah kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah di Jawa Barat yaitu sebesar Rp 19.009.000 pada 2018 (periode sebelum COVID-19) dan Rp 19.241.000 pada 2020 (periode selama COVID-19).

Sebelum terjadi pandemi (2018-2019), rata-rata jumlah tenaga kerja di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 790.423, sementara selama pandemi jumlah rata-rata tenaga kerja di Jawa Barat meningkat menjadi 814.598. Peningkatan umumnya terjadi pada periode kedua terjadinya Pandemi COVID-19 yaitu periode 2021, sementara di periode pertama terjadi Pandemi COVID-19 di Indonesia (periode 2020), terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap penurunan tenaga kerja di Jawa Barat pada periode pertama terjadi Pandemi COVID-19.

Nilai standar deviasi variabel tenaga kerja di Jawa Barat baik sebelum dan selama Pandemi COVID-19 menunjukkan angka lebih kecil dibanding nilai rata-ratanya yang menandakan bahwa data kurang beragam. Wilayah di Jawa Barat dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 2.538.637 pada 2019 (periode

sebelum COVID-19) dan 2.445.768 pada 2021 (periode selama COVID-19). Sementara itu, wilayah di Jawa Barat dengan tenaga kerja paling sedikit ditempati oleh Kota Banjar yaitu sebanyak 85.113 pada 2018 (periode sebelum COVID-19) dan 88.631 pada 2020 (periode selama COVID-19).

Rata-rata nilai investasi dalam negeri di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebelum pandemi mencapai Rp 1,6956 Triliun, sementara selama pandemi meningkat menjadi Rp 2,062 Triliun. Ini menandakan bahwa Pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap penurunan investasi dalam negeri di Jawa Barat. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat justru menerima investasi dalam negeri lebih besar di masa pandemi daripada masa sebelum pandemi. Standar deviasi variabel investasi dalam negeri baik sebelum maupun selama Pandemi COVID-19 menunjukkan angka lebih besar dari pada nilai rata-ratanya yang berarti data menyebar secara heterogen dan beragam. Nilai investasi dalam negeri terbesar di Jawa Barat sebelum dan selama pandemi dipegang oleh Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 20,2 Triliun (sebelum pandemi) dan Rp 11,77 Triliun (selama pandemi). Sementara itu, pada masa sebelum pandemi, ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang tidak menerima dana investasi dalam negeri yaitu Kabupaten Tasikmalaya 2018-2019, Kabupaten Ciamis 2019, Kabupaten Pangandaran 2019, dan Kota Banjar 2018-2019. Sedangkan, nilai investasi dalam negeri terkecil di Jawa Barat selama pandemi ditempati oleh Kabupaten Ciamis dengan nilai investasi hanya Rp 0,257 Triliun pada 2020

Rata-rata sebanyak 141 desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah memiliki akses internet sebelum pandemi. Angka ini meningkat sebesar 24,82% menjadi rata-rata 171 wilayah terakses internet selama pandemi. Hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan desa yang terakses internet setelah terjadi pandemi. Ini membuktikan bahwa peran internet cukup dibutuhkan selama pandemi. Nilai standar deviasi variabel infrastruktur internet (sebelum dan selama pandemi) menunjukkan angka lebih kecil dibandingkan rata-ratanya yang berarti data menyebar homogen. Kabupaten Bogor adalah wilayah

yang memiliki jumlah desa terakses internet terbanyak di Jawa Barat yaitu sebanyak 344 desa pada periode sebelum pandemi dan 368 desa pada periode selama pandemi. Sementara itu, Kota Tasikmalaya adalah wilayah di Jawa Barat dengan jumlah desa terakses internet paling sedikit yaitu hanya 15 desa.

Tabel di atas juga menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan kasus positif COVID-19 di

Provinsi Jawa Barat cukup pesat, khususnya pada tahun pertama pandemi menyerang Indonesia, di mana pada saat itu, program vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus belum dilaksanakan. Sementara itu, nilai standar deviasi pertumbuhan kasus positif COVID-19 menunjukkan angka lebih besar dibanding rata-ratanya yang menandakan bahwa data menyebar secara heterogen.

Hasil Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect test	Statistic	Df	Prob.
Sebelum COVID-19			
Cross-section F	442.905265	(26,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	333.475951	26	0.0000
Selama COVID-19			
Cross-section F	2404.817003	(26,23)	0.0000
Cross-section Chi-square	427.042757	26	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil uji Chow pada tabel di atas memperlihatkan bahwa, nilai probability pada kolom Cross-section Chi-square pada model regresi sebelum dan selama terjadi Pandemi COVID-19 sebesar $0,0000 < 0,05$. Sehingga, model yang tepat di antara CEM dan FEM

pada model regresi sebelum dan selama terjadi pandemi adalah FEM dan perlu dilakukan uji selanjutnya yaitu Uji Hausman untuk menentukan Model mana yang paling tepat digunakan di antara FEM dan REM.

Hasil Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Hausman Test Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Sebelum COVID-19			
Cross-section random	18.816911	3	0.0003
Selama COVID-19			
Cross-section random	30.059022	4	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang digambarkan pada tabel di atas, nilai probability pada model sebelum dan selama Pandemi COVID-19 menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Sehingga, metode yang dipilih

adalah FEM dari pada REM dan tidak perlu dilakukan pengujian pemilihan model selanjutnya. Dalam hal ini, kedua model diestimasi dengan menggunakan Model Fixed Effect (FEM)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Sebelum COVID-19	Selama COVID-19
Uji Normalitas		
Probability	0.059679	0.131426
Jarque-Bera	5.856365	4.058625
Uji Heteroskedastisitas		
Prob. Chi-Square (3)/(4) (Breusch-Pagan)	0.1562	0.0676

Uji Asumsi Klasik	Sebelum COVID-19	Selama COVID-19
Uji Multikolinearitas		
Nilai Centered VIF		
Tenaga Kerja	2.892276	3.752928
Investasi dalam negeri	1.388477	1.827698
Internet	2.338180	2.514173
Pertumbuhan COVID-19	-	1.006132

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan uji normalitas, nilai probability pada Model sebelum pandemi sebesar $0.059679 > 5\%$ (Jarque-Bera sebesar 5.856365) dan selama pandemi sebesar $0.131426 > 5\%$ (Jarque-Bera sebesar 4.058625). Ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Uji heteroskedastisitas dengan Metode Breusch-Pagan menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square (3) pada model sebelum pandemi sebesar $0.1562 > 5\%$ dan selama pandemi sebesar $0.0676 > 5\%$. Hal ini menandakan bahwa data telah lolos dari uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang terakhir berupa uji multikolinearitas dilakukan

dengan menggunakan Centered VIF. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Centered VIF lebih kecil dari 10 yang berarti data lolos dari uji multikolinearitas.

Hasil Analisis Linear Berganda

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan hasil analisis regresi linear berganda untuk masing-masing model sebelum pandemi dan selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan fixed effect model (FEM).

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan Fixed Effect Model

Variabel	Model 1 Sebelum COVID-19 Probability/Coefficient	Model 2 Selama COVID-19 Probability/Coefficient
Constant	0.3376 (1.082583)	0.0000*** (5.429243)
Tenaga Kerja	0.0082*** (0.567575)	0.0758* (-0.279545)
Investasi dalam negeri	0.3133 (-0.001230)	0.6797 (0.000958)
Internet	0.0004*** (0.093785)	0.0435** (0.359794)
Pertumbuhan COVID-19	-	0.0000*** (-0.007070)
Adjusted R ²	0.996243	0.999484
Prob. (f-statistic)	0.000000***	0.000000***
F-Statistik	485.5788	3422.113

Keterangan: *p < 0,1 **p < 0,05 ***p < 0,01; Jumlah observasi: 54

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil analisis regresi sebelum pandemi dengan FEM (Model 1) memperlihatkan nilai p value pada variabel tenaga kerja sebesar $0,0082 < 0,01$ dan nilai *coefficient* sebesar 0.567575. Ini berarti sebelum pandemi, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Jika terjadi peningkatan sebesar 1% pada variabel tenaga kerja sebelum pandemi, maka terjadi peningkatan pada PDRB per kapita di Jawa Barat sebesar 0.567575%. Namun, pada model selama pandemi (Model

2), variabel tenaga kerja justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai p value sebesar 0.0758 < 0,1 dan *coefficient* sebesar -0.279545. Setiap peningkatan sebesar 1% pada variabel tenaga kerja selama pandemi di Jawa Barat, maka terjadi penurunan PDRB per kapita sebesar 0.279545%. Sementara itu, variabel investasi dalam negeri justru menunjukkan pola sebaliknya. Sebelum dan selama pandemi, variabel investasi dalam negeri tidak

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB per kapita di Jawa Barat. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai p value variabel investasi dalam negeri sebesar $0.3133 > 1\%$, 5% , atau 10% (Model 1) dan $0.6797 > 1\%$, 5% , atau 10% (Model 2).

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa nilai p value pada variabel internet sebelum pandemi menunjukkan angka sebesar $0.0004 < 1\%$ dengan coefficient sebesar 0.093785 . Artinya infrastruktur internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ketika terjadi peningkatan pada jumlah desa yang terakses internet di Jawa Barat sebesar 1% , maka PDRB per kapita Jawa Barat juga meningkat sebesar 0.093785% . Hasil yang sama juga ditunjukkan pada model regresi setelah terjadi pandemi, di mana nilai p value variabel infrastruktur internet menunjukkan angka sebesar $0.0435 < 5\%$ dengan coefficient sebesar 0.359794 . Hal ini bermakna bahwa internet juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat selama pandemi. Selama pandemi, ketika terjadi peningkatan pada jumlah desa yang terakses internet di Jawa Barat sebesar 1% , maka PDRB per kapita Jawa Barat juga meningkat sebesar 0.359794% atau lebih besar dari pengaruh sebelum pandemi. Berdasarkan hasil analisis linear berganda juga dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan kasus positif COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB per kapita Jawa Barat. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai p value sebesar $0.0000 < 0,01$ dan coefficient sebesar -0.0070700 . Setiap peningkatan pertumbuhan kasus positif COVID-19 sebesar 1% di Jawa Barat, maka diikuti dengan penurunan PDRB per kapita sebesar 0.007070% .

Berdasarkan hasil yang tertera pada nilai Adjusted R^2 , seluruh variabel dalam model regresi sebelum pandemi mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 99.6243% , sedangkan model regresi setelah terjadi pandemi mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 99.9484% . Sementara itu, nilai prob (f -statistic) pada kedua model regresi baik sebelum dan selama terjadi pandemi, masing-masing menunjukkan angka kurang

dari $0,01$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ketika diuji secara simultan.

PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa infrastruktur internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama 2 tahun terjadi pandemi (Model 2). Pandemi COVID-19 menyebar di Provinsi Jawa Barat dan daerah lain dengan begitu cepat pada 2 tahun pertama terjadi pandemi. Saat itu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah serta karantina yang ketat pada masyarakat. Oleh karena itu, peran internet sangat krusial dalam mengatasi situasi seperti ini dan lebih menonjol dari situasi sebelumnya karena akses terhadap internet merupakan kebutuhan primer untuk pekerjaan jarak jauh yang dilakukan secara online. Dalam arti lain, tanpa adanya infrastruktur internet yang memadai, kebijakan bekerja dari rumah sulit dilakukan.

Penelitian ini juga memperkirakan sejauh mana internet mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama 2 tahun setelah terjadi Pandemi COVID-19. Hasil studi membuktikan bahwa peningkatan sebesar 1% daerah yang terakses internet di Jawa Barat dapat meningkatkan PDRB per kapita sebesar 0.359794% selama 2 tahun terjadi Pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kondisi normal yaitu dua tahun sebelum terjadi Pandemi COVID-19, kontribusi internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan setiap peningkatan sebesar 1% daerah yang terakses internet di Provinsi Jawa Barat, hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.093785% dengan periode penelitian yang sama namun terjadi sebelum terjadi pandemi. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat menggunakan internet untuk bekerja di rumah selama pandemi dibandingkan dengan masa normal. Selain itu, pembangunan infrastruktur internet di Jawa Barat juga belum terlalu masif dan gencar dilakukan pada periode ini

dibandingkan dengan periode selama terjadi pandemi di Indonesia.

Dari hasil deskripsi data, terjadi peningkatan terhadap desa yang terakses internet di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2021. Pada tahun 2021, jumlah desa yang terakses internet di Jawa Barat adalah sebanyak 4827 desa, atau meningkat sebesar 2,25% dari tahun sebelumnya yang hanya 4721 desa. Meskipun hanya meningkat sebesar 2,25% dari tahun sebelumnya, namun memberikan manfaat terhadap perekonomian di kabupaten/kota di Jawa Barat yang cukup signifikan seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Jawa Barat. Sebagai contoh, Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah desa terakses internet tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2020, jumlah desa yang terakses infrastruktur internet di Kabupaten Bogor sebanyak 358 desa, kemudian meningkat sebanyak 368 desa pada 2021. Peningkatan jumlah desa yang terakses internet ini diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Bogor. Pada tahun 2020 Kabupaten Bogor memiliki PDRB per kapita sebesar Rp 43.586.000, kemudian meningkat sebesar Rp 45.339.000 pada tahun 2021. Dari sisi agregat, PDRB per kapita Jawa Barat pada tahun 2020 hanya sebesar 43.237.000, namun meningkat sebesar 4,53% menjadi Rp 45.194.000 pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan periode sebelum terjadi Pandemi COVID-19, jumlah desa yang terakses internet pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 2958 desa, kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 56,99% pada tahun 2019 menjadi 4644 desa. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, namun kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Barat cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan periode selama Pandemi COVID-19. Pada tahun 2018, Jawa Barat memiliki PDRB per kapita sebesar Rp 29.161.000, kemudian meningkat hanya sebesar 3,72% menjadi Rp 30.247.000 pada tahun 2019. Peningkatan PDRB per kapita ini cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan periode selama pandemi COVID-19 yang mencapai 4,53%, meskipun pada periode selama terjadi pandemi COVID-19, peningkatan desa yang terakses internet di Jawa Barat jauh lebih rendah jika

dibandingkan dengan periode sebelum terjadi pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena penduduk lebih banyak mengakses internet selama pandemi daripada sebelum pandemi untuk mendukung dan menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia. Untari dkk., (2019) menemukan infrasktruktur internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia pada rentang tahun 2011-2016. Lebih lanjut, penelitian tersebut membuktikan bahwa peningkatan 1% akses terhadap infrasktruktur internet akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 0,8%. Temuan lainnya berasal dari penelitian Gunawan, (2019) yang menyatakan bahwa proporsi rumah tangga yang menggunakan internet sebagai proksi variabel infrasktruktur internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia pada rentang waktu 2014-2015. Setiap peningkatan 1% rumah tangga yang mengakses internet, maka mendorong 0,66% PDRB.

Hasil penelitian juga menginformasikan bahwa pertumbuhan kasus positif COVID-19 memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan koefisien elastisitas variabel ini yang menunjukkan angka -0.007070 dengan signifikansi 0,0000 selama 2 tahun terjadi pandemi. Ini artinya peningkatan sebesar 1% dari pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Jawa Barat berkontribusi dalam menurunkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 0.007070%. Pertumbuhan kasus positif COVID-19 meningkat pesat di seluruh daerah di Jawa Barat pada dua tahun pertama terjadi Pandemi COVID-19. Pada periode ini banyak perusahaan di Jawa Barat yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah karena mengikuti anjuran pemerintah daerah Jawa Barat. Kebijakan ini menyebabkan produktivitas perusahaan dan masyarakat dalam menghasilkan barang atau jasa menurun yang pada akhirnya juga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zhang (2021) yang menyatakan secara empiris bahwa

COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di China.

Temuan lainnya menginformasikan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan dalam menurunkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama pandemi. Hasil studi membuktikan bahwa selama pandemi, setiap kenaikan sebesar 1% tenaga kerja, maka menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.279545% di Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena selama 2 tahun terjadi pandemi di Jawa Barat, banyak perusahaan yang mengurangi biaya produksi untuk menekan kerugian usaha, termasuk biaya tenaga kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat, sementara jumlah tenaga kerja baru selalu ada setiap tahun. Karena jumlah tenaga kerja yang memproduksi barang atau jasa di perusahaan berkurang, maka output barang dan jasa perusahaan yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi juga terpengang (Paramita & Purbadharmaja, 2015). Selain itu, pandemi juga menyebabkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa berkurang karena sebagian besar tenaga kerja perusahaan melakukan pekerjaan dari rumah (Abidin, 2021). Situasi ini tidak berlaku di situasi normal di mana tenaga kerja justru berkontribusi terhadap meningkatnya PDRB perkapita di Jawa Barat sehingga sejalan dengan penelitian Nizar dkk., (2013).

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel investasi dalam negeri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita di Jawa Barat baik sebelum maupun selama Pandemi COVID-19. Menurut Mokodompis & Maramis (2015), investasi tidak berdampak signifikan terhadap PDRB dapat disebabkan karena sebagian besar penanaman modal tidak diarahkan ke sektor produktif melainkan ke sektor moneter sehingga tidak berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk yang menjadi ciri dari pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur internet turut membantu perekonomian Jawa Barat untuk pulih dari Pandemi COVID-19. Pemerintah Jawa Barat telah membangun infrastruktur internet dengan cukup cepat di seluruh wilayah. Difusi internet yang cepat ini secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama waktu normal dan perannya menjadi lebih besar selama pandemi terjadi. Studi ini menunjukkan bahwa infrastruktur internet memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi lebih besar selama periode Pandemi COVID-19 daripada selama periode normal lainnya.

Temuan ini berimplikasi pada perekonomian di Jawa Barat untuk lebih cepat pulih dari pandemi. Meskipun saat ini, kondisi normal sudah mulai dirasakan di Indonesia dan Jawa Barat khususnya, karena efek dari masifnya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, namun setidaknya studi ini memberi bukti bagaimana internet berperan krusial di saat-saat genting yang memaksa orang-orang untuk tetap tinggal di rumah. Studi ini memberi pelajaran bagi pihak terkait, jika di masa depan, pandemi "baru" datang kembali dan memaksa orang-orang untuk kembali melakukan aktivitas dari rumah, maka internet dapat menjadi solusi yang dapat mengantisipasi dampaknya. Lebih lanjut, mempromosikan difusi internet di Jawa Barat akan membantu daerah ini meringankan kerusakan ekonomi dalam ledakan pandemi berikutnya.

Meskipun Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan infrastruktur internet yang tinggi, namun masih ada kesenjangan yang besar antara wilayah kota dan kabupaten. Secara umum, wilayah perkotaan jauh lebih merata dalam hal akses terhadap infrastruktur internet daripada wilayah kabupaten. Untuk mengatasi kesenjangan digital ini, Pemerintah Jawa Barat dan industri telekomunikasi harus merumuskan strategi baru untuk menjembatani kesenjangan digital antara daerah perkotaan dengan wilayah kabupaten di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat harus membuat kebijakan yang

mendorong investasi infrastruktur telekomunikasi dengan tingkat infrastruktur internet yang rendah. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi dan

pemotongan pajak serta menerapkan regulasi yang menjamin persaingan di industri telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19: Analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117–138.
- Autor, D., & Salomons, A. (2018). Is automation labor-displacing? Productivity growth, employment, and the labor share. *National Bureau of Economic Research*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, B. J. (2023). *PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) 2017-2022*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/155/708/1/pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-ribu-rupiah-.html>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, D. J. (2022). *Jumlah Desa yang Memiliki Akses Internet Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/data-set/jumlah-desaya-memiliki-akses-internet-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, D. J. (2022). *Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Bara*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/data-set/jumlah-realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, D. J. (2021). *Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/data-set/jumlah-penduduk-yang-bekerja-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174–178.
- Ghosh, S. (2017). Broadband penetration and economic growth: Do policies matter? *Telematics and Informatics*, 34(5), 676–693.
- Gruber, H., Hätönen, J., & Koutroumpis, P. (2014). Broadband access in the EU: An assessment of future economic benefits. *Telecommunications Policy*, 38(11), 1046–1058.
- Gunawan, I. (2019). The effect of information & communication technology towards regional economic growth in Indonesia. *Visnik*, 4, 25–36.
- Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2017). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *Inovasi*, 13(1), 28–38.
- Jung, J., & Lopez-Bazoc, E. (2020). On the regional impact of broadband on productivity: the case of Brazil. *Telecommun Policy*, 44(1), 1–14.
- Katz, R., Jung, J., & Callorda, F. (2020). Can digitization mitigate the economic damage of a pandemic? Evidence from SARS. *Telecommunications Policy*, 44(10), 102044.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, K. R. (2021). *Internet, primadona kala pandemi*. <https://kominfo.go.id/content/detail/36448/internet-primadona-kala-pandemi/0/artikel>
- Lubis, N., & Febrianty, H. F. (2018). Internet influencing economic growth: What and how much? A case study of Indonesia using time series data (2001-2016). *In 3rd International Conference of Integrated Intellectual Community*

- (ICONIC).
- Menajang, H. (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4).
- Mokodompis, R., & Maramis, V. R. D. M. (2015). Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Efisiensi*, 15(1).
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, 23(02), 172.
- Paramita, A. I. D., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, J. (2022). *T20 INDONESIA 2022*, Ridwan Kamil Paparkan Transformasi Desa Digital di Jawa Barat. <https://jabarprov.go.id/berita/t20-indonesia-2022-ridwan-kamil-paparkan-transformasi-desa-digital-di-jawa-barat-6390>
- Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Jawa Barat, P. (2023). *Dashboard Statistik Kasus COVID-19 Provinsi Jawa Barat*. <https://dashboard.jabarprov.go.id/id/dashboard-pikobar/trace/statistik>
- Ripaldi, D. (2022). *Pengguna Internet di Jabar Capai 35,1 Juta, Berkah Bagi Ekonomi Digital*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4903372/pengguna-internet-di-jabar-capai-351-juta-berkah-bagi-ekonomi-digital>
- Sianturi, P. (2017). Peran ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Inspirasi*, 8(2), 51–55.
- Tripathi, M., & Inani, S. K. (2016). Does internet affect economic growth in sub-Saharan Africa? *Economics Bulletin*, 36(4), 1993–2002.
- Untari, R., Priyarsono, D. S., & Novianti, T. (2019). Impact of information and communication technology (ICT) infrastructure on economic growth and income inequality in Indonesia. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 6(1), 109–116.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388.
- Zhang, X. (2021). Broadband and economic growth in China: An empirical study during the COVID-19 pandemic period. *Telematics and Informatics*, 58, 101533.



9 772579 923042

E-ISSN : 2579-9231



9 772460 419005

ISSN : 2460-4194

